



PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

2024

**DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

GUBERNUR SULAWESI TENGAH



H. RUSDY MASTURA

WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH



Drs. MA'MUN AMIR

SEKRETARIS PROVINSI SULAWESI TENGAH



Dra. NOVALINA., MM



SAMBUTAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera, Shalom Om Swastiastu, Namu Budaya Salam Kebajikan

Saya menyambut baik diterbitkannya Buku Profil Perkembangan Data Kependudukan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023. Buku ini berisi gambaran kondisi, perkembangan kependudukan berskala provinsi sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), mengamanatkan bahwa profil data kependudukan skala provinsi diterbitkan setiap tahun sekali.

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses pemberian perlindungan dan pengakuan tersebut dilaksanakan dalam administrasi kependudukan.

Data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah adalah data kependudukan yang bersumber dari pelayanan

administrasi kependudukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang dilakukan setiap saat dengan mempergunakan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Keakuratan data kependudukan bergantung pada partisipasi masyarakat yang secara sadar pelaporan peristiwa kependudukan dan pemutakhiran data kependudukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota. Data kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah teruji ketunggalannya melalui perekaman sidik jari dan iris mata.

Data kependudukan yang disajikan dalam Buku Profil Perkembangan Data Kependudukan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 ini bersumber dari data kependudukan bersih (DKB) Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang telah dikonsolidasikan, ditelaah dan dianalisis sehingga dapat dipergunakan untuk semua keperluan oleh seluruh Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah ataupun Lembaga lainnya baik dipusat maupun di daerah antara lain untuk pelayanan publik, alokasi anggaran, perencanaan pembangunan demokrasi, penegakkan hukum, pencegahan kriminal dan evaluasi hasil pembangunan dibidang kependudukan.

Penghargaan kami berikan kepada seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan 5 (Lima) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah. Bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan

informasi yang akurat dan dapat di pertanggung jawabkan, baik yang menyangkut masalah kependudukan, masalah potensi sumber daya daerah maupun informasi tentang kewilayahan, Kesehatan masyarakat, Pendidikan dan lainnya, dan juga pihak yang telah turut membantu tersusunnya Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua dalam mengabdikan kepada masyarakat, bangsa dan negara tercinta.

Palu, Mei 2024
Gubernur Sulawesi Tengah



H. RUSDY MASTURA

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Ridho-Nya sehingga penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik dan penuh semangat.

Data Kependudukan yang berbasiskan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) merupakan data dasar yang dapat di sajikan diantaranya menjadi data agregat untuk mendukung berbagai keperluan diantaranya Profil Perkembangan Kependudukan. Profil Perkembangan Kependudukan ini disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan oleh karena itu untuk mewujudkan amanat Undang-Undang tersebut, Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah telah menyusun Buku Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2024 dalam rangka untuk memberikan informasi penyajian data dan perkembangan kependudukan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam penyusunan buku profil ini kami menyadari bahwa buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, yang telah berhasil disusun masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan dari semua pihak yang membaca buku profil ini sangat diharapkan demi penyempurnaan dimasa mendatang.

Akhirnya, Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berupaya dan berhasil dalam menyusun Buku Profil Perkembangan Kependudukan ini dan semoga

bermanfaat serta semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian. Amin.

Palu, Mei 2024

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



ANDI HAJIDIN, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19710208 199903 1 003

DAFTAR ISI

SAMBUTAN GUBERNUR	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR GRAFIK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	4
1.3 Ruang Lingkup	4
1.4 Pengertian Umum/Daftar Istilah yang Digunakan	5
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH	
2.1 Letak Geografis	13
2.2 Kondisi Demografis Daerah	15
2.2.1 Laju Pertumbuhan Penduduk.....	16
2.2.2 Tingkat Penyebaran Penduduk	17
2.3 Gambaran Ekonomi Daerah	17
2.3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	17
2.3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	22
2.4 Potensi Pengembangan Wilayah	22
a. Hortikultura	24
b. Perkebunan	25
c. Peternakan	25
d. Perikanan	25
e. Industri.....	25
f. Pariwisata	26

BAB III SUMBER DATA

3.1 Registrasi	31
3.2 Non Registrasi	31
3.3 Data Lintas Sektor	31

BAB IV PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

4.1 Jumlah dan Persebaran Penduduk	34
4.1.1 Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Jenis Kelamin Kabupaten/Kota	34
4.1.2 Kepadatan Penduduk	49
4.1.3 Laju Pertumbuhan Penduduk	50
4.2 Penduduk menurut Karakteristik Demografi	52
4.2.1 Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Umur dan Jenis Kelamin	52
a. Rasio Jenis Kelamin	54
b. Piramida Penduduk	56
c. Rasio Ketergantungan	59
4.2.2 Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Status Kawin.....	60
a. Angka Perkawinan Kasar	62
b. Angka Perkawinan Umum	62
c. Angka Perkawinan menurut Kelompok Umur	65
d. Rata-Rata Umur Kawin Pertama	66
e. Angka Perceraian Kasar.....	69
f. Angka Perceraian Umum	70
4.3.3 Keluarga	71
a. Jumlah Keluarga dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga	71
b. Hubungan dengan Kepala Keluarga	72
c. Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan umur dan Status Kawin.....	74

d. Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan Jenis Kelamin	75
e. Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan Status Kawin.....	76
f. Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan Pendidikan	78
g. Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan Status Pekerjaan	80
4.3.4 Penduduk menurut Karakteristik Sosial.....	81
a. Jumlah Penduduk menurut Pendidikan.....	81
b. Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan	84
c. Jumlah Penduduk menurut Agama	85
d. Jumlah Penduduk menurut Disabilitas	87
4.3.5 Kelahiran.....	89
a. Angka Kelahiran Umum.....	90
b. Angka Kelahiran Kasar	91
4.3.6 Kematian.....	91
4.3 Kesehatan	93
1. Kelahiran.....	93
2. Kematian	94
a. Angka Kematian Bayi	94
b. Angka Kematian Neonatal.....	95
c. Angka Kematian Post-Neonatal.....	96
d. Angka Kematian Anak Balita	97
e. Kematian Ibu	98
4.3.1 Pendidikan.....	100
1. Angka Melek Huruf (AMH).....	100
2. Angka Partisipasi Kasar (APK).....	101
3. Angka Partisipasi Murni (APM).....	102
4. Angka Penduduk Putus Sekolah	103
4.3.2 Ekonomi.....	105

4.3.3 Sosial	107
1. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	107
2. Proporsi Penduduk Penyandang Disabilitas	113
3. Proporsi Penduduk Miskin Penerima Askeskin	114
4.4 Mobilitas Penduduk	116
 BAB V KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN	
5.1 Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	119
5.2 Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	121
5.3 Kepemilikan Akta.....	122
5.3.1 Akta Kelahiran	122
5.3.2 Akta Perkawinan.....	124
5.3.3 Akta Perceraian	125
5.3.4 Akta Kematian	126
 BAB IV PENUTUP.....	128
6.1 Kesimpulan	128
6.2 Saran	129

DAFTAR TABEL

No.	Halaman
2.1	Luas dan Wilayah dan Persentase Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah menurut Kabupaten/Kota 14
2.2	Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan di Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023 15
2.3	Perkembangan Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Tingkat Kepadatan Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2023 16
2.4	Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2021 dan 2022..... 24
4.1	Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 34
4.1.1	Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Kabupaten Banggai 36
4.1.2	Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Kabupaten Poso 37
4.1.3	Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Kabupaten Donggala 38
4.1.4	Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Kabupaten Toli-Toli..... 39
4.1.5	Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Kabupaten Buol 40
4.1.6	Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Kabupaten Morowali 41
4.1.7	Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Kabupaten Banggai Kepulauan.....42
4.1.8	Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Kabupaten Parigi Moutong 43
4.1.9	Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Kabupaten Tojo Una-Una..... 44
4.1.10	Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Kabupaten Sigi 45
4.1.11	Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Kabupaten Banggai laut 46
4.1.12	Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Kabupaten Morowali Utara 47
4.1.13	Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Kota Palu 48

4.2	Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	50
4.3	Angka Pertambahan Penduduk Sulawesi Tengah Tahun 2023	51
4.4	Jumlah dan Proporsi Penduduk berdasarkan Kelompok Umur	53
4.5	Rasio Jenis Kelamin berdasarkan Kabupaten/Kota	55
4.6	Rasio Jenis Kelamin berdasarkan Kelompok Umur	56
4.7	Rasio Ketergantungan	59
4.8	Jumlah Penduduk berdasarkan Status Kawin.....	61
4.9	Angka Perkawinan Kasar	63
4.10	Angka Perkawinan Umum	64
4.11	Proporsi Penduduk menurut Kelompok Umur dan Status Kawin	65
4.12	Rata-Rata Umur Kawin Pertama	67
4.13	Proporsi Penduduk menurut Kabupaten/Kota dan Status Kawin	68
4.14	Angka Perceraian Kasar	69
4.15	Angka Perceraian Umum	70
4.16	Jumlah Keluarga dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga	72
4.17	Hubungan dengan Kepala Keluarga.....	73
4.18	Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Umur	74
4.19	Kepala Keluarga menurut Jenis Kelamin	75
4.20	Kepala Keluarga berdasarkan Status Kawin	76
4.21	Kepala Keluarga berdasarkan Jenis Pendidikan	79
4.22	Kepala Keluarga berdasarkan Status Pekerjaan.....	80

4.23 Penduduk berdasarkan Jenis Pendidikan	82
4.24 Penduduk berdasarkan Jenis Pendidikan Kabupaten/Kota	84
4.25 Penduduk menurut Agama dan Jenis Kelamin.....	85
4.26 Penduduk menurut Agama Kabupaten/Kota	87
4.27 Penduduk menurut Disabilitas dan Jenis Kelamin.....	88
4.28 Jumlah Angka Kelahiran Umum	90
4.29 Jumlah Angka Kelahiran Kasar.....	91
4.30 Jumlah Angka Kematian Kasar.....	92
4.31 Jumlah Kelahiran dalam 1 Tahun	93
4.32 Jumlah Kematian Bayi menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023.....	94
4.33 Jumlah Kematian Neonatal menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023	95
4.34 Jumlah Kematian Post-Neonatal menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023.....	96
4.35 Jumlah Kematian Anak dan Balita menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023 ...	97
4.36 Jumlah Kematian Ibu Per Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.....	99
4.37 Angka Melek Huruf Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	100
4.38 Angka Partisipasi Kasar (APK) Per Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.....	101
4.39 Angka Partisipasi Murni (APM) Per Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.....	102
4.40 Rekapitulasi Jumlah Siswa Putus dan Lulus Tidak Melanjutkan di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.....	104

4.41 Jumlah Data Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	106
4.44 Rekapitulasi Data Populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2023	112
4.45 Rekap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Penyandang Disabilitas Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah menurut Ragam Disabilitas	113
4.46 Rekap Data Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	115
4.47 Rekapitulasi Pergerakan Migrasi Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	118
5.1 Jumlah dan Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	120
5.2 Jumlah dan Persentase Kepemilikan KTP-el	121
5.3 Jumlah dan Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	122
5.4 Jumlah dan Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Berdasarkan Jumlah Anak 0-17 Tahun	123
5.5 Kepemilikan Akta Perkawinan.....	124
5.6 Kepemilikan Akta Perceraian	126

DAFTAR GAMBAR

No.	Halaman
4.1	Piramida Penduduk Sulawesi Tengah..... 72

DAFTAR GRAFIK

No.	Halaman
4.1	Data Kependudukan Per Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Jenis Kelamin Semester II Tahun 2023 35
4.1.1	Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Kabupaten Banggai 36
4.1.2	Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Kabupaten Poso 37
4.1.3	Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Kabupaten Donggala 38
4.1.4	Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Kabupaten Toli-Toli..... 39
4.1.5	Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Kabupaten Buol 40
4.1.6	Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Kabupaten Morowali 41
4.1.7	Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Kabupaten Banggai Kepulauan42
4.1.8	Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Kabupaten Parigi Moutong 43
4.1.9	Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Kabupaten Tojo Una-Una 44
4.1.10	Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Kabupaten Sigi 45
4.1.11	Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Kabupaten Banggai Laut 46
4.1.12	Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Kabupaten Morowali Utara 47
4.1.13	Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Kota Palu 48
4.2	Data Kependudukan berdasarkan Status Perkawinan dan Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Tengah 77
4.3	Data Kependudukan berdasarkan Pendidikan Akhir dan Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Tengah 83
4.4	Data Kependudukan berdasarkan Agama dan Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Tengah 86
4.5	Data Kependudukan berdasarkan Disabilitas dan Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Tengah 89

DAFTAR DIAGRAM

No.	Halaman
4.1 Data Kependudukan berdasarkan Status Perkawinan dan Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Tengah	77
4.2 Data Kependudukan berdasarkan Pendidikan Akhir dan Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Tengah	83
4.3 Data Kependudukan berdasarkan Agama dan Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Tengah	86
4.4 Data Kependudukan berdasarkan Disabilitas dan Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Tengah	89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan yang ideal didasarkan pada kondisi atau keadaan penduduk di setiap daerahnya masing-masing. Hal ini dilakukan guna memberikan manfaat dan dapat dinikmati oleh seluruh penduduk, bukan oleh Sebagian atau golongan tertentu. Guna pembangunan dapat berjalan efisien dan tepat sasaran serta berkesinambungan untuk kesejahteraan penduduk, maka perlu dilakukan penyusunan perencanaan pembangunan yang baik.

Salah satu hal yang memegang peranan penting dalam tercapainya pembangunan di suatu wilayah adalah penduduk di wilayah itu sendiri. Selain itu aspek kependudukan juga berkaitan dengan masalah pembangunan, karena tujuan dari pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, ketersediaan informasi mengenai kependudukan sangatlah diperlukan untuk tercapainya tujuan pembangunan.

Isu kependudukan adalah isu yang sangat strategis dan bersifat lintas sektor. Oleh karena itu, keterkaitan berbagai aspek kependudukan dalam perencanaan pembangunan, akan menjadi pekerjaan besar yang harus diwujudkan. Dalam hal ini, upaya mewujudkan keterkaitan perkembangan kependudukan, sebagai wujud dinamika penduduk dengan berbagai kebijakan pembangunan menjadi prioritas penting agar kedepan nanti pengelolaan perkembangan kependudukan dapat mewujudkan keseimbangan yang serasi antara kuantitas dan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas penduduk dan penataan persebarannya yang didukung oleh upaya-upaya perlindungan dan pemberdayaan penduduk, peningkatan pemahaman serta pengetahuan tentang wawasan kependudukan bahkan sejak usia dini.

Pada saat ini diharapkan terjadi pergeseran paradigma yang mengedepankan pola pembangunan yang berwawasan kependudukan. Pembangunan yang demikian mengandung dua makna, pertama : pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada; kedua : pembangunan sumber daya manusia, yaitu

pembangunan yang lebih menekankan kualitas sumberdaya manusia dibandingkan peningkatan infrastruktur semata. Kedepan perencanaan pembangunan maupun implementasinya tidak dapat lagi mengabaikan peran penduduk sebagai objek maupun subjek atau agen pembangunan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.

Data kependudukan memegang peranan penting dalam menentukan kebijakan, baik perencanaan dalam pembangunan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan, baik bagi Pemerintah maupun pihak lain yang membutuhkan data kependudukan termasuk dunia usaha. Oleh karena itu ketersediaan data perkembangan kependudukan sampai tingkat lapangan menjadi faktor kunci keberhasilan pelaksanaan program-program kependudukan. Untuk itu pengembangan sistem informasi kependudukan yang bisa diakses dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan untuk tujuan intervensi yang berbeda-beda merupakan kebutuhan utama untuk segera diaplikasikan, sehingga makin lengkap dan akurat data kependudukan yang tersedia, maka akan semakin mudah dan tepat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dilaksanakan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, data kependudukan yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIKAD) dapat digunakan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintah dan pembangunan. Undang-undang ini menyatakan bahwa data kependudukan Kementerian Dalam Negeri merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan, yaitu pelayanan publik, alokasi anggaran, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, serta penegakkan hukum dan pencegahan kriminal.

Manfaat atau kegunaan mengetahui informasi data kependudukan tidak saja penting bagi Lembaga Pemerintah, juga penting untuk Lembaga-Lembaga Swasta. Berbagai perencanaan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah sangat erat kaitannya dengan informasi data kependudukan seperti perencanaan di bidang Pendidikan (kebutuhan guru dan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah). Misalnya jika

pemerintah akan membuat perencanaan di bidang Pendidikan seperti jumlah guru dan ruang kelas yang dibutuhkan dalam satu tahun tertentu, maka dibutuhkan data penduduk menurut kelompok umur dalam usia sekolah. Perencanaan di bidang perpajakan juga membutuhkan data kependudukan atau proyeksi data kependudukan yang diperoleh melalui informasi data kependudukan. Misalnya jika akan dibuat perencanaan di bidang fasilitasi kesehatan akan dibutuhkan data tentang kondisi mortalitas di daerah yang bersangkutan misalnya angka kematian di wilayah tersebut, angka kematian bayi, angka kematian anak, angka kematian kasar dan sebagainya. Perencanaan-perencanaan yang berhubungan dengan kemiliteran, kesejahteraan sosial, perumahan, pertanian dan perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang dan jasa, jalan, rumah sakit, pusat-pusat pertokoan, pusat-pusat rekreasi akan lebih tepat apabila kesemuanya didasarkan pada data kependudukan. Sangat bermanfaat bagi pengembangan indikator pembangunan misalnya trend penurunan fertilitas/angka kelahiran dapat menjadi bukti kemampuan pemerintah dan mitranya dalam program mengendalikan kelahiran semakin lengkap dan akurat data kependudukan yang dimiliki, maka makin mudah dan tepat perencanaan pembangunan yang dapat dilakukan oleh suatu daerah.

Hal ini menjadi dasar pentingnya penyajian data perkembangan kependudukan yang diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan. Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan ini bersumber dari data registrasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) serta data dari lintas sektor terkait. Data-data tersebut dilakukan pembersihan serta dikonsolidasikan yang dilakukan setiap tanggal 30 Juni (semester I) dan 31 Desember (semester II). Pada semester II Tahun 2023.

Berkenaan dengan Penyajian Data dan Informasi Perkembangan Kependudukan terutama untuk perencanaan pembangunan manusia, baik itu pembangunan ekonomi, sosial, politik, budaya, lingkungan dan lain-lain yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka data dan informasi perlu menggunakan data yang valid dan dapat dipercaya baik dari sisi jumlah maupun kualitas data dan dikemas secara

secara baik, sederhana, informatif dan tepat waktu dalam bentuk Buku Profil Perkembangan Kependudukan yang disajikan secara berkelanjutan.

1.2 TUJUAN

Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2023 bertujuan untuk :

1. Memberikan gambaran umum mengenai kondisi perkembangan kependudukan di Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2023;
2. Sebagai referensi dalam pengambilan kebijakan yang tepat dalam Pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Sebagai data dan informasi acuan Pemerintah Daerah dalam merumuskan dan Menyusun kebijakan Pembangunan berwawasan kependudukan dan evaluasi kebijakan dalam perencanaan program/kegiatan yang dipakai pada kalangan akademisi, pelaku bisnis dan peminat demografi.

1.3 RUANG LINGKUP

Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2023 mencakup gambaran umum di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah data kuantitatif yang berkaitan dengan pengembangan kualitas penduduk, mobilitas penduduk dan kepemilikan dokumen kependudukan.

1. Kuantitas penduduk meliputi :
 - a. Jumlah dan Persebaran Penduduk;
 - b. Penduduk menurut Karakteristik Demografi;
2. Kualitas penduduk meliputi :
 - a. Kesehatan;
 - b. Pendidikan;
 - c. Ekonomi;
 - d. Sosial;
3. Mobilitas penduduk memuat :
 - a. Mobilitas Permanen;
 - b. Mobilitas non Permanen;
 - c. Urbanisasi;

4. Kepemilikan Dokumen Kependudukan memuat :
 - a. Kepemilikan Kartu Keluarga;
 - b. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Kepemilikan Akta;
 - d. Kepemilikan Surat Keterangan Orang Terlantar;

1.4 PENGERTIAN UMUM/DAFTAR ISTILAH YANG DIGUNAKAN

1. **Penduduk** adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
2. **Kependudukan** adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat;
3. **Perkembangan kependudukan** adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
4. **Profil Perkembangan Kependudukan** adalah gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan (Permendagri Nomor 65 Tahun 2010);
5. **Data Kependudukan** adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
6. **Administrasi Kependudukan** adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dengan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hal lainnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);

7. **Kualitas penduduk** adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak;
8. **Kuantitas Penduduk** adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, pindah tempat tinggal;
9. **Data Kependudukan Bersih (DKB)** adalah data kependudukan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri setiap semester yang bersumber dari data kependudukan Kabupaten/Kota yang telah dikonsolidasikan atau dibersihkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;
10. **Proporsi penduduk** adalah jumlah dan informasi penduduk menurut pengelompokan tertentu seperti umur dan jenis kelamin;
11. **Warga Negara Indonesia (WNI)** adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia (Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013);
12. **Dokumen Kependudukan** adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013);
13. **Pendaftaran Penduduk** adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan (Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013);
14. **Peristiwa Kependudukan** adalah kejadian yang dialami oleh penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan

- Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan atau Surat Keterangan Kependudukan yang meliputi pindah datang, perubahan alamat, status tempat tinggal terbatas menjadi tinggal tetap (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
15. **Peristiwa Penting** adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
 16. **Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK**, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga (Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013);
 17. **Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el**, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana (UU No. 24 Tahun 2013);
 18. **Petugas Registrasi** adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan atau nama lainnya (UU No. 24 Tahun 2013);
 19. **Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)**, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan (Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013);
 20. **Kematian atau mortalitas** adalah hilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup;

21. **Kepadatan penduduk** adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah atau berapa banyaknya penduduk per kilometer persegi pada periode tertentu;
22. **Rasio Jenis Kelamin** adalah perbandingan antara perbandingan antara jumlah penduduk pria dan jumlah penduduk wanita pada suatu daerah dan pada waktu tertentu, yang biasa dinyatakan dalam banyaknya penduduk pria per 100 wanita;
23. **Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio)** adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja);
24. **Perkembangan Kependudukan** adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan (Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009);
25. **Mobilitas Penduduk** adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan melewati batas administrasi;
26. **Mobilitas Penduduk permanen (migrasi)** adalah perpindahan penduduk melewati batas administrasi suatu daerah dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administrative (migrasi/internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional);
27. **Penduduk usia kerja (produktif)** adalah penduduk yang berusia 15 tahun sampai dengan 64 tahun;
28. **Angka Migrasi Masuk** adalah banyaknya migran yang masuk ke Provinsi Sulawesi Tengah di setiap seribu penduduk dalam satu tahun;
29. **Angka Migrasi Keluar** adalah banyaknya migran yang keluar dari Provinsi Sulawesi Tengah di setiap seribu penduduk dalam satu tahun;

30. **Angka Migrasi Netto** adalah selisih banyaknya migran yang masuk dan keluar di setiap seribu penduduk dalam satu tahun di Provinsi Sulawesi Tengah;
31. **Penduduk yang termasuk Angkatan Kerja** adalah penduduk usia kerja (15 – 64 tahun) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha;
32. **Bekerja** adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh penduduk dan disampaikan penduduk sebagai pekerjaannya pada saat melaporkan biodatanya kepada petugas registrasi penduduk di Kelurahan;
33. **Angka Partisipasi Angkatan Kerja** adalah proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja;
34. **Sekolah** adalah kegiatan seseorang untuk bersekolah di sekolah formal, mulai dari Pendidikan dasar sampai dengan Pendidikan tertinggi, selama seminggu yang lalu sebelum pencacahan. Termasuk pula kegiatan dari mereka yang sedang libur sekolah;
35. **Mengurus Rumah Tangga** adalah kegiatan seseorang yang mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah, misalnya : ibu-ibu rumah tangga; Sebaliknya pembantu rumah tangga; Sebaliknya pembantu rumah tangga yang mendapat upah walaupun pekerjaannya mengurus rumah tangga dianggap bekerja;
36. **Kegiatan lainnya** adalah mereka yang melakukan suatu pekerjaan di luar jenis pekerjaan yang telah ditetapkan dalam SIAK;
37. **Pendidikan** adalah tingkat Pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah dengan mendapatkan tanda tamat (ijazah);
38. **Jenis Pekerjaan** adalah macam pekerjaan yang sedang dilakukan oleh penduduk, berdasarkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);

39. **Status Pekerjaan** adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan berdasarkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
40. **Angka Pengangguran** adalah proporsi jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja;
41. **Angka Kematian Kasar** adalah banyaknya kematian yang terjadi pada suatu tahun tertentu setiap 1000 penduduk;
42. **Pertumbuhan Penduduk** adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk di suatu wilayah, dimana pertumbuhan penduduk tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah dan migrasi netto;
43. **Angka Pertumbuhan Penduduk** adalah besaran persentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya;
44. **Rasio Jenis Kelamin** adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan;
45. **Piramida Penduduk** adalah gambar yang menunjukkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang disajikan secara grafik;
46. **Rasio Kepadatan Penduduk** adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah atau berapa banyaknya penduduk per kilometer persegi pada periode tertentu;
47. **Angka Perkawinan Kasar** adalah angka yang menunjukkan persentase penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan semester pada suatu semester tertentu;

48. **Angka Perkawinan Umum** adalah angka yang menunjukkan proporsi penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas pada suatu tahun tertentu;
49. **Angka Perceraian Kasar** adalah angka yang menunjukkan jumlah perceraian per 1000 penduduk terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan semester untuk suatu periode tertentu;
50. **Angka Perceraian Umum** adalah angka yang menunjukkan jumlah penduduk yang berstatus cerai hidup terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas (penduduk yang terkena resiko perceraian) pada suatu periode tertentu.
51. **Persebaran Penduduk** adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992);
52. **Kelahiran atau Fertilitas** yakni dapat diartikan sebagai kemampuan seorang wanita atau sekelompok wanita untuk melahirkan dalam waktu satu generasi atau selama masa subur;
53. **Lahir Hidup dan Lahir Mati**
- a. Lahir Hidup adalah suatu kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya didalam kandungan, dimana si bayi menunjukan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan, misalnya ada nafas, ada denyut jantung atau denyut tali pusar atau gerakan otot.
 - b. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan.
54. **Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*)** adalah rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita dalam masa reproduksi;

55. **Angka Kematian Bayi / IMR** adalah banyaknya kematian bayi usia kurang dari satu tahun (9-11 bulan) pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama;
56. **Angka Kematian Ibu/MMR** adalah banyaknya kematian ibu pada waktu hamil atau selama 24 hari sejak terminasi kehamilan per 1.000 kelahiran hidup, tanpa memandang lama dan tempat kelahiran yang disebabkan karena kehamilan atau komplikasi kehamilan dan kelahiran atau pengelolaannya;
57. **Penduduk Melek Huruf** adalah penduduk yang berusia 10 tahun keatas yang telah bebas dari tiga buta, yaitu buta aksara, buta Latin, dan buta angka, buta bahasa Indonesia dan buta pengalaman dasar;
58. **Angka Putus Sekolah** adalah persentase murid yang putus sekolah menurut jenjang pendidikan dari jumlah murid dijenjang yang sama;
59. **Angka Partisipasi Murni/APM** adalah presentase siswa dengan umur yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah di usia yang sama;
60. **Angka Partisipasi Kasar/APK** adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 LETAK GEOGRAFIS

Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah pada umumnya terletak pada ketinggian 0-1000 meter dari permukaan laut, dan hanya sekitar 1.693.226 hektar atau 26,59 persen terletak pada ketinggian di atas 1.000 meter dari permukaan laut. Kondisi fisik wilayah sebagian besar merupakan non budidaya karena faktor kemiringan lereng di atas 40 persen, dengan karakteristik fisik wilayah berupa bentangan pegunungan tinggi membentuk formasi berbaris dan melintang hingga menyentuh bibir pantai. Kondisi ini sangat rawan menimbulkan bencana erosi, sehingga disamping sebagai tantangan sekaligus ancaman dari sisi pelestarian lingkungan jika kita tidak arif dalam mengelolanya.

Analisis pada aspek geografi di Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Adapun, gambaran kondisi demografi memberikan gambaran terkait struktur, komposisi dan persebaran penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah dalam periode tahun tertentu

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki luas wilayah mencapai 61.605,718 Km² atau 6.160.571,8 Ha, dengan panjang garis pantai 6.653,31 Km², luas perairan 77.295,9 Km² dan jumlah pulau sebanyak 1.604 pulau. Provinsi Sulawesi Tengah memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar dan Provinsi Sulawesi Barat.

Tabel 2.1
Luas Wilayah dan Persentase Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah
Menurut Kabupaten/Kota

KODE	KABUPATEN/KOTA	IBU KOTA KABUPATEN	KETINGGIAN TEMPAT (Mdpl)	LUAS WILAYAH (Km ²)	PERSENTASE TERHADAP LUAS PROVINSI (%)
7201	KAB. BANGGAI	LUWUK	125	8.252,882	13.40
7202	KAB. POSO	POSO KOTA	18	7.545,930	12.25
7203	KAB. DONGGALA	BANAWA	35	5.126,586	8.32
7204	KAB. TOLITOLI	BAOLAN	8	3.700,369	6.01
7205	KAB. BUOL	BIAU	63	3.723,578	6.04
7206	KAB. MOROWALI	BUNGKU	3	4.486,891	7.28
7207	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	SALAKAN	104	2.385,073	3.87
7208	KAB. PARIGI MOUTONG	PARIGI	29	5.805,610	9.42
7209	KAB. TOJO UNA UNA	AMPANA	117	5.572,856	9.04
7210	KAB. SIGI	BORA	183	5.225,435	8.48
7211	KAB. BANGGAI LAUT	BANGGAI	24	688,151	1.12
7212	KAB. MOROWALI UTARA	KOLONODALE	50	8.736,006	14.18
7271	KOTA PALU	PALU	64	356,351	0.58
TOTAL				61.605,718	100

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100.1.1-6117, Tahun 2023

Secara administrasi, hingga saat ini Provinsi Sulawesi Tengah telah memiliki 12 Kabupaten dan 1 Kota, yaitu Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Banggai, Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Tojo Una-una, Kabupaten Sigi, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Banggai Laut dan Kota Palu, yang terdiri dari 176 Kecamatan, dan 2.020 Desa/Kelurahan.

Tabel 2.2
Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan Di Provinsi Sulawesi Tengah menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

KODE	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH		
		KECAMATAN	KELURAHAN	DESA
7201	KAB. BANGGAI	23	46	291
7202	KAB. POSO	19	28	142
7203	KAB. DONGGALA	16	9	158
7204	KAB. TOLI TOLI	10	6	103
7205	KAB. BUOL	11	7	108
7206	KAB. MOROWALI	9	7	126
7207	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	12	3	141
7208	KAB. PARIGI MOUTONG	23	5	278
7209	KAB. TOJO UNA UNA	12	12	134
7210	KAB. SIGI	15	0	176
7211	KAB. BANGGAI LAUT	7	3	63
7212	KAB. MOROWALI UTARA	10	3	122
7271	KOTA PALU	8	46	0
TOTAL		175	175	1.842

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100.1.1-6117, Tahun 2023

2.2 KONDISI DEMOGRAFIS DAERAH

Penduduk merupakan faktor penting dalam proses pembangunan karena bukan hanya berperan sebagai pelaksana pembangunan, namun juga menjadi sasaran pembangunan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk, pembangunan harus diarahkan pada pengendalian jumlah penduduk, peningkatan kualitas, serta penerahan mobilitas sehingga mempunyai ciri dan karakteristik yang bersinergi dengan tujuan pembangunan.

Berdasarkan jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah sejak periode 2019-2023 cenderung meningkat, yakni dari 2.977.347 (Dua juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh tujuh) jiwa pada Tahun 2019 menjadi 3.154.499 (Tiga juta serratus lima puluh empat ribu empat ratus Sembilan puluh sembilan) jiwa pada Tahun

2023. Sementara tingkat laju pertumbuhan penduduk dari 0,73 persen pada Tahun 2019 berhasil ditekan hingga menjadi 1,77 persen pada Tahun 2023. Sedangkan tingkat kepadatan penduduk cenderung meningkat sejak periode 2019 sampai dengan 2023 yakni dari 48 jiwa/km² pada Tahun 2019 menjadi 51 jiwa/km² pada Tahun 2023.

Tabel 2.3
Perkembangan Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Tingkat Kepadatan Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2023

NO	INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023
1	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	2.977.347	3.011.077	3.051.754	3.099.717	3.154.499
	LAKI-LAKI (JIWA)	1.530.803	1.546.449	1.566.691	1.590.279	1.618.453
	PEREMPUAN (JIWA)	1.446.544	1.464.628	1.485.063	1.509.438	1.536.046
2	LAJU PERTUMBUHAN (%)	0,73	1,13	1,35	1,57	1,77
3	TINGKAT KEPADATAN PENDUDUK	48	48	49	50	51

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2023)

2.2.1 Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju Pertumbuhan Penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat penambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial. Berdasarkan perhitungan data penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah tercatat rata-rata laju pertumbuhan penduduk dari 0.73 persen pada tahun 2019 terus mengalami peningkatan laju pertumbuhan penduduk sampai pada tahun 2023 menjadi 1,77 persen.

2.2.2 Tingkat Penyebaran Penduduk

Tingkat kepadatan untuk daerah-daerah yang wilayahnya luas dan sumberdaya alamnya potensial untuk dikembangkan sangat membutuhkan tenaga kerja dalam pengelolaannya. Dalam hal ini yang diperlukan adalah pemerataan jumlah penduduk, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian dalam proses pembangunan adalah beberapa masalah kependudukan antara lain persebaran dan kepadatan penduduk dalam suatu daerah.

Tingkat kepadatan penduduk Sulawesi Tengah cenderung meningkat sejak periode Tahun 2019-2023 yakni dari 48 jiwa/km² pada Tahun 2019 menjadi 51 jiwa/km² pada Tahun 2023. Kota Palu merupakan daerah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, sementara terendah di Kabupaten Morowali Utara.

2.3 GAMBARAN EKONOMI DAERAH

2.3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi Sulawesi Tengah pada tahun 2024 ditujukan untuk mengimplementasikan program dan kegiatan yang berfokus pada optimalisasi pengelolaan potensi daerah melalui peningkatan kerjasama antar daerah, menjamin kelancaran pola distribusi dan perluasan pasar bagi komoditas unggulan daerah, meningkatkan perluasan kesempatan kerja, mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat, menciptakan iklim kondusif bagi tumbuhnya usaha kecil menengah dan sektor informal serta mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber penerimaan daerah.

Kebijakan keuangan daerah dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas misi ke-3 RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 yaitu mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan. Misi ini dimaknai sebagai upaya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan ekonomi dan sosial, sehingga pendapatan dan daya beli masyarakat meningkat dan terhindar dari kerentanan sosial yang dihadapi masyarakat miskin dan

penyintas bencana alam dan sosial, sekaligus merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu, arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mewujudkan hasil dan manfaat dari program prioritas dan lintas bidang atau wilayah dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah serta berpedoman pada Prioritas dan Agenda Pembangunan Nasional.

Arah kebijakan nasional pada Tahun 2024 di bidang ekonomi masih ditujukan untuk kebijakan prioritas rencana kerja pembangunan yang sebagiannya adalah kelanjutan dari prioritas di tahun sebelumnya, seperti percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang ditargetkan sampai sebesar 0 persen, penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan *decent job*, mendorong pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas dan perwujudan ekonomi hijau dalam mencapai *net-zero emission* pada tahun 2060.

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal pada potensi sumberdaya alam yang dimiliki, agrowisata-maritim-forestry dan kondisi sosial ekonomi yang beranekaragam dan karakter fisik daerah unik yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan sumber-sumber pendapatan tersebut memerlukan strategi arah kebijakan ekonomi daerah yang tepat untuk menciptakan peluang peningkatan investasi, pendapatan daerah dan membuka lapangan kerja baru.

Arah kebijakan ekonomi daerah pada tahun 2024 lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan fiskal daerah baik untuk skala provinsi maupun untuk 3 (tiga) kabupaten yang masih tertinggal melalui pembangunan Kawasan Pangan Nusantara (KPN) atau Food Estate (FE), pembangunan ruas jalan dan jembatan prioritas, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), stimulus ekonomi bagi pelaku UMKM dan pelaku usaha, penurunan angka kemiskinan dan stunting serta tetap memperhatikan tindakan lanjutan penanganan covid-19 dan variannya serta keberlanjutan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah paska bencana 28 September 2018 yang diperkirakan akan tuntas selama 5 (lima) tahun semenjak peristiwa bencana, dan pada aspek yang lain secara paralel tetap berupaya mencapai target-target pembangunan ekonomi yang memasuki

masa tahun ke-3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Tengah periode 2021-2026.

Selain itu, kebijakan ekonomi daerah juga mengikuti kebijakan ekonomi nasional yang pada tahun 2024 diperkirakan akan lebih terkonsentrasi pada penurunan kemiskinan ekstrim dan peningkatan pendapatan masyarakat serta persiapan berjalannya roda pemerintahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Kondisi perekonomian dan keuangan tahun 2024 diperkirakan akan semakin membaik seiring dengan selesainya kasus pandemik covid-19 dan berubah status menjadi endemik cases dan peningkatan proses kekebalan (*immunity*) masyarakat seiring dengan keseluruhan tahapan vaksin selesai, sehingga pandemi tidak berlanjut lagi dan tidak menjadi risiko yang memperlambat pemulihan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 tetap kuat pada kisaran 4,5- 5,3%, dan akan terus meningkat menjadi 4,7-5,5% pada 2024 dengan didukung oleh konsumsi swasta, investasi, dan tetap positifnya kinerja ekspor di tengah pertumbuhan ekonomi global yang melambat. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) diperkirakan menurun dan kembali ke dalam sasaran $3,0 \pm 1\%$ pada 2023 dan $2,5 \pm 1\%$ pada 2024, dengan inflasi inti akan kembali lebih awal pada paruh pertama 2023, seiring dengan tetap terkendalinya inflasi harga impor (*imported inflation*) dengan nilai tukar Rupiah yang stabil dan respons kebijakan moneter yang *front loaded, pre-emptive, dan forward looking*. Koordinasi kebijakan yang erat dengan Pemerintah Pusat dan Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) berkontribusi kuat pada terkendalinya inflasi. Sinergi dan inovasi merupakan kunci dari prospek kinerja ekonomi Indonesia pada 2023 dan 2024 yang akan melanjutkan ketahanan dan kebangkitan ekonomi.

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah periodisasi 2021-2026 atau memasuki periodisasi akhir tahapan ke-4 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 yang fokus tema pembangunannya yaitu memantapkan kerjasama antar daerah dan sinergitas program dalam rangka optimalisasi pengelolaan sektor Unggulan Daerah dan percepatan pemerataan pembangunan berkelanjutan. Untuk mewujudkan tema

pembangunan tersebut, diperlukan kerja keras dan saling bersinergi antar perangkat daerah, pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan.

Dalam arahan kebijakan ekonomi Sulawesi Tengah, pemerintah daerah tetap menerapkan prinsip optimisme yang didasarkan pada indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun-tahun sebelumnya. Indikasinya dapat dilihat dari perkembangan makro ekonomi yang meliputi tingkat pertumbuhan ekonomi, andil sektor-sektor ekonomi sebagai pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik dari sisi produksi maupun pengeluaran, lapangan kerja, perkembangan nilai investasi dan struktur ekonomi daerah. Disamping itu untuk mengetahui kondisi stabilitas perekonomian daerah dilihat dari indikasi perkembangan laju inflasi.

Untuk mewujudkan visi dan misi pada periodisasi 2021-2026 yang disesuaikan dengan upaya penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) serta peningkatan produksi pangan melalui pembangunan KPN (Lampiran 1 Perpres No. 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024), Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan arah kebijakan ekonomi yang akan dilakukan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Kawasan Pangan Nusantara (KPN)/Food Estate dan Kawasan Ekonomi Khusus, membangkitkan UMKM, koperasi dan usaha mikro rakyat lainnya sebagai sumber penggerak utama pertumbuhan dengan menggali potensi unggulan daerah dalam upaya mendorong percepatan pertumbuhan kawasan produksi dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lainnya;
2. Mempersiapkan Sulawesi Tengah sebagai wilayah penyanggah Ibu Kota Baru (IKN) Nusantara yang berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Peran Sulawesi Tengah sebagai penyuplai bahan pangan dan olahan, material bangunan, SDM yang berpendidikan vokasi, air bersih dan hasil kerajinan tangan;
3. Perbaikan dan peningkatan pembangunan jaringan infrastruktur seperti : poros jalan Tambu-Kasimbar ± 30 km, poros jalan prioritas, jembatan, pelabuhan dan bandara untuk memberikan stimulasi tumbuhnya investasi dan konektivitas antar wilayah dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bersamaan dengan

- meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat;
4. Peningkatan nilai tambah (*add value*) sumberdaya alam hasil olahan pada industri hulu berbasis agro, maritim, hasil hutan, mineral dan migas untuk penguatan struktur industri melalui pembangunan industri hulu yang diintegrasikan dengan industri antara (bahan setengah jadi) dan industri hilirnya.
 5. Peningkatan distribusi pendapatan melalui peningkatan hasil produksi, nilai jual produk dan peluang pasar yang memicu percepatan pertumbuhan ekonomi di perdesaan dan penciptaan keseimbangan serta pemerataan pembangunan di setiap wilayah;
 6. Peningkatan investasi daerah untuk memperluas kesempatan kerja dan berusaha dengan penciptaan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha, baik skala usaha kecil, menengah maupun besar melalui penyediaan informasi potensi daerah, penyederhanaan perijinan dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu, membangun prasarana penunjang, melindungi kepastian hukum dan penyediaan tenaga kerja di daerah;
 7. Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim dengan memanfaatkan sumberdaya dan jasa kemaritiman, yaitu peningkatan produksi perikanan dan kelautan, pengembangan energi dan mineral dasar laut, pengembangan kawasan wisata bahari, kemampuan industri maritim dan perkapalan serta membangun transportasi laut antar pulau yang memadai.
 8. Mengurangi kesenjangan atau disparitas pembangunan antar wilayah melalui peningkatan aksesibilitas dan jalur distribusi barang dan jasa ke berbagai wilayah sehingga dapat menekan laju inflasi serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dalam rangka peningkatan kapasitas fiskal daerah.
 9. Mengalokasikan program dan kegiatan prioritas penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan tingkat pengangguran terbuka, mengurangi disparitas wilayah, peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui penambahan dan pembangunan sarana/prasarana pelayanan rumah sakit.

Arah kebijakan ekonomi daerah akan tertuang di dalam strategi pengembangan ekonomi yang menjadi keinginan kuat pemerintah daerah dan masyarakat untuk ikut serta membentuk tatanan ekonomi daerah yang diinginkan. Arah kebijakan ekonomi daerah diharapkan dapat menjadi arahan untuk menghasilkan penyelesaian permasalahan selama proses perencanaan pembangunan terhadap isu-isu ekonomi daerah. Selain itu, dapat menjadi bahan perbaikan dari kebijakan-kebijakan yang lalu untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik.

2.3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Penyusunan RKPD Tahun 2024 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program dengan memastikan program yang memiliki manfaat dan bukan hanya merupakan tugas fungsi perangkat daerah yang bersangkutan, namun dapat dikolaborasikan antar perangkat daerah terkait. Berkaitan dengan itu, maka pencapaian prioritas pembangunan memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas daerah, program prioritas dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan, dengan melakukan pemenuhan capaian target prioritas antara pusat dan daerah dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah secara spesifik. RKPD Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dengan fokus antara lain kepada percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, peningkatan kualitas SDM Pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran melalui penyediaan lapangan usaha, mendorong pemulihan dunia usaha, serta persiapan Sulawesi Tengah sebagai salah satu daerah penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN).

2.4 POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH

2.4.1 Pertanian

Berdasarkan data Rancangan Akhir RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2042 luas potensi lahan Pertanian seluas 672.795 Ha, lahan ini masih dapat diperluas dengan memanfaatkan kawasan hutan konversi seluas 297.859,78 Ha,

sehingga potensi keseluruhan pertanian adalah 942.206 Ha. Pengembangan Potensi Pertanian dibagi atas dua bagian, yaitu: (1) Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah (TPLB); (2) Pertanian Tanaman Pangan Lahan Kering (TPLK).

Untuk lahan basah; pengembangan kawasan pertanian diarahkan pada kawasan yang sesuai untuk penanaman tanaman pangan. Lahan basah yang mempunyai sistem atau potensi pengembangan prasarana pengairan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti; ketinggian kawasan di bawah 1000 m, kelerengan kawasan di bawah 40% dan kedalaman efektif lapisan tanah di atas 30 cm.

Untuk Lahan Kering; lebih diarahkan pada areal yang tidak mempunyai sistem dan atau potensi pengembangan pengairan/irigasi dengan mempertimbangkan faktor-faktor; ketinggian kawasan di bawah 1000 m, kelerengan kawasan di bawah 40% dan kedalaman efektif lapisan tanah di atas 30 cm. Saat ini Provinsi Sulawesi Tengah telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dengan rincian sebagai berikut:

- Untuk Lahan Sawah Irigasi dan Tadah Hujan seluas 168.250 Ha yang pengelolaannya lebih diarahkan pada pola tanam satu kali seluas 12.630 Ha, tanam dua kali seluas 124.713 Ha, tanam tiga kali seluas 6.132 Ha, tidak tanam padi seluas 3.689 Ha, tidak diusahakan atau bero seluas 21.086 Ha.
- Untuk lahan kering yang terdiri dari tegalan atau kebun seluas 577.490 Ha dan ladang atau huma seluas 241.220 Ha. Selanjutnya total luas lahan pertanian di Provinsi Sulawesi Tengah yang diarahkan untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 266.552 Ha yang terdiri masing-masing Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 119.702 Ha dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) seluas 146.850 Ha. Ketersediaan lahan ini diharapkan dapat mempertahankan ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Tengah melalui Program Sawah Lestari.

Jenis pertanian tanaman pangan di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 memiliki luas panen 173.238,56 ha, menurun jika dibandingkan pada tahun 2021 memiliki luas panen 182.186,62 ha, sedangkan jumlah produktivitas pada tahun 2021 seluas 47,59 ku/ha, tahun 2022 menurun menjadi 44,54 ku/ha, sementara pada tahun 2021

produksi 867.012,77 ton, sehingga mengakibatkan juga penurunan produksi 771.524,90 ton, pada tahun 2022, ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.4
Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 dan 2022

KODE	KABUPATEN/KOTA	Luas Panen(Ha)		Produktivitas (ku/ha)		Produksi 1 (ton)	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
7201	BANGGAIKEPULAUAN	500,8	300,38	37,54	35,39	1 880,25	1 062,91
7202	BANGGAIKEPULAUAN	37 693,72	36 492,33	43,46	41,58	163 827,06	151 749,59
7203	MOROWALI	8 796,41	8 650,50	50,7	45,67	44 595,26	39 507,32
7204	POSO	23 467,61	19 783,01	43,14	42,07	101 237,39	83 220,45
7205	DONGGALA	12 968,68	12 522,24	46,64	45,3	60 479,93	56 721,23
7206	TOLITOLI	13 420,95	13 367,92	47,54	42,99	63 800,78	57 473,78
7207	BUOL	6 332,70	4 629,12	41,43	37,12	26 235,29	17 181,24
7208	PARIGI MOUTONG	53 003,31	52 611,40	52,7	47,52	279 343,58	249 993,38
7209	TOJO UNA-UNA	1 283,08	1 294,66	40,79	42,03	5 233,28	5 441,37
7210	SIGI	17 228,69	16 756,98	50,55	47,86	87 082,49	80 204,44
7211	BANGGAILAUT	-	-	-	-	-	-
7212	MOROWALIUTARA	7 323,50	6 648,10	44,42	42,33	32 533,18	28 143,41
7271	PALU	167,17	181,92	45,72	45,39	764,28	825,78
TOTAL		182 186,62	173 238,56	47,59	44,54	867 012,77	771 524,90

Sumber : Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, (BPS, Tahun 2023)

a. Hortikultura

Pencapaian produksi pertanian hortikultura bagi penduduk Sulawesi Tengah utamanya bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabe rawit, Kubis, Kangkung, Petsai dan tomat masih dipenuhi dari produksi sendiri, dan hanya beberapa komoditi dari daerah lain sebagai tambahan, areal yang tersedia untuk penanaman kedelapan jenis komoditi tersebut yakni pada tahun 2022 memiliki areal seluas 10.309 Ha, dan yang terluas yaitu 3.452 ha untuk areal penanaman cabe rawit namun menurun jika dibandingkan pada tahun 2021 yaitu 3.874 Ha, sedangkan areal yang jenis komoditi paling sedikit adalah Bawang Putih yaitu seluas 18 Ha.

b. Perkebunan

Kawasan atau areal Perkebunan Tanaman Tahunan/Perkebunan diarahkan pada areal tanaman tahunan/perkebunan pada tahun 2022 dengan potensi perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah seluas 798.501,18 Ha, dengan 15 potensi komoditi.

c. Peternakan

Pengembangan kawasan peternakan umumnya berada pada kondisi lingkungan dengan ketinggian di bawah 1.000 meter, kelerengan di bawah 1.000 meter dan jenis tanah dan iklim yang sesuai untuk padang rumput alamiah. Pemanfaatan kawasan secara optimal seluas 130.955,5 Ha, sedangkan potensi areal peternakan yang sudah dimanfaatkan seluas 120.955,5 Ha.

d. Perikanan

Potensi perairan Provinsi Sulawesi Tengah seluas 77.295,9 Km², memiliki berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya, terbagi dalam 3 (tiga) zona yaitu (1) Selat Makasar dan Laut Sulawesi (sebesar 929.700 ton), (2) Teluk Tomini (sebesar 595.620 ton), (3) Teluk Tolo (sebesar 68.456 ton). Potensi sumberdaya ikan diperairan tersebut kurang lebih sebanyak 330.000 ton per tahun. Sedangkan ikan yang bisa dikelola secara lestari sekitar 214.000 ton per tahun. Di Teluk Tolo terdapat 68.000 ton per tahun, Teluk Tomini 78.000 ton per tahun, Selat Makasar dan Laut Sulawesi 68.000 ton per tahun. Dari potensi ikan lestari tersebut jumlah ikan yang dapat ditangkap sebesar 217.280 ton per tahun.

e. Industri

Pengembangan kawasan industri mempunyai persyaratan lokasi industri sesuai dengan hasil studi kelayakan. Rencana pemanfaatan kawasan industri diarahkan pada lokasi yang teridentifikasi memiliki potensi sumber daya alam. Pengembangan kawasan diarahkan pula pada lokasi yang mempunyai daya dukung sarana dan prasarana.

Untuk pengembangan industri Provinsi Sulawesi Tengah ke depan diarahkan pada pengolahan barang manufaktur dan agroindustri yang mengandalkan kegiatan produksi yang dilakukan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kota Palu dan industri pengolahan tambang pada Kawasan Industri Morowali (KI-Morowali) serta Industri Gas Bumi di Kabupaten Banggai.

f. Pariwisata

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki potensi wisata yang cukup untuk dikembangkan menjadi obyek dan atraksi wisata bahari, wisata alam dan wisata budaya. Potensi pariwisata dapat dikembangkan atas dasar nilai budaya yang sudah ada dalam masyarakat, nilai adat istiadat dan agama yang dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat.

Adapun Potensi dan obyek pariwisata yang dapat dikembangkan di Sulawesi Tengah adalah:

- **Kabupaten Banggai Kepulauan** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Pulau Makaliu (pulau Tikus), Pulau Lambangan Pouno, Pulau Tolobundu, Pulau Bandang Besar dan Kecil, Pulau Lesampuang, Pulau Delopo, Pantai Pasir Putih, Pulau Kembangan, dan Pulau Kokungan;
- **Kabupaten Buol** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Taman Wisata Alam Kumaligon, Goa Kolera, Pantai Kamaligon, Air Terjun Talokan, Sumber Air Panas, Air Terjun Pinamula, Rumah Adat Buol, Pantai Pelepas Rindu Hulubalang, Pantai Batu Susun, Pemandian Alam Tirtaria, Rumah Raja Buol, Pulau Ringgit/Pulau Lamari, Pulau Lesman, Pulau Boki, Pulau Busak, Pulau Raja, Gunung Pogogul, Pulau Panjang;
- **Kabupaten Donggala** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Pantai Batusuya, Taman Rekreasi Umum Loly Indah, Teluk Telengano, Pusentasi, Pantai Boneoge, Toravega Cottage, Pantai Enu, Tanjung Karang, Harmony Cottage, Golden park Cottage, Lokasi Berkemah/Camping Ground, Pulau Pasoso.
- **Kabupaten Morowali – Morowali Utara** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Cagar Alam Morowali, Pemancingan Putri Malu, Air Terjun Mempueno, Sumber Air Panas One Pute, Teluk Tomori, Pulau Rumbia, Batu Payung, Tebing Toppohulu, Batu Putih, Pulau Ulu, Pengia, Taman Laut Kaleroang, Menui Kepulauan, Benteng Fafontofure, Mesjid Tua Bungku, Budaya Masyarakat Wana, Istana Bungku, Rumah Controleur/Pengawas, Kubur Raja Marunduh, Situs Istana Raja Mori, dan Bangunan Bersejarah;

- **Kabupaten Parigi Moutong** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Pulau Kelelawar, Tanjung Makakata, Situs Rumah Raja Moutong, Rumah Klerek, Air terjun dan Tebing Likunggavali, Pantai Bambalemo, Pantai Indah Bomba Kaili, Habitat Burung Maleo, Perkebunan Ebony, Pantai Junayasa, Pantai Prajurit Posona, Benda Cagar Budaya, Situs Tanalanto, Makam Raja Torikota, Makam Raja Maruf(Magau Janggo), Makam Magau Langi Maili, Makam Magau Nguni Pasolembe, Makam Magau Tagunu, Pantai Tumpapa;
- **Kabupaten Poso** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Pantai Seribu Bintang, Pantai wisata Tamongajo, Lembah Napu, Besoa dan Bada, Situs Rumah Adat Tambi, Megalith, Situs Suso, Situs Sepe, Situs Tadulako, Situs Megalith Pokekea, Situs Lempe, Deas Wuasa, Situs Padang Padali, Situs Megalith Tamadue, Situs Watulumu, Situs Watutau, Situs Megalith Betue, Situs Mungku Padampaa, Situs Watunongko, Danau Poso, Watubaula, Goa Tangkaboba, Pantai Tandolala, Siuri Cottage, Taman Anggrek Bancea, Padamariri, Goa Pamona;
- **Kabupaten Tolitoli** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Gua Pompeile, Air Terjun Kolasi, Air Panas Tanigi, Bendungan Kolondom, Tanjung Matop, Air Terjun Sigelang, Pulau Lutungan, Pantai Tende Sabang, Tanjung Simuntu, Pantai Lalos, Pantai Bajugan, Rumah Adat Etnis Tolitoli.
- **Kabupaten Tojo Una-una** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Kepulauan Togean, Air Terjun Tolibaz, Pantai Tipae, Pantai Pasir Putih Matakko, Pemandian Malatong, Air Panas Marowo, Pulau Pangempa, Tanjung Api, Sungai Bongka, Pantai Capatana, Pulau Kabalutan, Pulau Malenge, Jembatan Bakau, Pulau Bolilanga, Pulau Taipi, Pulau Unauna, Tanjung Keramat, Pulau Kadidiri;
- **Kabupaten Banggai** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu: Air Panas Uwedaka, Permandian Salodik, Danau Makapa, Air Terjun Hanga-Hanga, Permandian Sandakan, Permandian Dondo, Air Terjun Nambo, Permandian Ampata, Gua Wira, Permandian Kilo Lima, Teluk Lalong, Pantai Pandaan Wangi, Pulau Dua, Pulau Poat, Boli Cotage Cafe, Gereja Tua Simpangan, Situs Totonga Bola Matindok;

- **Kota Palu** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu: Niki Beach, Museum Negeri Sulawesi Tengah, Souraja atau Banua Oge, Kolam Renang Milenium, Lokasi MTQ Jabal Nur, Taman Ria, Dayo mpoluku, Teluk Palu, Makam Dato Karama, Kerajinan Tangan dan Makanan Khas Daerah, Makam Pue Njidi, Kolam Renang Graha Tirta, Pantai Taipa, Jazz Hotel dan Recreation Zone, Pantai Talise, Bumi Roviga, dan Cagar Alam Poboya.
- **Kabupaten Sigi** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Situs Bangga, Camping Ground Paneki, Matantimali, Pemandaian Uwelera Porame, Porame Paradise, Mantikole, Taman Wisata Kapopo, Air Terjun Wera, Desa Dombu, Desa Toro, Lobo, Air Terjun Pawelua, Air Panas Bora, Gampiri, Kulit Kayu, Habitat Burung Maleo, Desa Pakuli, Danau Lindu, Sungai Lariang, Lembah Pipikoro, Air Terjun Tamunggu Indah.

g. Pertambangan

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki potensi sumberdaya alam yang melimpah, antara lain terdapat potensi bahan galian dan mineral, serta potensi gas dan minyak bumi. Potensi minyak bumi yang terdapat di Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali terdapat di lapangan Minyak Tiaka Blok Trili yang terletak 17 mil dari garis pantai. Cadangan minyak di lapangan Tiaka sebesar 106,56 Million Barrel Oil/juta Barrel minyak (MMBO). Sedangkan potensi minyak bumi yang terdapat di Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai memiliki kapasitas 16,5-23 juta barrel per tahun dengan total kapasitas produksi 6.500 Barrel (BOPD) yang diperoleh dari enam sumur, dan produksi rata-rata setiap sumur yaitu 1.100 BOPD. Disamping itu, Kabupaten Banggai juga memiliki potensi gas alam cair yang terdapat di Donggi- Senoro dengan perkiraan cadangan sebesar 20-28 trilyun kaki kubik (tcf), jumlah kandungan gas di ladang-ladang Donggi-Senoro besarnya dua kali lipat dibandingkan sisa kandungan yang terdapat di ladang gas alam Arun di Aceh yang jumlahnya mencapai 14 tcf.

Selain potensi minyak bumi dan gas alam tersebut, Sulawesi Tengah juga memiliki potensi pertambangan. Potensi emas di Sulawesi Tengah terdapat di Kota Palu (Kecamatan Mantikulore dan Palu Utara), dengan luas wilayah tambang 561.050 Ha, Kabupaten Parigi Moutong (Kecamatan Parigi dan Moutong) dengan luas wilayah tambang 46.400 Ha, Kabupaten Buol (Kecamatan Paleleh, Bunobogu, Dondo)

dengan luas wilayah tambang 746.400 Ha, Kabupaten Poso (Kecamatan Lore Utara) dengan luas wilayah tambang 19.180 Ha, dan Kabupaten Sigi (Kecamatan Sigi Biromaru) dengan luas wilayah tambang 228.700 Ha.

Selain hal tersebut di atas, Sulawesi Tengah juga memiliki potensi sumberdaya energi yang terbarukan dan tidak terbarukan, yaitu antara lain:

Gas Bumi : 9,6 triliun kaki kubik

- Panas Bumi: 378 mWe
- Sumber Energi Terbarukan:
 - ❑ Air : 1.001,980 MW
 - ❑ Matahari : 5.512 kWh/m²
 - ❑ Angin : 2 – 5 m/s
 - ❑ Biogas : 19.026 kW
- Luas Lahan Kritis Untuk Budi Daya Tanaman Jarak Pagar (Biofuel) : 260.070 ha.

Potensi energi air di Sulawesi Tengah cukup banyak baik skala besar (PLTA), menengah (PLTM) maupun skala kecil (PLTMH). Salah satu potensi tenaga air skala besar yang ada di Sulawesi Tengah adalah potensi tenaga air sungai Sulewana yang memiliki 3 titik potensi yaitu PLTA Poso-1, PLTA Poso-2 dan PLTA Poso-3. PLTA Poso 2 telah beroperasi sejak Tahun 2012 dengan Kapasitas 3x65 MW, sementara PLTA Poso-1 dengan kapasitas 4x30 MW dan PLTA Poso-3 dengan kapasitas 4x50 MW. Ketiga pembangkit tersebut direncanakan sebagai pembangkit Peaker dengan total kapasitas 515 MW.

Potensi energi air skala besar yang sedang dalam proses perizinan adalah PLTA Gumbasa dengan kapasitas 45 MW yang akan dikerjakan oleh PT. Gumbasa Energy. Potensi tenaga air skala (mini) yang sedang dibangun adalah PLTM Tomini - 2 dengan kapasitas 2 x1 MW oleh Pikitring Sulmapa dengan kemajuan pembangunan sudah mencapai 78,48 %. Potensi tenaga air di Provinsi Sulawesi Tengah masih banyak yang belum dimanfaatkan terutama potensi skala menengah (PLTM) dan kecil (PLTMH).

Sementara untuk potensi Panas Bumi terdapat di beberapa titik yang tersebar di Kabupaten Poso dan Donggala dengan potensi berkisar antara 20-40 Mwe. Sulawesi Tengah mempunyai intensitas sinar matahari cukup tinggi karena dilalui garis

khatulistiwa. Penyinaran sinar matahari rata-rata 64 – 78 %, yang dapat dikembangkan sebagai sumber energi alternative dengan memanfaatkan *Solar Home System* (SHS) khususnya di daerah pedesaan dan pulau-pulau kecil yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik PLN.

Secara geografis kedudukan Sulawesi Tengah mempunyai garis pantai yang panjang kurang lebih 4.013 km, hal ini merupakan potensi energi yang dapat dimanfaatkan baik untuk pembangkit listrik maupun untuk tenaga penggerak bagi mesin-mesin tertentu. Kecepatan rata-rata angin di Sulawesi Tengah setiap bulannya berkisar antara 2–5 m/s.

BAB III

SUMBER DATA

Berdasarkan tipenya, sumber data kependudukan dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah segala catatan asli atau data yang diperoleh secara langsung. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang telah diolah dan disajikan baik dalam buku teks, laporan penelitian, maupun karya tulis ilmiah yang telah diterbitkan secara periodik. Dalam penyusunan buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 ini sumber data diperoleh dari :

3.1 Registrasi

Registrasi penduduk merupakan suatu sistem registasi yang dilakukan oleh petugas pemerintah Kabupaten/Kota yang meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan tempat tinggal dan perubahan pekerjaan. Data ini berasal dari server aplikasi Sistem Informasi Kependudukan (SIAK) yang terdapat pada masing-masing Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Tengah. Data Sistem Informasi Kependudukan (SIAK) yang diperoleh berdasarkan dari kegiatan pelayanan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sepanjang tahun 2023.

3.2 Non Registrasi

Data Non Registrasi ialah data yang bersumber dari buku-buku, majalah, jurnal, artikel, literatur, maupun situs-situs internet yang berkaitan dengan penyusunan buku profil perkembangan kependudukan.

3.2.1 Data Lintas Sektor

Data lintas sektor merupakan data yang diperoleh dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah yang relevan dan related dengan kondisi penduduk sesuai dengan obyek tugas pokok dan fungsinya. Data lintas sektor yang berkaitan dengan penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan adalah data kualitas penduduk yakni berupa kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial.

BAB IV

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

Provinsi Sulawesi Tengah adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Tengah Pulau Sulawesi. Sulawesi Tengah terletak di Pulau Sulawesi dan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Utara di sebelah Utara, Provinsi Gorontalo di sebelah utara-timur, Provinsi Sulawesi Barat di sebelah barat, Provinsi Sulawesi Selatan di sebelah Selatan dan Teluk Tomini di sebelah timur.

Sulawesi Tengah adalah rumah bagi beragam kelompok suku. Beberapa suku di Provinsi ini meliputi Suku Kaili, Suku Banggai, Suku Tolaki, Suku Pamona, Suku Morowali dan Suku Banggai. Masing-masing suku ini memiliki bahasa dan budaya mereka sendiri. Bahasa yang digunakan bervariasi tergantung pada suku dan wilayah. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang digunakan dalam administrasi dan Pendidikan. Selain itu, bahasa-bahasa daerah seperti Bahasa Kaili, Bahasa Saluan, dan Bahasa Pamona juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Adat dan budaya memainkan peran penting dalam kehidupan Masyarakat di Sulawesi Tengah. Setiap suku memiliki adat istiadat dan tradisi budaya mereka sendiri, termasuk upacara-upacara adat, tarian dan musik tradisional. Di beberapa daerah, terdapat rumah adat atau bangunan-bangunan tradisional yang digunakan untuk upacara adat dan pertemuan Masyarakat. Tarian-tarian seperti “Tari Ruru” dan “Tari Kabasaran” adalah contoh dari seni tari tradisional di Provinsi ini. Agama memainkan peran penting dalam budaya Sulawesi Tengah. Mayoritas penduduknya menganut agama Islam, meskipun terdapat juga komunitas Kristen, Hindu dan Agama-agama lainnya. Makanan tradisional di Provinsi ini mencakup hidangan-hidangan seperti “nasikuning” (nasi kuning khas Sulawesi). “kapurung” (sejenis sup ikan) dan hidangan laut yang khas di daerah pesisir. Sulawesi Tengah adalah Provinsi yang kaya akan keanekaragaman budaya dan alam. Budaya yang beragam dan keragaman etnis membuat Provinsi ini menarik bagi wisatawan yang ingin menjelajahi berbagai aspek kehidupan dan budaya di Pulau Sulawesi.

4.1 JUMLAH DAN PERSEBARAN PENDUDUK

4.1.1 Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Jenis Kelamin Kabupaten/Kota

Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Hal ini terlihat dari data jumlah penduduk warga Negara Indonesia (WNI) Provinsi Sulawesi Tengah pada tabel 4.1. Penduduk ini tersebar di 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota. Jika diperhatikan nampak bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Jumlah penduduk di setiap Kabupaten/Kota dapat dilihat persebarannya pada tabel dibawah ini.

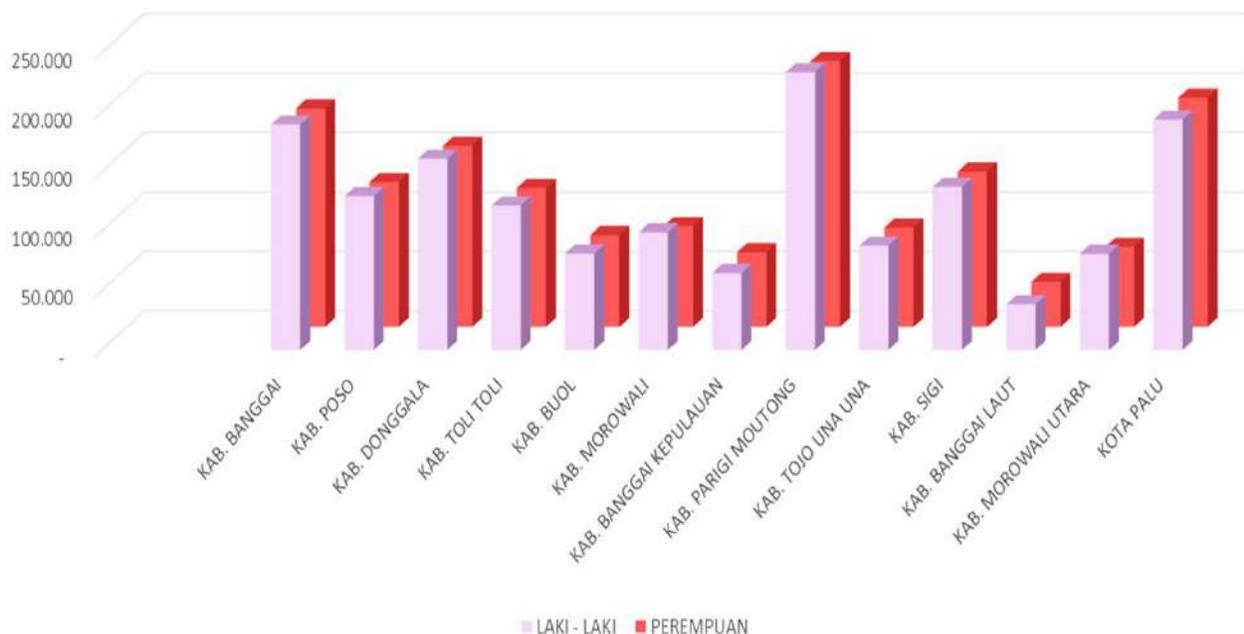
Tabel 4.1
Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin,
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

KODE	KABUPATEN/KOTA	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		L + P	
		n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
7201	KAB. BANGGAI	189.595	11.71	183.741	11.96	373.336	11.84
7202	KAB. POSO	129.487	8.00	121.986	7.94	251.473	7.97
7203	KAB. DONGGALA	161.065	9.95	152.417	9.92	313.482	9.94
7204	KAB. TOLITOLI	121.534	7.51	116.863	7.61	238.397	7.56
7205	KAB. BUOL	81.117	5.01	77.304	5.03	158.421	5.02
7206	KAB. MOROWALI	99.072	6.12	84.885	5.53	183.957	5.83
7207	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	64.846	4.01	62.988	4.10	127.834	4.05
7208	KAB. PARIGI MOUTONG	233.529	14.43	223.502	14.55	457.031	14.49
7209	KAB. TOJO UNA UNA	87.779	5.42	83.561	5.44	171.340	5.43
7210	KAB. SIGI	137.113	8.47	130.685	8.51	267.798	8.49
7211	KAB. BANGGAI LAUT	38.620	2.39	37.981	2.47	76.601	2.43
7212	KAB. MOROWALI UTARA	80.981	5.00	67.293	4.38	148.274	4.70
7271	KOTA PALU	193.715	11.97	192.840	12.55	386.555	12.25
TOTAL		1.618.453	100	1.536.046	100	3.154.499	100

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2023)

Pada tabel 4.1 diatas menjelaskan bahwa jumlah penduduk terbanyak tersebar pada Kabupaten Parigi Moutong dengan jumlah penduduk 457.031 (Empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga puluh satu) jiwa diikuti dengan Kota Palu dengan jumlah penduduk sebesar 386.555 (Tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima) jiwa dan Kabupaten Banggai dengan jumlah penduduk sebesar 373.336 (Tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh enam) jiwa. Kondisi ini menunjukkan Kabupaten terpadat berada pada Kabupaten Parigi Moutong sedangkan jumlah penduduk terkecil terletak di Kabupaten Banggai Laut dengan jumlah penduduk sebesar 76.601 (Tujuh puluh enam ribu enam ratus satu) jiwa diikuti Kabupaten Banggai Kepulauan dengan jumlah penduduk sebanyak 127.834 (Seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat) jiwa dan Kabupaten Morowali Utara dengan jumlah penduduk sebanyak 148.274 (Seratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh empat) jiwa.

GRAFIK 4.1
DATA KEPENDUDUKAN PER KABUPATEN / KOTA SE PROVINSI SULAWESI
TENGAH BERDASARKAN JENIS KELAMIN SEMESTER II TAHUN 2023

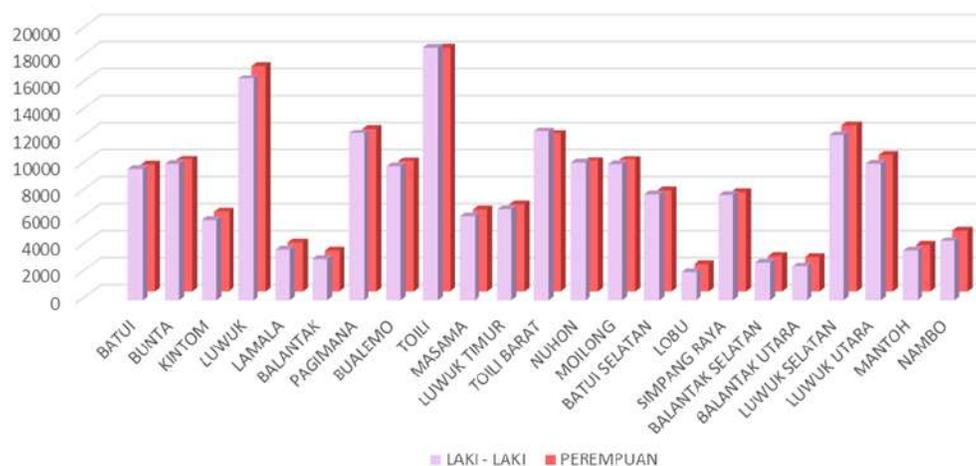


Tabel 4.1.1
Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Kabupaten Banggai

KODE	KECAMATAN	JUMLAH KEL / DESA	LAKI - LAKI (JWA)	PEREMPUAN (JWA)	JUMLAH (JWA)
72.01.01	BATUI	13	9.733	9.341	19.074
72.01.02	BUNTA	22	10.098	9.761	19.859
72.01.03	KINTOM	14	5.939	5.928	11.867
72.01.04	LUWUK	10	16.430	16.667	33.097
72.01.05	LAMALA	12	3.772	3.571	7.343
72.01.06	BALANTAK	13	3.097	2.998	6.095
72.01.07	PAGIMANA	33	12.395	12.038	24.433
72.01.08	BUALEMO	20	9.933	9.612	19.545
72.01.09	TOILI	25	18.761	18.061	36.822
72.01.10	MASAMA	14	6.214	6.079	12.293
72.01.11	LUWUK TIMUR	13	6.800	6.437	13.237
72.01.12	TOILI BARAT	17	12.563	11.666	24.229
72.01.13	NUHON	20	10.190	9.626	19.816
72.01.14	MOILONG	16	10.074	9.752	19.826
72.01.15	BATUI SELATAN	10	7.855	7.430	15.285
72.01.16	LOBU	10	2.089	2.035	4.124
72.01.17	SIMPANG RAYA	12	7.810	7.298	15.108
72.01.18	BALANTAK SELATAN	11	2.844	2.610	5.454
72.01.19	BALANTAK UTARA	10	2.560	2.539	5.099
72.01.20	LUWUK SELATAN	10	12.228	12.299	24.527
72.01.21	LUWUK UTARA	11	10.114	10.112	20.226
72.01.22	MANTOH	10	3.696	3.394	7.090
72.01.23	NAMBO	11	4.400	4.487	8.887
	TOTAL	337	189.595	183.741	373.336

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2023)

Grafik 4.1.1
Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Kabupaten Banggai

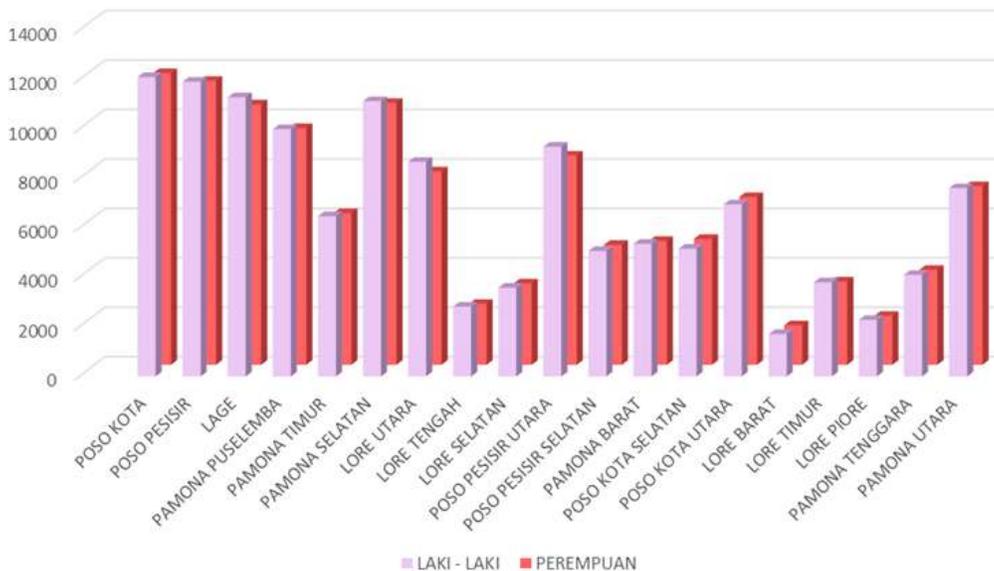


Tabel 4.1.2
Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Kabupaten Poso

KODE	KECAMATAN	JUMLAH KEL / DESA	LAKI - LAKI (JWA)	PEREMPUAN (JWA)	JUMLAH (JWA)
72.02.01	POSO KOTA	7	12.114	11.799	23.913
72.02.02	POSO PESISIR	16	11.926	11.491	23.417
72.02.03	LAGE	16	11.295	10.539	21.834
72.02.04	PAMONA PUSELEMBE	11	10.005	9.576	19.581
72.02.05	PAMONA TIMUR	13	6.482	6.136	12.618
72.02.06	PAMONA SELATAN	12	11.140	10.599	21.739
72.02.07	LORE UTARA	7	8.682	7.827	16.509
72.02.08	LORE TENGAH	8	2.826	2.465	5.291
72.02.09	LORE SELATAN	8	3.592	3.297	6.889
72.02.18	POSO PESISIR UTARA	10	9.298	8.468	17.766
72.02.19	POSO PESISIR SELATAN	9	5.077	4.853	9.930
72.02.20	PAMONA BARAT	6	5.366	5.013	10.379
72.02.21	POSO KOTA SELATAN	5	5.169	5.096	10.265
72.02.22	POSO KOTA UTARA	7	6.960	6.789	13.749
72.02.23	LORE BARAT	6	1.720	1.603	3.323
72.02.24	LORE TIMUR	5	3.810	3.369	7.179
72.02.25	LORE PIORE	5	2.290	1.986	4.276
72.02.26	PAMONA TENGGARA	9	4.112	3.847	7.959
72.02.27	PAMONA UTARA	10	7.623	7.233	14.856
	TOTAL	170	129.487	121.986	251.473

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2023)

Grafik 4.1.2
Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Kabupaten Poso

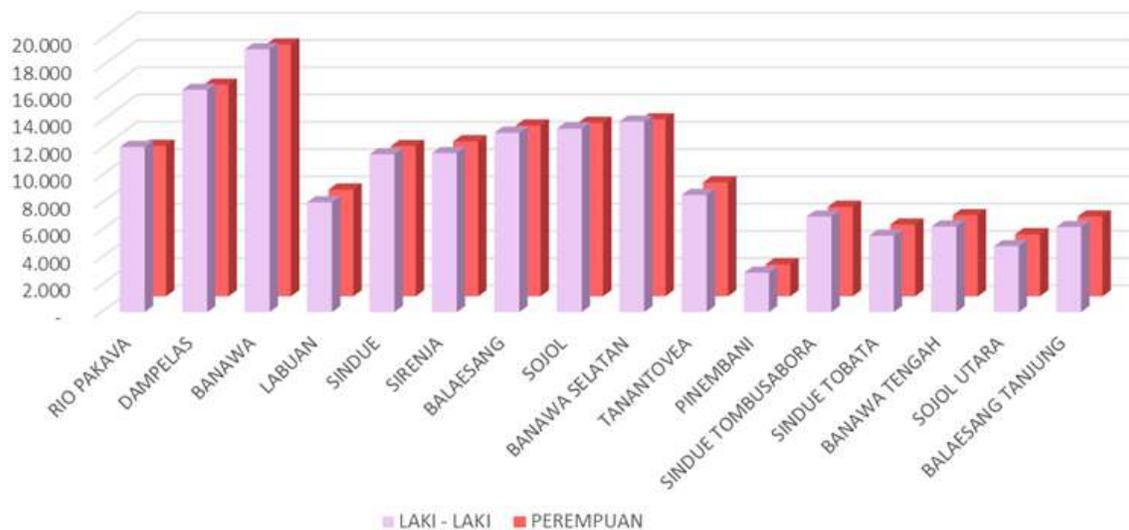


Tabel 4.1.3
Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Kabupaten Donggala

KODE	KECAMATAN	JUMLAH KEL / DESA	LAKI - LAKI (JWA)	PEREMPUAN (JWA)	JUMLAH (JWA)
72.03.04	RIO PAKAVA	14	12.115	11.040	23.155
72.03.06	DAMPELAS	13	16.305	15.523	31.828
72.03.08	BANAWA	14	19.277	18.473	37.750
72.03.09	LABUAN	7	8.060	7.830	15.890
72.03.10	SINDUE	13	11.575	11.021	22.596
72.03.11	SIRENJA	13	11.665	11.376	23.041
72.03.12	BALAESANG	13	13.159	12.534	25.693
72.03.14	SOJOL	9	13.466	12.733	26.199
72.03.18	BANAWA SELATAN	19	13.969	12.983	26.952
72.03.19	TANANTOVEA	10	8.596	8.360	16.956
72.03.21	PINEMBANI	9	2.903	2.346	5.249
72.03.24	SINDUE TOMBUSABORA	6	7.011	6.568	13.579
72.03.25	SINDUE TOBATA	6	5.606	5.267	10.873
72.03.27	BANAWA TENGAH	8	6.275	5.951	12.226
72.03.30	SOJOL UTARA	5	4.838	4.561	9.399
72.03.31	BALAESANG TANJUNG	8	6.245	5.851	12.096
	T O T A L	167	161.065	152.417	313.482

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2023)

Grafik 4.1.3
Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Kabupaten Donggala

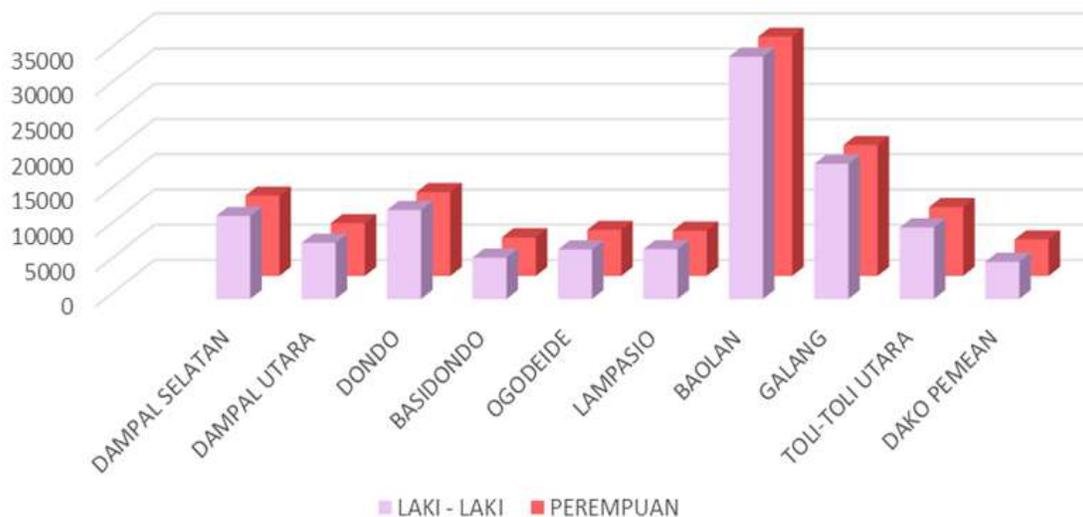


Tabel 4.1.4
Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Kabupaten Toli-Toli

KODE	KECAMATAN	JUMLAH KEL / DESA	LAKI - LAKI (JWA)	PEREMPUAN (JWA)	JUMLAH (JWA)
72.04.01	DAMPAL SELATAN	13	11.797	11.408	23.205
72.04.02	DAMPAL UTARA	12	7.978	7.494	15.472
72.04.03	DONDO	16	12.660	11.899	24.559
72.04.04	BASIDONDO	10	5.886	5.493	11.379
72.04.05	OGODEIDE	11	7.031	6.563	13.594
72.04.06	LAMPASIO	9	7.080	6.440	13.520
72.04.07	BAOLAN	10	34.413	33.975	68.388
72.04.08	GALANG	14	19.215	18.606	37.821
72.04.09	TOLI-TOLI UTARA	10	10.173	9.791	19.964
72.04.10	DAKO PEMEAN	4	5.301	5.194	10.495
	TOTAL	109	121.534	116.863	238.397

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2023)

Grafik 4.1.4
Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Kabupaten Toli-Toli

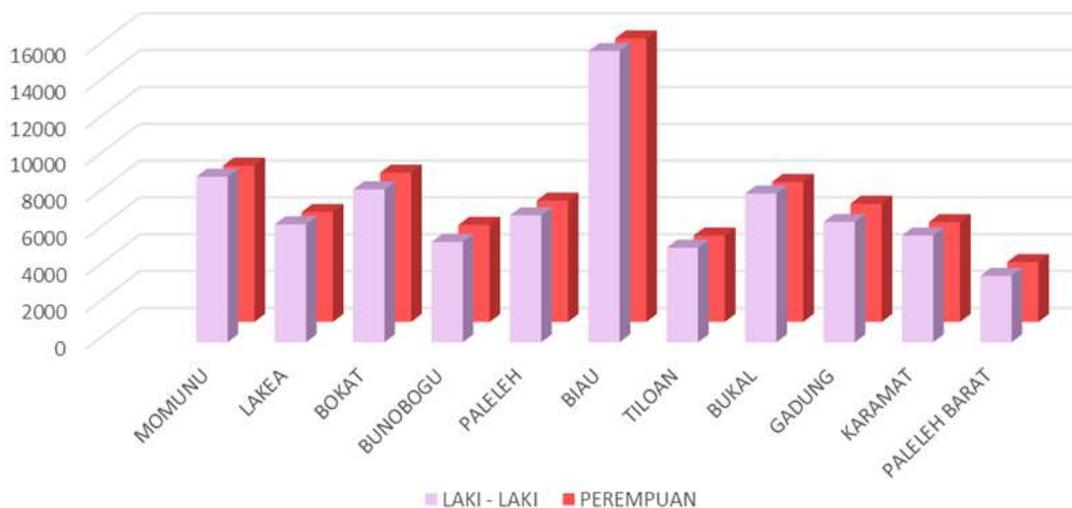


Tabel 4.1.5
Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Kabupaten Buol

KODE	KECAMATAN	JUMLAH KEL / DESA	LAKI - LAKI (JWA)	PEREMPUAN (JWA)	JUMLAH (JWA)
72.05.01	MOMUNU	16	9.002	8.501	17.503
72.05.02	LAKEA	7	6.417	5.975	12.392
72.05.03	BOKAT	15	8.309	8.112	16.421
72.05.04	BUNOBOGU	10	5.457	5.279	10.736
72.05.05	PALELEH	12	6.901	6.601	13.502
72.05.06	BIAU	7	15.827	15.415	31.242
72.05.07	TILOAN	9	5.144	4.697	9.841
72.05.08	BUKAL	14	8.086	7.611	15.697
72.05.09	GADUNG	11	6.547	6.426	12.973
72.05.10	KARAMAT	7	5.809	5.432	11.241
72.05.11	PALELEH BARAT	7	3.618	3.255	6.873
	TOTAL	115	81.117	77.304	158.421

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2023)

Grafik 4.1.5
Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Kabupaten Buol

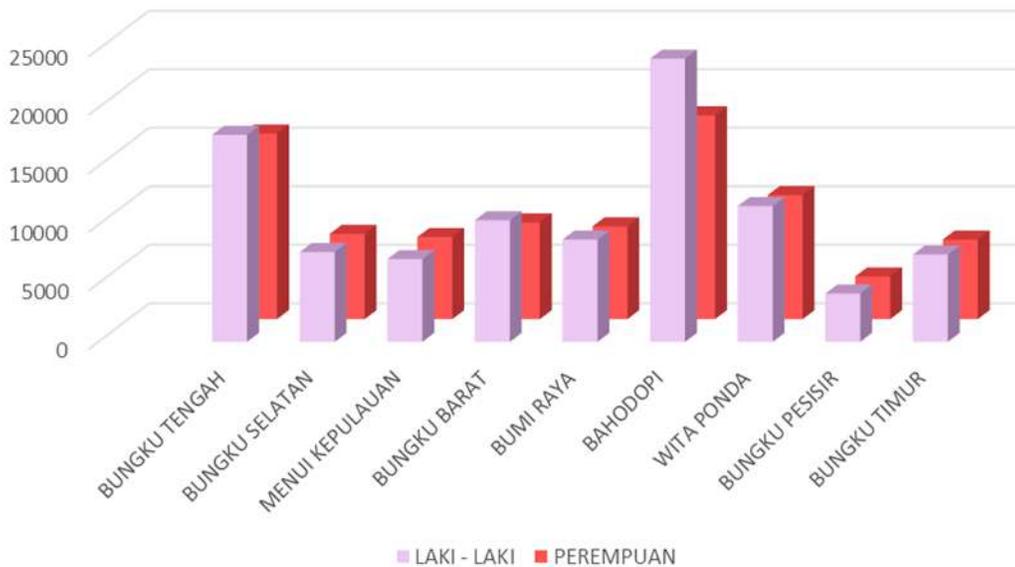


Tabel 4.1.6
Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Kabupaten Morowali

KODE	KECAMATAN	JUMLAH KEL / DESA	LAKI - LAKI (JWA)	PEREMPUAN (JWA)	JUMLAH (JWA)
72.06.05	BUNGKU TENGAH	19	17.705	15.871	33.576
72.06.06	BUNGKU SELATAN	26	7.692	7.295	14.987
72.06.07	MENUI KEPULAUAN	24	7.081	7.025	14.106
72.06.08	BUNGKU BARAT	10	10.410	8.269	18.679
72.06.09	BUMI RAYA	13	8.748	7.933	16.681
72.06.10	BAHODOPI	12	24.216	17.425	41.641
72.06.12	WITA PONDA	9	11.608	10.603	22.211
72.06.15	BUNGKU PESISIR	10	4.142	3.657	7.799
72.06.18	BUNGKU TIMUR	10	7.470	6.807	14.277
	TOTAL	133	99.072	84.885	183.957

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2023)

Grafik 4.1.6
Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Kabupaten Morowali

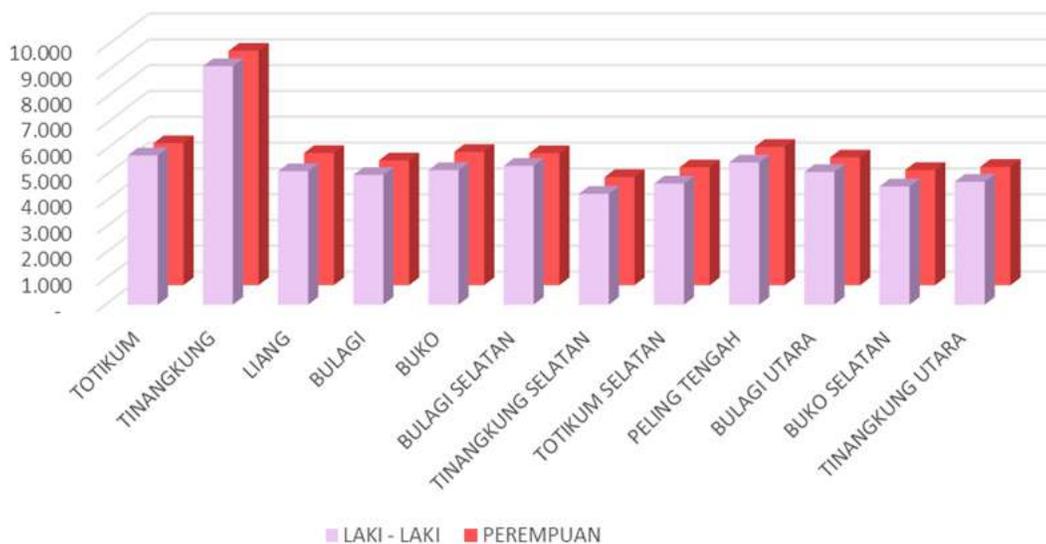


Tabel 4.1.7
Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Kabupaten Banggai Kepulauan

KODE	KECAMATAN	JUMLAH KEL / DESA	LAKI - LAKI (JWA)	PEREMPUAN (JWA)	JUMLAH (JWA)
72.07.03	TOTIKUM	11	5.789	5.507	11.296
72.07.04	TINANGKUNG	11	9.241	9.085	18.326
72.07.05	LIANG	16	5.174	5.123	10.297
72.07.06	BULAGI	16	5.029	4.841	9.870
72.07.07	BUKO	13	5.217	5.167	10.384
72.07.09	BULAGI SELATAN	20	5.386	5.120	10.506
72.07.11	TINANGKUNG SELATAN	9	4.303	4.194	8.497
72.07.15	TOTIKUM SELATAN	8	4.697	4.574	9.271
72.07.16	PELING TENGAH	11	5.513	5.365	10.878
72.07.17	BULAGI UTARA	12	5.145	4.953	10.098
72.07.18	BUKO SELATAN	11	4.585	4.468	9.053
72.07.19	TINANGKUNG UTARA	6	4.767	4.591	9.358
	TOTAL	144	64.846	62.988	127.834

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2023)

Grafik 4.1.7
Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Kabupaten Banggai Kepulauan

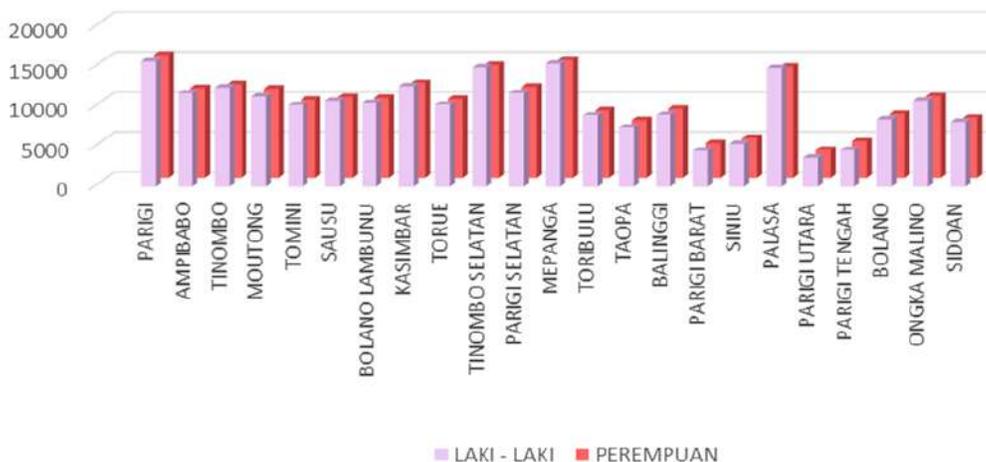


Tabel 4.1.8
Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Kabupaten Parigi Moutong

KODE	KECAMATAN	JUMLAH KEL / DESA	LAKI - LAKI (JIWA)	PEREMPUAN (JIWA)	JUMLAH (JIWA)
72.08.01	PARIGI	11	15.719	15.422	31.141
72.08.02	AMPIBABO	19	11.698	11.240	22.938
72.08.03	TINOMBO	15	12.406	11.724	24.130
72.08.04	MOUTONG	20	11.297	11.170	22.467
72.08.05	TOMINI	14	10.245	9.827	20.072
72.08.06	SAUSU	10	10.798	10.141	20.939
72.08.07	BOLANO LAMBUNU	14	10.505	10.032	20.537
72.08.08	KASIMBAR	18	12.556	11.896	24.452
72.08.09	TORUE	7	10.312	9.915	20.227
72.08.10	TINOMBO SELATAN	20	14.998	14.176	29.174
72.08.11	PARIGI SELATAN	10	11.728	11.414	23.142
72.08.12	MEPANGA	18	15.438	14.785	30.223
72.08.13	TORIBULU	9	8.958	8.503	17.461
72.08.14	TAOPA	11	7.418	7.224	14.642
72.08.15	BALINGGI	9	9.042	8.679	17.721
72.08.16	PARIGI BARAT	6	4.538	4.355	8.893
72.08.17	SINIU	9	5.374	5.010	10.384
72.08.18	PALASA	11	14.906	13.990	28.896
72.08.19	PARIGI UTARA	5	3.667	3.531	7.198
72.08.20	PARIGI TENGAH	6	4.617	4.605	9.222
72.08.21	BOLANO	13	8.395	8.078	16.473
72.08.22	ONGKA MALINO	17	10.803	10.246	21.049
72.08.23	SIDOAN	11	8.111	7.539	15.650
	T O T A L	283	233.529	223.502	457.031

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2023)

Grafik 4.1.8
Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Kabupaten Parigi Moutong



Tabel 4.1.9
Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Kabupaten Tojo Una-Una

KODE	KECAMATAN	JUMLAH KEL / DESA	LAKI - LAKI (JIWA)	PEREMPUAN (JIWA)	JUMLAH (JIWA)
72.09.01	UNA UNA	11	4.379	4.123	8.502
72.09.02	TOGEAN	16	5.557	5.243	10.800
72.09.03	WALEA KEPULAUAN	9	2.957	2.797	5.754
72.09.04	AMPANA TETE	20	15.123	14.118	29.241
72.09.05	AMPANA KOTA	10	11.259	10.829	22.088
72.09.06	ULUBONGKA	18	10.149	9.264	19.413
72.09.07	TOJO BARAT	13	6.786	6.392	13.178
72.09.08	TOJO	16	7.655	7.241	14.896
72.09.09	WALEA BESAR	8	2.425	2.162	4.587
72.09.10	RATOLINDO	10	15.029	15.219	30.248
72.09.11	BATUDAKA	9	3.125	2.909	6.034
72.09.12	TALATAKO	6	3.335	3.264	6.599
	TOTAL	146	87.779	83.561	171.340

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2023)

Grafik 4.1.9
Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Kabupaten Tojo Una-Una

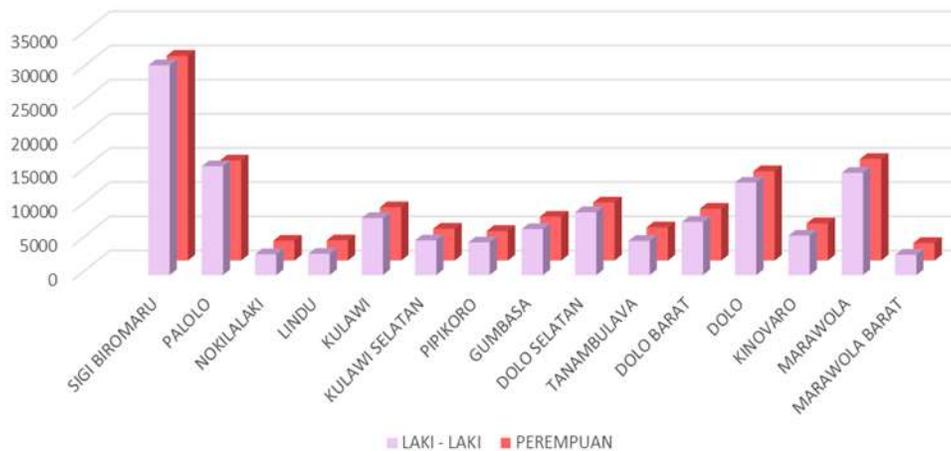


Tabel 4.1.10
Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Kabupaten Sigi

KODE	KECAMATAN	JUMLAH KEL / DESA	LAKI - LAKI (JWA)	PEREMPUAN (JWA)	JUMLAH (JWA)
72.10.01	SIGI BIROMARU	17	30.722	29.973	60.695
72.10.02	PALOLO	22	15.931	14.652	30.583
72.10.03	NOKILALAKI	5	3.063	2.918	5.981
72.10.04	LINDU	5	3.128	2.961	6.089
72.10.05	KULAWI	16	8.350	7.804	16.154
72.10.06	KULAWI SELATAN	12	5.083	4.669	9.752
72.10.07	PIPIKORO	19	4.802	4.338	9.140
72.10.08	GUMBASA	7	6.750	6.430	13.180
72.10.09	DOLO SELATAN	12	9.203	8.508	17.711
72.10.10	TANAMBULAVA	5	5.013	4.862	9.875
72.10.11	DOLO BARAT	12	7.779	7.593	15.372
72.10.12	DOLO	11	13.543	13.078	26.621
72.10.13	KINOVARO	10	5.779	5.448	11.227
72.10.14	MARAWOLA	11	14.977	14.883	29.860
72.10.15	MARAWOLA BARAT	12	2.990	2.568	5.558
	TOTAL	176	137.113	130.685	267.798

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2023)

Grafik 4.10
Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Kabupaten Sigi



Tabel 4.1.11
Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Kabupaten Banggai Laut

KODE	KECAMATAN	JUMLAH KEL / DESA	LAKI - LAKI (JWA)	PEREMPUAN (JWA)	JUMLAH (JWA)
72.11.01	BANGGAI	10	12.463	12.369	24.832
72.11.02	BANGGAI UTARA	6	3.796	3.766	7.562
72.11.03	BOKAN KEPULAUAN	16	6.530	6.323	12.853
72.11.04	BANGKURUNG	12	4.842	4.669	9.511
72.11.05	LABOBO	8	3.283	3.185	6.468
72.11.06	BANGGAI SELATAN	6	3.306	3.236	6.542
72.11.07	BANGGAI TENGAH	8	4.400	4.433	8.833
	TOTAL	66	38.620	37.981	76.601

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2023)

Grafik 4.11
Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Kabupaten Banggai Laut

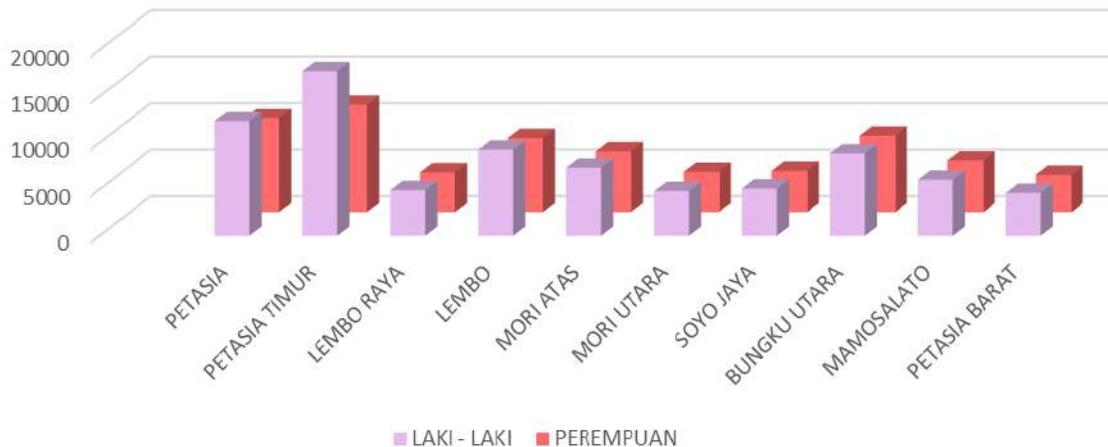


Tabel 4.1.12
Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Kabupaten Morowali Utara

KODE	KECAMATAN	JUMLAH KEL / DESA	LAKI - LAKI (JWA)	PEREMPUAN (JWA)	JUMLAH (JWA)
72.12.01	PETASIA	10	12.336	10.145	22.481
72.12.02	PETASIA TIMUR	12	17.712	11.589	29.301
72.12.03	LEMBO RAYA	10	4.920	4.293	9.213
72.12.04	LEMBO	14	9.278	8.005	17.283
72.12.05	MORI ATAS	14	7.322	6.573	13.895
72.12.06	MORI UTARA	8	4.808	4.354	9.162
72.12.07	SOYO JAYA	10	5.092	4.468	9.560
72.12.08	BUNGKU UTARA	23	8.865	8.240	17.105
72.12.09	MAMOSALATO	14	6.024	5.588	11.612
72.12.10	PETASIA BARAT	10	4.624	4.038	8.662
	TOTAL	125	80.981	67.293	148.274

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2023)

Grafik 4.12
Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Kabupaten Morowali Utara



Tabel 4.1.13
Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Kota Palu

KODE	KECAMATAN	JUMLAH KEL / DESA	LAKI - LAKI (JWA)	PEREMPUAN (JWA)	JUMLAH (JWA)
72.71.01	PALU TIMUR	5	21.989	22.502	44.491
72.71.02	PALU BARAT	6	23.791	23.507	47.298
72.71.03	PALU SELATAN	5	35.858	36.141	71.999
72.71.04	PALU UTARA	5	12.861	12.603	25.464
72.71.05	ULUJADI	6	18.569	18.353	36.922
72.71.06	TATANGA	6	27.312	27.166	54.478
72.71.07	TAWAELI	5	11.968	11.542	23.510
72.71.08	MANTIKULORE	8	41.367	41.026	82.393
	TOTAL	46	193.715	192.840	386.555

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2023)

Grafik 4.1.13
Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Kota Palu



4.1.2 Kepadatan Penduduk

Kepadatan adalah hasil bagi jumlah objek terhadap luas daerah, semakin besar angkanya maka semakin padat kependudukannya. Dengan demikian satuan yang digunakan adalah satuan/luas daerah rumus kepadatan penduduk sebagai berikut:

$$P = \frac{\text{Jumlah Penduduk (jiwa)}}{\text{Luas Wilayah (km}^2\text{)}}$$

Analisis kepadatan penduduk penting untuk mengetahui persebaran penduduk suatu wilayah dan penataan ruang khususnya distribusi permukiman. Kepadatan penduduk merupakan indikator awal untuk mendeteksi tingkat perkembangan wilayah beserta seluruh kemungkinan dampak yang ditimbulkan. Wilayah yang memiliki kepadatan yang tinggi umumnya adalah pusat permukiman, pusat peradaban, dan pusat aktivitas sosial ekonomi (pusat pertumbuhan).

Provinsi Sulawesi Tengah merupakan tergolong Provinsi yang jarang penduduknya. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.2 yang memperlihatkan kepadatan penduduk di Kabupaten/Kota dengan luas wilayah 61.605.718 km², Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota didiami oleh 3.154.499 (Tiga Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan) jiwa. Jika dilihat persebaran di setiap Kabupaten/Kota nampak bahwa Kota Palu merupakan wilayah terpadat dengan kepadatan sebesar 1.084 jiwa/km², sedangkan wilayah kepadatan terendah di Kabupaten Morowali Utara yaitu sebesar 16 jiwa/km². Secara keseluruhan Provinsi Sulawesi Tengah memiliki kepadatan penduduk 50 jiwa/km². Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2.
Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

KODE	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK n (jiwa)	LUAS WILAYAH (Km2)	KEPADATAN PENDUDUK
7201	KAB. BANGGAI	373.336	8.252.882	45
7202	KAB. POSO	251.473	7.545.930	33
7203	KAB. DONGGALA	313.482	5.126.586	61
7204	KAB. TOLITOLI	238.397	3.700.369	64
7205	KAB. BUOL	158.421	3.723.580	42
7206	KAB. MOROWALI	183.957	4.486.891	40
7207	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	127.834	2.385.073	53
7208	KAB. PARIGI MOUTONG	457.031	5.805.610	78
7209	KAB. TOJO UNA UNA	171.340	5.572.856	30
7210	KAB. SIGI	267.798	5.225.435	51
7211	KAB. BANGGAI LAUT	76.601	688.151	111
7212	KAB. MOROWALI UTARA	148.274	8.736.006	16
7271	KOTA PALU	386.555	356.351	1.084
	TOTAL	3.154.499	61.605.718	51

Sumber : *Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2023)*

4.1.3 Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menggambarkan penambahan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah maupun migrasi penduduk. Laju pertumbuhan penduduk mengidentifikasi kecenderungan besarnya penduduk pada waktu mendatang.

Laju pertumbuhan penduduk pertahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Angka pertumbuhan penduduk dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah dan struktur penduduk beberapa tahun ke depan. Adapun rumus mencari Laju Pertumbuhan Penduduk adalah sebagai berikut :

$$R = \left(\left(\frac{P_t}{P_0} \right)^{\frac{1}{t}} - 1 \right) \times 100\%$$

R = Laju pertumbuhan penduduk

P_t = Jumlah penduduk tahun t

P_0 = Jumlah penduduk tahun awal

t = Periode waktu antara tahun dasar dan tahun t (dalam tahun).

Angka pertumbuhan penduduk Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada Tabel 4.3. Data penduduk tahun 2022 yang digunakan adalah data Bulan Desember 2022 sedangkan data penduduk tahun 2023 menggunakan data Bulan Desember 2023.

Tabel 4.3.
Angka Pertambahan Penduduk Sulawesi Tengah Tahun 2023

KODE	KABUPATEN/KOTA	PENDUDUK TAHUN 2022		PENDUDUK TAHUN 2023		ANGKA PERTAMBAHAN PENDUDUK
		n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	
7201	KAB. BANGGAI	370.518	11.95	373.336	11.84	0.76
7202	KAB. POSO	249.582	8.05	251.473	7.97	0.76
7203	KAB. DONGGALA	309.144	9.97	313.482	9.94	1.40
7204	KAB. TOLI TOLI	233.997	7.55	238.397	7.56	1.88
7205	KAB. BUOL	155.349	5.01	158.421	5.02	1.98
7206	KAB. MOROWALI	175.323	5.66	183.957	5.83	4.92
7207	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	125.030	4.03	127.834	4.05	2.24
7208	KAB. PARIGI MOUTONG	452.696	14.60	457.031	14.49	0.96
7209	KAB. TOJO UNA UNA	167.746	5.41	171.340	5.43	2.14
7210	KAB. SIGI	262.159	8.46	267.798	8.49	2.15
7211	KAB. BANGGAI LAUT	74.920	2.42	76.601	2.43	2.24
7212	KAB. MOROWALI UTARA	144.489	4.66	148.274	4.70	2.62
7271	KOTA PALU	378.764	12.22	386.555	12.25	2.06
	TOTAL	3.099.717	100	3.154.499	100	26.12

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2023)

Angka pertumbuhan penduduk Provinsi Sulawesi Tengah termasuk rendah. Selama kurun waktu selisih antara Desember 2022 sampai dengan Desember 2023

dengan jumlah 54.782 (Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua) jiwa. Pertumbuhan penduduk Provinsi Sulawesi Tengah ini dihitung berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) hasil dari SIAK Pelayanan Kabupaten/Kota yang telah dikonsolidasikan dengan Data Center Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang disesuaikan dengan hasil perekaman KTP-el pada tahun 2022 dan Tahun 2023. Dari hasil konsolidasi dan pembersihan data ditemukan banyak sekali data ganda, data anomali, data non aktif, data meninggal dan data yang telah dipindahkan di dalam satu provinsi, kabupaten/kota yang dapat mengakibatkan pengurangan jumlah penduduk.

4.2 Penduduk menurut Karakteristik Demografi

4.2.1 Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Umur dan Jenis Kelamin

Karakteristik penduduk menurut umur dan jenis kelamin penting untuk diketahui, terutama ketika menyusun suatu perencanaan kebijakan dan program pembangunan suatu wilayah. Karena setiap kelompok umur penduduk mempunyai kebutuhan dan penanganan yang berbeda-beda. Kelompok penduduk dibawah 5 (lima) tahun misalnya, masih memerlukan ketersediaan pelayanan kesehatan yang baik, peningkatan status gizi dan status kesehatan, mengingat kelompok ini rentan terhadap kematian. Hal sama, juga penting untuk kelompok remaja khususnya perempuan, ketika menyusun program-program kesehatan reproduksi remaja dalam rangka menyiapkan remaja perempuan menjadi calon ibu yang prima.

Dengan demikian informasi mengenai karakteristik penduduk menurut umur dan jenis kelamin penting untuk perencanaan untuk penyediaan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan kebutuhan-kebutuhan dasar penduduk lainnya yang sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing, baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pekerjaan dan lain sebagainya. Selain itu karakteristik penduduk menurut umur dan jenis kelamin bukan hanya merupakan pencerminan proses demografi masa lalu, tetapi juga sekaligus dapat digunakan untuk memperkirakan gambaran perkembangan penduduk pada masa yang akan datang melalui proses kelahiran dan kematian.

Tabel 4.4. menunjukkan bahwa penduduk Sulawesi Tengah sebagian besar merupakan penduduk usia produktif yaitu pada kelompok umur antara 15-64 tahun atau

69,01 persen dengan komposisi terbesar berada pada penduduk berumur 20-24 tahun. Kondisi ini sangat menguntungkan karena sebagian besar diatas 50 persen yang merupakan penduduk usia kerja (usia produktif), dan sisanya sebanyak 25,38 persen merupakan penduduk usia muda atau berusia dibawah 15 (lima belas) tahun dan 5,61 persen merupakan penduduk lanjut usia atau 65 (enam puluh lima) tahun ke atas.

Tabel 4.4.
Jumlah dan Proporsi Penduduk berdasarkan Kelompok Umur

KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH JWA	%
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%		
00-04	121.038	7.48	112.066	7.30	233.104	7.39
05-09	145.612	9.00	136.418	8.88	282.030	8.94
10-14	147.352	9.10	138.185	9.00	285.537	9.05
15-19	135.025	8.34	129.737	8.45	264.762	8.39
20-24	158.729	9.81	148.058	9.64	306.787	9.73
25-29	134.690	8.32	123.732	8.06	258.422	8.19
30-34	121.422	7.50	115.464	7.52	236.886	7.51
35-39	116.594	7.20	111.303	7.25	227.897	7.22
40-44	122.571	7.57	117.289	7.64	239.860	7.60
45-49	105.662	6.53	102.734	6.69	208.396	6.61
50-54	96.745	5.98	91.103	5.93	187.848	5.95
55-59	71.915	4.44	69.870	4.55	141.785	4.49
60-64	52.974	3.27	51.324	3.34	104.298	3.31
65-69	37.741	2.33	37.013	2.41	74.754	2.37
70-74	24.159	1.49	23.878	1.55	48.037	1.52
>75	26.224	1.62	27.872	1.81	54.096	1.71
TOTAL	1.618.453	100	1.536.046	100	3.154.499	100

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2023)

Penduduk berusia kurang dari 15 (lima belas) tahun harus menjadi perhatian karena pada 5 (lima) tahun mendatang kelompok ini akan menjadi entry tenaga kerja baru, yang memerlukan *skill*//kemampuan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai baik keterampilan maupun etos kerja serta kepribadian. Sehingga ketika mereka memasuki pasar kerja, mampu memperoleh peluang kerja yang tersedia. Disisi yang lain pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota harus mampu pula menciptakan pasar kerja yang dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi.

a. Rasio Jenis Kelamin

Rasio Jenis Kelamin adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya jumlah penduduk laki-laki per 100 (seratus) penduduk perempuan. Data rasio jenis kelamin ini, berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Rasio Jenis kelamin juga digunakan untuk melihat proporsi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan untuk berbagai perencanaan kegiatan seperti penyediaan Rumah Sakit Bersalin, penyediaan ragam pendidikan dan lain sebagainya. Selain itu, informasi rasio jenis kelamin juga penting diketahui oleh para politisi, terutama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen. Dengan rumus sebagai berikut :

$$SR = \frac{P_l}{P_p} \times 100$$

SR = Sex Rasio (Rasio Jenis Kelamin)

P_l = Jumlah Penduduk Laki-Laki

P_p = Jumlah Penduduk Perempuan

Keterangan :

1. Jika SR lebih besar dari 100, artinya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan.
2. Jika SR lebih kecil dari 100, artinya jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dari jumlah penduduk perempuan.
3. Jika SR = 100, artinya jumlah penduduk laki-laki sama dengan jumlah penduduk perempuan.

Tabel 4.5.
Rasio Jenis Kelamin Berdasarkan Kabupaten/Kota

KODE	KABUPATEN/KOTA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	RASIO
7201	KAB. BANGGAI	189.595	183.741	103.19
7202	KAB. POSO	129.487	121.986	106.15
7203	KAB. DONGGALA	161.065	152.417	105.67
7204	KAB. TOLI TOLI	121.534	116.863	104.00
7205	KAB. BUOL	81.117	77.304	104.93
7206	KAB. MOROWALI	99.072	84.885	116.71
7207	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	64.846	62.988	102.95
7208	KAB. PARIGI MOUTONG	233.529	223.502	104.49
7209	KAB. TOJO UNA UNA	87.779	83.561	105.05
7210	KAB. SIGI	137.113	130.685	104.92
7211	KAB. BANGGAI LAUT	38.620	37.981	101.68
7212	KAB. MOROWALI UTARA	80.981	67.293	120.34
7271	KOTA PALU	193.715	192.840	100.45
TOTAL		1.618.453	1.536.046	105.36

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2023)

Pada tabel 4.5 rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 105 persen yang berarti dari setiap penduduk perempuan terdapat 105 orang penduduk laki-laki.

Rasio jenis kelamin penduduk pada kelompok umur 0-4 tahun sebesar 108 persen yang artinya terdapat 108 balita berjenis kelamin laki-laki dari 100 balita perempuan. Secara biologis memang dikatakan bahwa jumlah kelahiran laki-laki pada umumnya lebih besar dibandingkan bayi perempuan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah.

Tabel 4.6.
Rasio Jenis Kelamin Berdasarkan Kelompok Umur

KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	RASIO
00-04	121.038	112.066	233.104	108.01
05-09	145.612	136.418	282.030	106.74
10-14	147.352	138.185	285.537	106.63
15-19	135.025	129.737	264.762	104.08
20-24	158.729	148.058	306.787	107.21
25-29	134.690	123.732	258.422	108.86
30-34	121.422	115.464	236.886	105.16
35-39	116.594	111.303	227.897	104.75
40-44	122.571	117.289	239.860	104.50
45-49	105.662	102.734	208.396	102.85
50-54	96.745	91.103	187.848	106.19
55-59	71.915	69.870	141.785	102.93
60-64	52.974	51.324	104.298	103.21
65-69	37.741	37.013	74.754	101.97
70-74	24.159	23.878	48.037	101.18
>75	26.224	27.872	54.096	94.09
TOTAL	1.618.453	1.536.046	3.154.499	105.36

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2023)

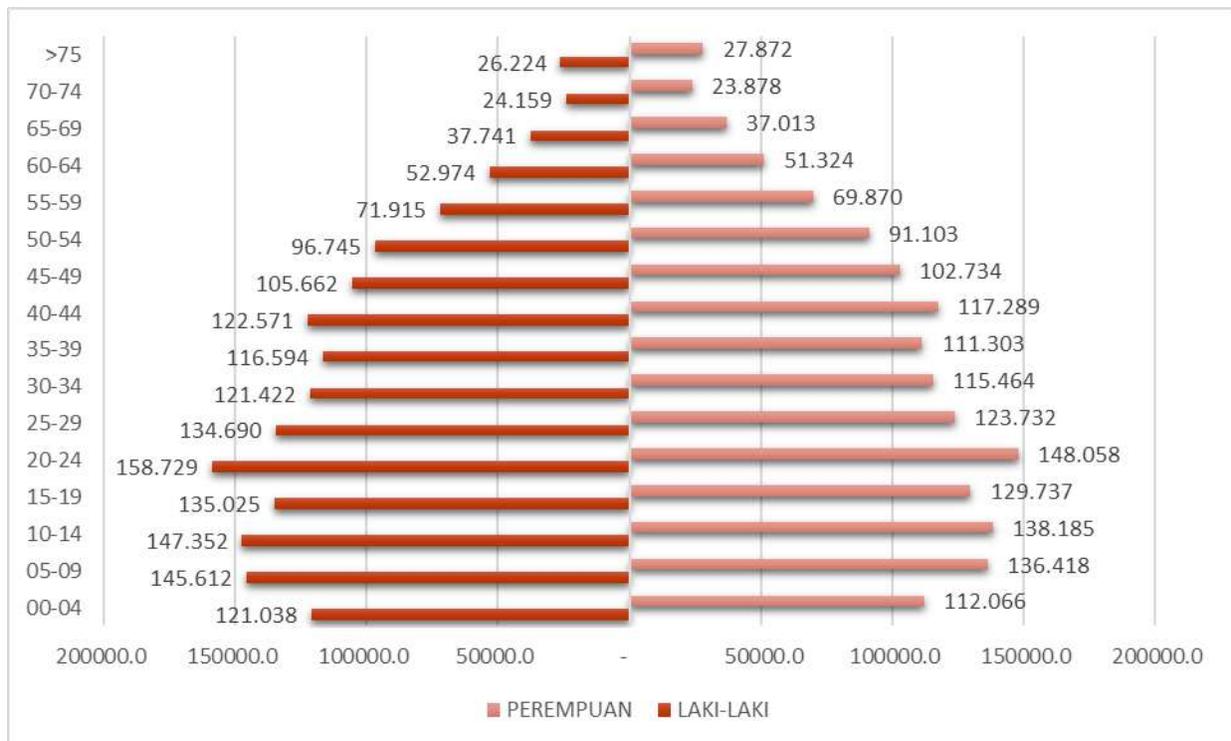
b. Piramida Penduduk

Pada karakteristik demografi di Provinsi Sulawesi Tengah, kependudukan dipengaruhi oleh tingkah laku sosial ekonomi penduduk. Karakteristik penduduk yang paling penting yaitu struktur umur dan jenis kelamin. Struktur umur penduduk atau biasa yang kita kenal dengan kelompok umur merupakan umur tunggal yang dikelompokkan dalam 10 (sepuluh) tahunan. Pada pembahasan demografi pengertian umur yaitu umur pada saat ulang tahun terakhir. Misalnya Anayah lahir pada Bulan April 1994 dan Sensus penduduk dilakukan pada Bulan Juni 1995 jadi pada saat

Sensus Tahun 1995 dilaksanakan Anayah berumur 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan tetapi pada perhitungan demografi Anayah dicatat berumur 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, piramida penduduk yaitu komposisi umur dan jenis kelamin suatu penduduk secara grafis yang digambarkan dalam bentuk piramida. Piramida ini terdiri dari 2 (dua) diagram batang, pada satu sisi menunjukkan jumlah penduduk laki-laki dan sisi lainnya menunjukkan jumlah penduduk perempuan. Pada umumnya, setiap batang ini menunjukkan jumlah penduduk setiap jenis kelamin dalam kelompok interval usia penduduk 5 (lima) tahunan. Penduduk laki-laki digambarkan disebelah kiri dengan warna biru sedangkan penduduk Wanita digambarkan disebelah kanan dengan warna merah. Piramida penduduk ini menunjukkan jumlah penduduk atau persentase jumlah penduduk pada usia tertentu dan jenis kelamin tertentu terhadap jumlah penduduk total, dapat dilihat pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1
Piramida Penduduk Sulawesi Tengah



Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2023)

Pada gambar 4.1. Piramida penduduk Provinsi Sulawesi Tengah menggambarkan Provinsi Sulawesi Tengah dengan pertumbuhan yang stabil atau bisa kita sebut piramida penduduk dewasa atau *stationer*.

Jumlah penduduk tertinggi yang berjenis kelamin laki-laki berada pada kelompok umur 20-24 Tahun berjumlah 156.986 (Seratus lima puluh enam ribu Sembilan ratus delapan puluh enam) Jiwa, diikuti dengan kelompok umur 10–14 tahun berjumlah 146.267 (Seratus empat puluh enam ribu dua ratus enam puluh tujuh) jiwa dan kelompok umur 05-09 tahun berjumlah 143.115 (Seratus empat puluh tiga ribu serratus lima belas) Jiwa. Jumlah penduduk tertinggi yang berjenis kelamin perempuan berada pada kelompok umur 20-24 Tahun berjumlah 147.214 (Seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat belas) jiwa, diikuti dengan kelompok umur 10-14 tahun berjumlah 137.198 (Seratus tiga puluh tujuh ribu serratus Sembilan puluh delapan) jiwa dan kelompok umur 05-09 Tahun berjumlah 134.009 (Seratus tiga puluh empat ribu sembilan) jiwa.

Berdasarkan Kelompok umur penduduk menurut jenis kelamin digambarkan pada piramida penduduk diatas, kita dapat menelusuri kebutuhan apa saja yang pemerintah dapat fasilitasi untuk kategori balita, remaja, dewasa hingga lansia. Selain itu, kita dapat melihat potensi lapangan kerja yang bisa pemerintah sediakan serta kebutuhan akan tambahan kesempatan kerja yang harus diciptakan oleh pemerintah.

Pada piramida ini terlihat bahwa jumlah penduduk kelompok umur 0-4 tahun terlihat mengecil dibandingkan kelompok umur sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa angka kelahiran menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Penduduk lansia (>60 tahun) menunjukkan jumlah penduduk yang berkurang dibandingkan umur yang lebih muda. Maka pada beberapa tahun yang akan datang, kelompok umur penduduk lansia akan semakin bertambah karena akan terus merambat naik. Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk menambah fasilitas pelayanan untuk penduduk lansia.

Struktur umur penduduk menurut jenis kelamin dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Dasar piramida penduduk menunjukkan jumlah penduduk, dan badan piramida penduduk bagian kiri dan kanan menunjukkan banyaknya penduduk laki-laki dan perempuan menurut kelompok umur 5 (lima) tahunan.

c. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah negara maju atautkah negara yang sedang berkembang. Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting, semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif (usia 15-64 tahun) untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif (usia 0-14 tahun) dan tidak produktif lagi (usia 65 tahun keatas). Sedangkan rasio ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 4.7
Rasio Ketergantungan

KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PENDUDUK	%
0 - 14 TAHUN (MUDA)	414.002	386.669	800.671	25.38
15 - 64 TAHUN (PRODUKTIF)	1.116.327	1.060.614	2.176.941	69.01
>65 TAHUN (TUA)	88.124	88.763	176.887	5.61
SULAWESI TENGAH	1.618.453	1.536.046	3.154.499	100

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2023)

Pada Tabel 4.8. diatas didapat kelompok umur yang dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok umur, yaitu kelompok umur 0-14 tahun, 15-64 tahun dan >65 tahun. Kelompok umur 0-14 tahun sebesar 800.671 (Delapan Ratus Ribu Enam Puluh Tujuh Satu) jiwa atau sebesar 25.38 persen. Kelompok umur 15-64 tahun sebesar 2.176.941 (Dua juta seratus Tujuh Puluh Enam Sembilan Ratus Empat Puluh Satu) Jiwa atau sebesar 69.01 persen. Kelompok umur >65 tahun sebesar 176.887 (Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh) jiwa atau sebesar 5.61 persen. Kelompok umur

tertinggi jumlah penduduknya yaitu pada kelompok umur 15-64 tahun atau bisa kita sebut dengan kelompok umur yang produktif. Kelompok umur produktif ini berpotensi sebagai modal pembangunan.

$$\begin{aligned} \text{RK} &= \frac{\text{Jumlah Penduduk Usia Muda} + \text{Jumlah Penduduk Usia Tua}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Produktif}} \times 100 \\ \text{RK} &= \frac{800.671 + 176.887}{2.176.941} \times 100 \\ \text{RK} &= 44 \end{aligned}$$

Total Rasio Ketergantungan sebesar 44 persen artinya setiap 100 (seratus) orang penduduk usia produktif mempunyai beban tanggungan sebanyak 44 (empat puluh empat) jiwa yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Adapun kelompok umur produktif di Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebesar 2.176.941 (Dua juta seratus Tujuh Puluh Enam Sembilan Ratus Empat Puluh Satu) Jiwa atau sebesar 69.01 persen.

4.2.2 Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Status Kawin

Informasi data kependudukan menurut status kawin berguna untuk para penentu kebijakan dan pelaksana program kependudukan, seperti pembangunan keluarga, kelahiran serta upaya-upaya peningkatan kualitas keluarga. Cakupan data kependudukan menurut status kawin yaitu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Status perkawinan terdiri dari belum kawin, kawin, cerai hidup, dan cerai mati. Belum kawin adalah status belum /tidak terikat dalam perkawinan. Kawin adalah status terikat dalam perkawinan, baik tinggal Bersama maupun terpisah (kawin sah, secara hukum /adat, agama, negara dan sebagainya, juga hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami istri). Cerai hidup adalah status hidup berpisah sebagai suami istri karena bercerai dan belum kawin lagi. Cerai walaupun belum resmi secara hukum dianggap cerai cerai. Sebaliknya sementara hidup terpisah tidak dianggap bercerai, misalnya suami/istri yang ditinggalkan oleh istri/suami ke tempat lain karena sekolah,

bekerja dll. Cerai mati adalah status suami /istrinya telah meninggal dunia dan belum kawin lagi.

Konsep perkawinan difokuskan pada keadaan dimana seorang laki-laki dan perempuan hidup bersama dalam jangka waktu yang lama secara sah (*de jure*) maupun tanpa pengesahan perkawinan (*de facto*). Secara tidak langsung status perkawinan mempengaruhi tingkat kelahiran. Pada umumnya, daerah dengan proporsi kawin yang tinggi cenderung menaikkan angka kelahiran.

Tabel 4.8
Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Kawin

STATUS PERKAWINAN		JENIS KELAMIN				JUMLAH PERSENTASE	
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN			
No.	Status	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
1	BELUM KAWIN	829.331	51	673.827	44	1.503.158	48
2	KAWIN	741.076	46	737.472	48	1.478.548	47
3	CERAI HIDUP	17.375	1	25.992	2	43.367	1
4	CERAI MATI	30.671	2	98.755	6	129.426	4
TOTAL		1.618.453	100	1.536.046	100	3.154.499	100

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2023)

Pada Tabel 4.9. diatas menunjukkan jumlah dan proporsi penduduk berdasarkan status kawin di Provinsi Sulawesi Tengah. Penduduk didominasi oleh penduduk berstatus belum kawin dengan jumlah 1.503.158 (Satu Juta Lima Ratus Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Delapan) jiwa. Selanjutnya diikuti dengan status kawin sebesar 1.478.548 (Satu juta empat ratus tujuh puluh delapan lima ratus empat puluh delapan) jiwa, cerai mati sebesar 129.426 (Seratus dua puluh ribu sembilan ribu empat ratus dua puluh enam) jiwa dan cerai hidup sebesar 43.367 (Empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tujuh) jiwa.

Adapun status perkawinan terkecil adalah cerai hidup yaitu sebesar 1 (satu) persen atau dengan jumlah sebanyak 43.367 (Empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tujuh) jiwa, dimana proporsi perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki.

Proporsi ini disebabkan laki-laki yang bercerai baik karena perceraian maupun karena ditinggal meninggal istri lebih cepat melakukan perkawinan kembali dibandingkan perempuan. Perempuan lebih banyak pertimbangan untuk menikah kembali, terutama apabila perempuan tersebut mandiri secara ekonomi. Menarik untuk diperhatikan pada status cerai hidup, bahwa proporsi penduduk berstatus cerai hidup lebih besar pada perempuan dibandingkan laki-laki. Kemandirian perempuan secara ekonomi serta peningkatan kesadaran tentang hak-hak perempuan dalam berumah tangga, seringkali menjadi penyebab keberanian perempuan menggugat cerai.

a. Angka Perkawinan Kasar

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 7 (tujuh) ayat 1 (satu) dikatakan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Perkawinan juga merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi tinggi dan rendahnya tingkat fertilitas/kelahiran, antara lain melalui Panjang dan pendeknya usia subur yang dilalui Pasangan Usia Subur (PUS) yang menentukan banyaknya kelahiran.

Angka Perkawinan Kasar menunjukkan persentase penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun untuk satu tahun tertentu. Perhitungan angka ini adalah menggunakan data banyaknya perkawinan yang terjadi pada waktu tertentu termasuk di dalamnya perkawinan pertama dan perkawinan ulang, jadi bukan banyaknya penduduk yang berstatus kawin. Perhitungan angka ini masih kasar tetapi dapat menunjukkan kondisi besaran penduduk yang kawin di suatu wilayah. Selain itu, indikator ini masih dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan pelayanan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian, pengembangan pelayanan keluarga dan rumah tangga dan lain-lain. Pada tabel 4.10 dibawah ini angka perkawinan kasar di Provinsi Sulawesi Tengah dengan jumlah persentase sebesar 83.94%.

Tabel 4.9
Angka Perkawinan Kasar

KODE	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN	JUMLAH PERKAWINAN DALAM 1 TAHUN	ANGKA PERKAWINAN KASAR
7201	KAB. BANGGAI	372.002	2.022	5.44
7202	KAB. POSO	250.584	1.221	4.87
7203	KAB. DONGGALA	311.333	1.191	3.83
7204	KAB. TOLI TOLI	236.111	1.361	5.76
7205	KAB. BUOL	156.594	1.253	8.00
7206	KAB. MOROWALI	179.225	2.054	11.46
7207	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	126.040	509	4.04
7208	KAB. PARIGIMOUTONG	454.509	2.415	5.31
7209	KAB. TOJO UNA UNA	169.399	1.141	6.74
7210	KAB. SIGI	264.667	1.318	4.98
7211	KAB. BANGGAI LAUT	75.495	432	5.72
7212	KAB. MOROWALI UTARA	145.686	1.343	9.22
7271	KOTA PALU	382.017	3.276	8.58
TOTAL		3.123.662	19.536	83.94

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2023)

Jika dilihat dari setiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Morowali merupakan kabupaten yang memiliki angka perkawinan kasar tertinggi yaitu dengan jumlah sebanyak 11.46% dibandingkan dengan Kabupaten dan Kota lain. Adapun angka perkawinan kasar terendah berada di Kab. Toli-Toli yaitu dengan jumlah sebesar 3.83%.

b. Angka Perkawinan Umum

Angka Perkawinan Umum menunjukkan proporsi penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk usia 15 (lima belas) tahun keatas pada pertengahan tahun dalam periode tertentu.

Seperti halnya dengan angka perkawinan kasar, angka perkawinan umum digunakan untuk memperhitungkan proporsi penduduk kawin. Namun disini pembagiannya adalah penduduk 15 (lima belas) tahun keatas dimana penduduk bersangkutan lebih beresiko kawin. Penduduk berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun tidak diikutsertakan sebagai pembagi karena pada umumnya mereka tidak beresiko kawin. Sehingga Angka Perkawinan Umum menunjukkan informasi yang lebih realitas.

Tabel 4.10
Angka Perkawinan Umum

KODE	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PERKAWINAN DALAM 1 TAHUN	JUMLAH USIA >15 DALAM PERTENGAHAN TAHUN	ANGKA PERKAWINAN UMUM
7201	KAB. BANGGAI	2.022	286.699	7.05
7202	KAB. POSO	1.221	198.810	6.14
7203	KAB. DONGGALA	1.191	234.558	5.08
7204	KAB. TOLI TOLI	1.361	174.391	7.80
7205	KAB. BUOL	1.253	112.668	11.12
7206	KAB. MOROWALI	2.054	131.227	15.65
7207	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	509	95.631	5.32
7208	KAB. PARIGI MOUTONG	2.415	345.393	6.99
7209	KAB. TOJO UNA UNA	1.141	126.113	9.05
7210	KAB. SIGI	1.318	200.682	6.57
7211	KAB. BANGGAI LAUT	432	55.652	7.76
7212	KAB. MOROWALI UTARA	1.343	111.990	11.99
7271	KOTA PALU	3.276	284.760	11.50
TOTAL		19.536	2.358.574	8.28

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2023)

Tabel 4.11 diatas menunjukkan untuk Provinsi Sulawesi Tengah, angka perkawinan umum dengan jumlah persentase sebesar 8.28% yang artinya penduduk diatas usia 15 (lima belas) tahun berstatus kawin tanpa melihat urutan perkawinan.

Adapun angka perkawinan umum tertinggi berada di Kabupaten Morowali dengan jumlah persentase 15.65% dan yang terendah berada di Kabupaten Donggala dengan jumlah persentase sebesar 5.08%.

c. Angka Perkawinan menurut Kelompok Umur

Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur adalah angka yang menunjukkan beberapa banyaknya penduduk pada suatu umur tertentu yang berstatus kawin untuk tiap-tiap 1.000 (seribu) penduduk pada kelompok umur yang sama.

Tabel 4.11
Proporsi Penduduk menurut Kelompok Umur dan Status Kawin

KELOMPOK UMUR	STATUS PERKAWINAN								JUMLAH	
	BELUM KAWIN		KAWIN		CERAI HIDUP		CERAI MATI		PERSENTASE	
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
00-04	233.104	15.51	0	0.00	0	0.00	0	0.00	233.104	7.39
05-09	282.030	18.76	0	0.00	0	0.00	0	0.00	282.030	8.94
10-14	285.525	19.00	12	0.00	0	0.00	0	0.00	285.537	9.05
15-19	259.143	17.24	5.560	0.38	48	0.11	11	0.01	264.762	8.39
20-24	230.481	15.33	75.121	5.08	988	2.28	197	0.15	306.787	9.73
25-29	104.073	6.92	150.810	10.20	2.916	6.72	623	0.48	258.422	8.19
30-34	42.614	2.83	188.249	12.73	4.643	10.71	1.380	1.07	236.886	7.51
35-39	22.441	1.49	196.994	13.32	5.736	13.23	2.726	2.11	227.897	7.22
40-44	14.828	0.99	212.995	14.41	6.819	15.72	5.218	4.03	239.860	7.60
45-49	9.477	0.63	184.454	12.48	5.997	13.83	8.468	6.54	208.396	6.61
50-54	6.861	0.46	162.249	10.97	5.398	12.45	13.340	10.31	187.848	5.95
55-59	4.522	0.30	115.741	7.83	3.915	9.03	17.607	13.60	141.785	4.49
60-64	2.947	0.20	79.076	5.35	2.722	6.28	19.553	15.11	104.298	3.31
65-69	2.164	0.14	50.950	3.45	1.847	4.26	19.793	15.29	74.754	2.37
70-74	1.366	0.09	29.568	2.00	1.120	2.58	15.983	12.35	48.037	1.52
>75	1.582	0.11	26.769	1.81	1.218	2.81	24.527	18.95	54.096	1.71
TOTAL	1.503.158	100	1.478.548	100	43.367	100	129.426	100	3.154.499	100

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2023)

Indikator ini berguna untuk perencanaan program-program yang berkaitan dengan peningkatan usia kawin pertama, mempertahankan anak-anak usia sekolah untuk tetap bersekolah dan mengembangkan pelayanan Kesehatan reproduksi bagi remaja.

d. Rata-Rata Umur Kawin Pertama

Umur kawin pertama merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kelahiran. Umur kawin pertama mempunyai korelasi negatif dengan tingkat kelahiran seorang perempuan, artinya semakin tua umur kawin pertama perempuan, maka semakin kecil potensi perempuan tersebut untuk melahirkan banyak anak. Hal ini terjadi karena semakin tinggi umur kawin pertama seorang perempuan, maka semakin pendek masa usia suburnya dan pada akhirnya akan menurunkan tingkat kelahiran perempuan tersebut.

Rata-rata usia kawin pertama dari penduduk suatu daerah mencerminkan keadaan sosial ekonomi dari daerah tersebut. Perempuan dan laki-laki yang kawin muda biasanya tidak banyak mempunyai alternatif kegiatan lain sehingga mereka menikah pada usia muda dan meninggalkan bangku sekolah.

Kegunaan tersedianya indikator rata-rata umur kawin pertama untuk mempermudah penentu kebijakan dan perencanaan pembangunan untuk mengembangkan program pemberdayaan orang muda agar meneruskan sekolah, dan bagi yang terpaksa putus sekolah diberikan Pendidikan keterampilan agar tidak segera memasuki jenjang perkawinan. Program untuk pendewasaan usia perkawinan bagi perempuan juga dapat dikembangkan sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.

Pemerintah Sulawesi Tengah diharapkan mampu meningkatkan pendidikan untuk anak terutama wanita, hal tersebut dapat mempengaruhi keputusan seorang wanita untuk memilih usia yang tepat memulai pernikahan. Wanita dengan pendidikan yang lebih tinggi akan menunda keinginan untuk menikah karena harus menyelesaikan pendidikan dan meneruskan karirnya di dunia kerja. Pemerintah hendaknya meningkatkan akses wanita terhadap pendidikan guna menekan laju pertumbuhan penduduk dengan menunda usia kawin pertama untuk menurunkan angka kelahiran.

Tabel 4.12
Rata-Rata Umur Kawin Pertama

KODE	KABUPATEN/KOTA	RATA-RATA USIA		JUMLAH
		PERKAWINAN PEREMPUAN	PERKAWINAN LAKI-LAKI	
7201	KAB. BANGGAI	25	28	53
7202	KAB. POSO	27	30	57
7203	KAB. DONGGALA	24	28	52
7204	KAB. TOLI TOLI	24	28	52
7205	KAB. BUOL	24	27	51
7206	KAB. MOROWALI	24	29	53
7207	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	25	27	52
7208	KAB. PARIGI MOUTONG	25	28	53
7209	KAB. TOJO UNA UNA	24	28	52
7210	KAB. SIGI	24	27	51
7211	KAB. BANGGAI LAUT	24	27	51
7212	KAB. MOROWALI UTARA	25	30	55
7271	KOTA PALU	26	29	55
TOTAL		321	366	687

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2023)

Data yang diperoleh dari database kependudukan tahun 2023 menunjukkan bahwa rata-rata usia kawin pertama di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 untuk perkawinan Perempuan tertinggi berada di Kabupaten Poso yang berusia 27 tahun sebaliknya yang terendah rata-rata berusia 24 tahun, sedangkan untuk rata-rata usia perkawinan laki-laki tertinggi berada di Kabupaten Poso dan Kabupaten Morowali Utara yang berusia 30 tahun sebaliknya yang terendah rata-rata berusia 27 tahun.

Tabel 4.13
Proporsi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Status Kawin

KODE	KABUPATEN/KOTA	STATUS KAWIN								JUMLAH	
		BELUM KAWIN		KAWIN		CERAI HIDUP		CERAI MATI		PERSENTASE	
		n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
7201	KAB. BANGGAI	171.226	11.39	178.224	12.05	7.394	17.05	16.492	12.74	373.336	11.84
7202	KAB. POSO	118.551	7.89	119.510	8.08	2.790	6.43	10.622	8.21	251.473	7.97
7203	KAB. DONGGALA	149.366	9.94	149.414	10.11	2.874	6.63	11.828	9.14	313.482	9.94
7204	KAB. TOLITOLI	114.003	7.58	110.493	7.47	3.010	6.94	10.891	8.41	238.397	7.56
7205	KAB. BUOL	79.479	5.29	71.551	4.84	1.599	3.69	5.792	4.48	158.421	5.02
7206	KAB. MOROWALI	90.760	6.04	85.375	5.77	2.809	6.48	5.013	3.87	183.957	5.83
7207	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	59.378	3.95	60.752	4.11	1.944	4.48	5.760	4.45	127.834	4.05
7208	KAB. PARIGI MOUTONG	215.811	14.36	218.834	14.80	5.030	11.60	17.356	13.41	457.031	14.49
7209	KAB. TOJO UNA UNA	82.453	5.49	78.699	5.32	2.635	6.08	7.553	5.84	171.340	5.43
7210	KAB. SIGI	120.191	8.00	131.549	8.90	3.727	8.59	12.331	9.53	267.798	8.49
7211	KAB. BANGGAI LAUT	38.449	2.56	34.419	2.33	871	2.01	2.862	2.21	76.601	2.43
7212	KAB. MOROWALI UTARA	74.078	4.93	67.782	4.58	1.518	3.50	4.896	3.78	148.274	4.70
7271	KOTA PALU	189.413	12.60	171.946	11.63	7.166	16.52	18.030	13.93	386.555	12.25
TOTAL		1.503.158	100	1.478.548	100	43.367	100	129.426	100	3.154.499	100

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2023)

Tabel 4.14. dapat dilihat bahwa pada status perkawinan di Sulawesi Tengah untuk status belum kawin tertinggi berada pada Kabupaten Parigi Moutong dengan jumlah 215.811 (Dua ratus lima belas ribu delapan ratus sebelas) jiwa sedangkan yang terendah berada pada Kabupaten Banggai Laut yaitu 38.449 (Tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh sembilan) jiwa, untuk status kawin tertinggi berada pada Kabupaten Parigi Moutong dengan jumlah 218.834 (Dua ratus delapan belas ribu delapan ratus tiga puluh empat) jiwa sedangkan yang terendah berada di Kabupaten Banggai Laut dengan jumlah 34.419 (Tiga puluh empat ribu empat ratus Sembilan belas) jiwa, pada status cerai hidup tertinggi berada di Kabupaten Banggai dengan jumlah 7.394 (Tujuh ribu tiga ratus Sembilan puluh empat) jiwa sedangkan yang terendah berada di Kabupaten Banggai Laut yaitu dengan jumlah 871 (Delapan ratus tujuh puluh satu) jiwa, dan untuk status cerai mati tertinggi berada di Kota Palu dengan jumlah 17.126 (Tujuh belas ribu seratus

dua puluh enam) jiwa sedangkan yang terendah berada di Kabupaten Banggai Laut 2.862 (Dua ribu delapan ratus enam puluh dua) jiwa.

e. Angka Perceraian Kasar

Angka Perceraian Kasar menunjukkan jumlah perceraian per 1.000 (Seribu) penduduk terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun untuk satu tahun. Angka ini berguna untuk mengetahui gambaran sosiologi suatu daerah yang berkaitan dengan tingkat perceraian. Angka perceraian kasar ini merupakan indikator perceraian (cerai hidup) yang sangat sederhana tanpa memperhitungkan umur dan jenis kelamin, bagi daerah-daerah yang belum atau tidak ada pencatatan perkawinan dan perceraian serta jumlah penduduk menurut umur. Maka, indikator ini sangat berguna terutama dalam mengembangkan pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian maupun program-program pelayanan keluarga.

**Tabel 4.14
Angka Perceraian Kasar**

KODE	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN	JUMLAH PERCERAIAN DALAM 1 TAHUN	ANGKA PERCERAIAN KASAR
7201	KAB. BANGGAI	372.002	692	1.86
7202	KAB. POSO	250.584	776	3.10
7203	KAB. DONGGALA	311.333	342	1.10
7204	KAB. TOLI TOLI	236.111	523	2.22
7205	KAB. BUOL	156.594	353	2.25
7206	KAB. MOROWALI	179.225	436	2.43
7207	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	126.040	247	1.96
7208	KAB. PARIGI MOUTONG	454.509	1.079	2.37
7209	KAB. TOJO UNA UNA	169.399	562	3.32
7210	KAB. SIGI	264.667	510	1.93
7211	KAB. BANGGAI LAUT	75.495	215	2.85
7212	KAB. MOROWALI UTARA	145.686	402	2.76
7271	KOTA PALU	382.017	1.228	3.21
TOTAL		3.123.662	7.365	31.36

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2023)

Tabel 4.15. Menjelaskan bahwa pada angka perceraian kasar di Tahun 2023 dengan jumlah perceraian dalam 1 (satu) tahun sebesar 7.365 (Tujuh ribu tiga ratus enam puluh lima) jiwa. Jumlah ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022 dengan jumlah 160.932 (Seratus enam puluh ribu Sembilan ratus tiga puluh dua) jiwa.

Berakhirnya suatu perkawinan selain membawa dampak demografi juga mempunyai dampak sosiologi. Dampak demografi dapat mempengaruhi kelahiran dalam arti mengurangi kelahiran, sedangkan dampak sosiologi lebih kepada persepsi masyarakat tentang status cerai terutama bagi perempuan.

f. Angka Perceraian Umum

Angka Perceraian Umum menunjukkan penduduk yang berstatus cerai hidup terhadap jumlah penduduk usia 15 (lima belas) tahun ke atas (penduduk yang terkena resiko perceraian) dalam satu tahun.

Tabel 4.15
Angka Perceraian Umum

KODE	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PERCERAIAN DALAM 1 TAHUN	JUMLAH USIA >15 DALAM PERTENGAHAN TAHUN	ANGKA PERCERAIAN UMUM
7201	KAB. BANGGAI	692	286.699	2.41
7202	KAB. POSO	776	198.810	3.90
7203	KAB. DONGGALA	342	234.558	1.46
7204	KAB. TOLITOLI	523	174.391	3.00
7205	KAB. BUOL	353	112.668	3.13
7206	KAB. MOROWALI	436	131.227	3.32
7207	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	247	95.631	2.58
7208	KAB. PARIGI MOUTONG	1.079	345.393	3.12
7209	KAB. TOJO UNA UNA	562	126.113	4.46
7210	KAB. SIGI	510	200.682	2.54
7211	KAB. BANGGAI LAUT	215	55.652	3.86
7212	KAB. MOROWALI UTARA	402	111.990	3.59
7271	KOTA PALU	1.228	284.760	4.31
TOTAL		7.365	2.358.574	41.70

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2023)

Angka Perceraian Umum menunjukkan penduduk yang berstatus cerai hidup terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas (penduduk yang terkena resiko perceraian) pada suatu tahun tertentu. Tabel 4.16 diatas, menunjukkan angka perceraian umum di Provinsi Sulawesi Tengah.

4.3.3 Keluarga

Informasi tentang jumlah keluarga dan komposisi anggota keluarga, diperlukan dalam perencanaan maupun implementasi kebijakan pemenuhan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, kebutuhan pangan, pengentasan kemiskinan dan sebagainya. Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi, dan lain sebagainya. Keluarga dapat dibagi menjadi 2 (dua) tipe, yaitu:

- Keluarga Inti yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak kandung, anak angkat maupun adopsi yang belum kawin, atau ayah dengan anak-anak yang belum kawin atau ibu dengan anak-anak yang belum kawin.
- Keluarga Luas adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak-anak baik yang sudah kawin atau belum, cucu, orang tua, mertua maupun kerabat-kerabat yang lain yang menjadi tanggungan kepala keluarga.

a. Jumlah Keluarga dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga

Banyaknya jumlah anggota keluarga dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi lingkungan dan kesejahteraan dalam satu keluarga, dimana diasumsikan semakin kecil jumlah anggota keluarga biasanya akan semakin baik tingkat kesejahteraannya. Rata-rata jumlah anggota keluarga biasanya digunakan untuk melihat perubahan paradigma dari keluarga luas menjadi keluarga kecil.

Pada saat sekarang ini sudah mulai muncul adanya keluarga yang terdiri dari 3 (tiga) generasi yaitu generasi orang tua, anak dan menantu dan cucu atau yang biasa disebut dengan *sandwiches family*, dimana pasangan suami istri harus menanggung orang tua/mertua dan anak-anak mereka sendiri. Persoalan yang muncul adalah bagaimana dengan kesejahteraan mereka, bagaimana dengan beban yang mereka

tanggung dan bagaimana sistem pengasuhan baik orang tua maupun anak bisa berlangsung dalam keluarga semacam ini.

Tabel 4.16
Jumlah Keluarga dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga

KODE	KABUPATEN/KOTA	DATA KEPENDUDUKAN				RATA-RATA
		JUMLAH PENDUDUK		KEPALA KELUARGA		
		n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)
7201	KAB. BANGGAI	373.336	11.84	122.954	11.75	3.03
7202	KAB. POSO	251.473	7.97	86.304	8.25	2.91
7203	KAB. DONGGALA	313.482	9.94	100.503	9.61	3.11
7204	KAB. TOLITOLI	238.397	7.56	76.927	7.35	3.09
7205	KAB. BUOL	158.421	5.02	45.938	4.39	3.44
7206	KAB. MOROWALI	183.957	5.83	69.093	6.61	2.66
7207	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	127.834	4.05	42.416	4.05	3.01
7208	KAB. PARIGI MOUTONG	457.031	14.49	145.443	13.90	3.14
7209	KAB. TOJO UNA UNA	171.340	5.43	54.681	5.23	3.13
7210	KAB. SIGI	267.798	8.49	92.295	8.82	2.90
7211	KAB. BANGGAI LAUT	76.601	2.43	24.035	2.30	3.18
7212	KAB. MOROWALI UTARA	148.274	4.70	57.732	5.52	2.56
7271	KOTA PALU	386.555	12.25	127.712	12.21	3.02
TOTAL		3.154.499	100	1.046.033	100	3.01

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2023)

Tabel 4.17 diatas dapat dilihat bahwa, rata-rata jumlah anggota keluarga di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 3.01 artinya bahwa rata-rata jumlah anggota keluarga di Provinsi Sulawesi Tengah berkisar antara 3-4 jiwa dan ini merupakan keluarga inti.

b. Hubungan dengan Kepala Keluarga

Hubungan dengan kepala keluarga digunakan untuk melihat banyaknya kepala keluarga menurut jenis kelamin, pola pengaturan tinggal bersama dan pola pengasuhan anak dalam keluarga tersebut. Setiap anggota dalam keluarga mempunyai status hubungan dengan kepala keluarga seperti suami, istri, anak, menantu, cucu, keponakan,

orang tua dan mertua, termasuk adanya orang lain yang tinggal bersama seperti pembantu rumah tangga.

Tabel 4.17
Hubungan dengan Kepala Keluarga

STATUS HUBUNGAN KELUARGA	JENIS KELAMIN				JUMLAH	%
	LAKI-LAKI	%	PEREMPUAN	%		
KEPALA KELUARGA	851.784	53	194.249	13	1.046.033	33
SUAMI	25	0	0	0	25	0
ISTRI	0	0	686.026	45	686.026	22
ANAK	737.498	46	625.564	41	1.363.062	43
MENANTU	19	0	31	0	50	0
CUCU	10.112	1	8.279	1	18.391	1
ORANG TUA	1.049	0	4.461	0	5.510	0
MERTUA	455	0	2.237	0	2.692	0
FAMILI LAIN	17.019	1	14.403	1	31.422	1
PEMBANTU	15	0	14	0	29	0
LAINNYA	477	0	782	0	1.259	0
TOTAL	1.618.453	100	1.536.046	100	3.154.499	100

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2023)

Tabel 4.18, menunjukkan bahwa kepala keluarga laki-laki sebanyak 851.784 (Delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh empat) jiwa, istri sebanyak 672.063 (Enam ratus tujuh puluh dua ribu enam puluh tiga) jiwa, dan terdapat 187.712 (Seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua belas) kepala keluarga perempuan tanpa bersuami. Hal ini menunjukkan bahwa kepala keluarga perempuan pada umumnya berstatus lajang baik mereka yang belum pernah kawin maupun mereka yang berstatus janda. Perempuan berstatus kepala keluarga ini perlu mendapatkan perhatian lebih, karena pada umumnya keluarga yang dikepalai oleh kepala keluarga perempuan mempunyai tingkat kesejahteraan lebih rendah dibandingkan keluarga yang dikepalai oleh laki-laki.

c. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Umur dan Status Kawin

Informasi tentang Kelompok Umur dari kepala keluarga dan anggota keluarga penting untuk diketahui terutama untuk melakukan analisis kondisi demografi keluarga serta perencana kebijakan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, kemiskinan, dan lain-lain.

Tabel 4.18
Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Umur

KELOMPOK UMUR	KEPALA KELUARGA					
	LAKI-LAKI	%	PEREMPUAN	%	JUMLAH	%
15-19	3.830	0	2.445	1	6.275	1
20-24	40.463	5	9.550	5	50.013	5
25-29	80.307	9	11.702	6	92.009	9
30-34	99.238	12	11.445	6	110.683	11
35-39	105.271	12	12.189	6	117.460	11
40-44	115.861	14	14.839	8	130.700	12
45-49	102.180	12	16.568	9	118.748	11
50-54	94.993	11	19.900	10	114.893	11
55-59	71.055	8	21.275	11	92.330	9
60-64	52.385	6	20.873	11	73.258	7
65-69	37.251	4	19.358	10	56.609	5
70-74	23.713	3	14.574	8	38.287	4
>75	25.237	3	19.531	10.05	44.768	4
TOTAL	851.784	100	194.249	100	1.046.033	100

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2023)

Dapat dilihat pada tabel 4.19. Menunjukkan bahwa di Provinsi Sulawesi Tengah proporsi Kepala Keluarga tertinggi berada pada kelompok umur 40-44 tahun yaitu 12 persen dengan jumlah sebanyak 130.700 (Seratus tiga puluh tujuh ratus) jiwa dan proporsi kepala keluarga tertinggi berada di kelompok umur 40-44 tahun yaitu 14 persen dengan jumlah sebanyak 115.861 (Seratus lima belas ribu delapan ratus enam puluh satu) jiwa, sedangkan proporsi kepala keluarga Perempuan tertinggi berada di kelompok

umur 55-59 tahun yaitu 11 persen dengan jumlah sebanyak 21.275 (dua puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima) jiwa.

d. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik kepala keluarga menurut jenis kelamin dapat menunjukkan seberapa banyak perempuan yang menjadi kepala keluarga, bagaimana kecenderungannya dimasa depan dan bagaimana gambaran sosial ekonomi keluarga yang dikepalai oleh seorang perempuan.

Tabel 4.19
Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin

KODE	KABUPATEN/KOTA	KEPALA KELUARGA				JUMLAH	
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN		PERSENTASE	
		n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
7201	KAB. BANGGAI	98.886	11.61	24.068	12.39	122.954	11.75
7202	KAB. POSO	69.313	8.14	16.991	8.75	86.304	8.25
7203	KAB. DONGGALA	82.662	9.70	17.841	9.18	100.503	9.61
7204	KAB. TOLI TOLI	62.152	7.30	14.775	7.61	76.927	7.35
7205	KAB. BUOL	39.008	4.58	6.930	3.57	45.938	4.39
7206	KAB. MOROWALI	57.936	6.80	11.157	5.74	69.093	6.61
7207	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	34.395	4.04	8.021	4.13	42.416	4.05
7208	KAB. PARIGI MOUTONG	120.806	14.18	24.637	12.68	145.443	13.90
7209	KAB. TOJO UNA UNA	44.257	5.20	10.424	5.37	54.681	5.23
7210	KAB. SIGI	75.156	8.82	17.139	8.82	92.295	8.82
7211	KAB. BANGGAI LAUT	19.435	2.28	4.600	2.37	24.035	2.30
7212	KAB. MOROWALI UTARA	48.239	5.66	9.493	4.89	57.732	5.52
7271	KOTA PALU	99.539	11.69	28.173	14.50	127.712	12.21
TOTAL		851.784	100	194.249	100	1.046.033	100

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2023)

Tabel 4.20 diatas menunjukkan bahwa di Provinsi Sulawesi Tengah 81.43 persen dikepalai oleh laki-laki dan 18.57 persen dikepalai oleh Perempuan, dengan adanya kepala keluarga yang dikepalai oleh perempuan diduga menggambarkan tingkat

perceraian yang terjadi baik cerai hidup maupun cerai mati dan juga menggambarkan gaya hidup modern yakni karena kemandiriannya maka perempuan berani untuk hidup sendiri. Masyarakat Indonesia cenderung menganggap bahwa laki-laki adalah penanggungjawab ekonomi keluarga sekaligus sebagai kepala keluarga. Namun dalam kenyataannya tidak sedikit perempuan yang menjadi kepala keluarga karena pasangan meninggal, cerai, atau sebab-sebab yang lain.

Penambahan persentase kepala keluarga perempuan tersebut dapat juga menggambarkan tingkat perceraian (baik cerai hidup maupun cerai mati) yang terjadi dan juga dapat menggambarkan salah satu trend gaya hidup moderen.

e. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin

Dalam konsep demografi kepala keluarga merupakan seseorang baik laki-laki maupun perempuan, berstatus menikah maupun tidak, yang mempunyai peran, fungsi dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga secara ekonomi, sosial maupun psikologi. Karakteristik kepala keluarga berdasarkan status kawin dapat digunakan untuk melihat jumlah keluarga yang dikepalai oleh lajang maupun mereka yang berstatus cerai baik hidup maupun mati.

Tabel 4.20
Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin

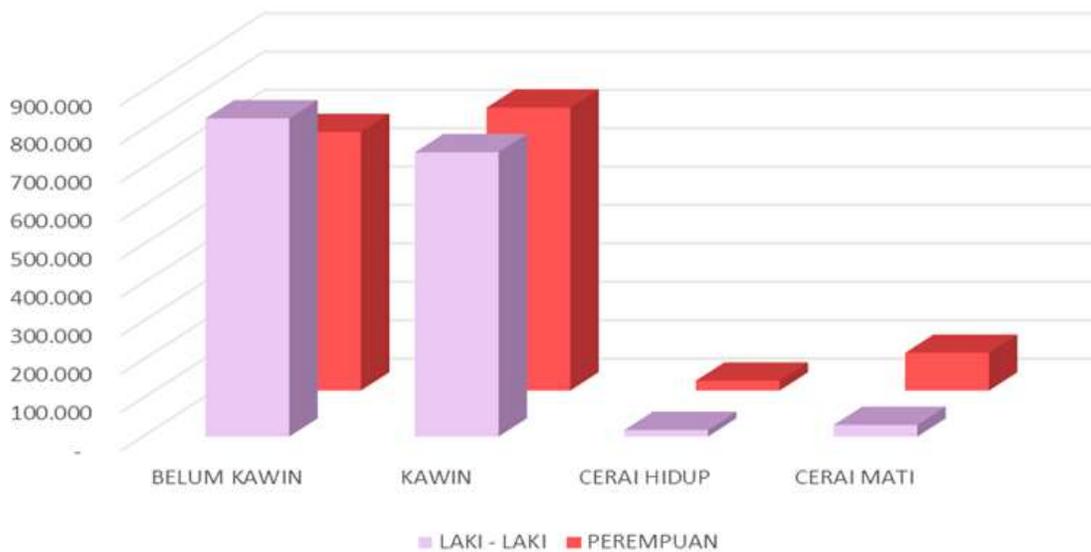
STATUS PERKAWINAN	KEPALA KELUARGA				JUMLAH PERSENTASE	
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		n (jiwa)	%
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%		
BELUM KAWIN	66.144	8	29.157	15	95.301	9
KAWIN	739.533	87	47.662	25	787.195	75
CERAI HIDUP	16.747	2	24.879	13	41.626	4
CERAI MATI	29.360	3	92.551	48	121.911	12
TOTAL	851.784	100	194.249	100	1.046.033	100

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2023)

Diagram 4.1
Data Kependudukan berdasarkan Status Perkawinan dan Jenis Kelamin
Provinsi Sulawesi Tengah



Grafik 4.2
Data Kependudukan berdasarkan Status Perkawinan dan Jenis Kelamin
Provinsi Sulawesi Tengah



Dapat dilihat bahwa, secara keseluruhan kepala keluarga di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 berstatus kawin yakni 75 persen dan adanya kepala keluarga yang berstatus belum kawin (lajang) yang besarnya 9 persen, selanjutnya persentase kepala keluarga berstatus cerai (baik cerai hidup maupun cerai mati) sebesar 16 persen.

Jika dikaitkan dengan jenis kelamin terlihat bahwa kepala keluarga yang berstatus kawin didominasi oleh laki-laki 87 persen, sedangkan kepala keluarga perempuan yang berstatus kawin lebih rendah yaitu 25 persen. Selanjutnya, dari tabel tersebut terlihat bahwa persentase kepala keluarga laki-laki yang berstatus belum kawin (lajang) persentasenya lebih rendah yakni 8 persen daripada kepala keluarga perempuan yang berstatus lajang yakni 15 persen.

Apabila diperhatikan lebih lanjut kepala keluarga laki-laki berstatus cerai (cerai hidup dan cerai mati) persentasenya lebih rendah yakni 5 persen daripada kepala keluarga perempuan yang berstatus cerai (cerai hidup dan cerai mati) yakni 61 persen.

f. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan yang dicapai merupakan salah satu indikator kualitas hidup manusia serta menunjukkan status sosial dan status kesejahteraan seseorang. Semakin tinggi Pendidikan yang dicapai oleh seorang kepala keluarga diharapkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan keluarga.

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan, maka kepala keluarga yang mempunyai pendidikan rendah diduga mempunyai pendapatan yang rendah, sehingga diduga mereka tidak mampu memberikan pendidikan yang tinggi bagi anggota keluarganya. Biasanya kepala keluarga yang berpendidikan rendah akan bekerja di sektor informal. Untuk itu jenjang Pendidikan yang dicapai oleh kepala keluarga dapat digunakan untuk melihat gambaran kualitas sosial maupun ekonomi keluarga.

Tabel 4.21
Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Pendidikan

PENDIDIKAN TERAKHIR	KEPALA KELUARGA				JUMLAH PERSENTASE	
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		n(jiwa)	%
	n(jiwa)	%	n(jiwa)	%		
TIDAK/BELUM SEKOLAH	26.252	3	10.954	6	37.206	4
BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	26.763	3	10.256	5	37.019	4
TAMAT SD/SEDERAJAT	293.230	34	83.606	43	376.836	36
SLTP/SEDERAJAT	148.064	17	29.057	15	177.121	17
SLTA/SEDERAJAT	272.662	32	42.278	22	314.940	30
DIPLOMA VII	5.624	1	1.874	1	7.498	1
AKADEMI/DIPLOMA III/SARJANA MUDA	9.244	1	2.924	2	12.168	1
DIPLOMA IV/STRATA I	63.513	7	12.363	6	75.876	7
STRATA II	5.859	1	870	0	6.729	1
STRATA III	573	0	67	0	640	0
TOTAL	851.784	100	194.249	100	1.046.033	100

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2023)

Tabel ini menunjukkan bahwa sebagian besar kepala keluarga yang berpendidikan Tamat SD/Sederajat yaitu sebesar 36 persen disusul SLTA/Sederajat yaitu sebesar 30 persen, dan SLTP/Sederajat sebesar 17 persen. Proporsi kepala keluarga yang berpendidikan DI, DII, DIII hanya sebesar 1 persen, SI sebesar 7 persen, SII sebesar 1 persen dan SIII sebesar 0 persen. Kepala Keluarga yang tidak sekolah persentasenya mencapai 4 persen.

Apabila dilihat dari tingkat pendidikannya, maka kepala keluarga yang mempunyai pendidikan rendah diduga mempunyai pendapatan yang rendah, sehingga diduga

mereka tidak mampu memberikan Pendidikan yang tinggi bagi anggota keluarganya. Biasanya kepala keluarga yang berpendidikan rendah akan bekerja di sektor informal.

g. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Pekerjaan

Status ekonomi keluarga dapat dilihat dari kegiatan ekonomi kepala keluarga maupun anggota serta seberapa besar sumbangan, mereka terhadap ekonomi keluarga. Oleh sebab itu informasi mengenai kepala keluarga menurut status pekerjaan perlu diketahui untuk perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk.

Tabel 4.22
Kepala Keluarga Berdasarkan Status Pekerjaan

STATUS BEKERJA	KEPALA KELUARGA					
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	n(jiwa)	%	n(jiwa)	%	n(jiwa)	%
BEKERJA	791.495	92.92	55.383	28.51	846.878	80.96
BELUM/TIDAK BEKERJA	39.467	4.63	15.493	7.98	54.960	5.25
PELAJAR/MAHASISWA	10.182	1.20	6.532	3.36	16.714	1.60
PENSIUNAN	10.481	1.23	2.807	1.45	13.288	1.27
MENGURUS RUMAH TANGGA	159	0.02	114.034	58.71	114.193	10.92
TOTAL	851.784	100	194.249	100	1.046.033	100

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2023)

Dilihat dari kegiatan ekonomi, bahwa sekitar 80.96 persen kepala keluarga di Provinsi Sulawesi Tengah bekerja. Angka ini lebih tinggi pada kepala keluarga laki-laki dibandingkan kepala keluarga perempuan, ini menunjukkan bahwa akses terhadap pekerjaan untuk perempuan terbatas. Sementara itu, sekitar 5,25 persen kepala keluarga sedang mencari pekerjaan atau belum/tidak bekerja. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan adanya keluarga yang dikepalai

oleh kepala keluarga yang tidak bekerja, walaupun persentase mereka kecil, sehingga pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah perlu membuat perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk. Selanjutnya, tabel di atas juga menunjukkan kepala keluarga yang berstatus mengurus rumah tangga, baik laki-laki maupun perempuan yaitu 10,92 persen. Selanjutnya, dari tabel tersebut adanya kepala keluarga yang sudah pensiun.

Sebagian besar kepala keluarga di Provinsi Sulawesi Tengah berstatus bekerja, Proporsi kepala keluarga laki-laki (92.92%) lebih besar dibandingkan kepala keluarga perempuan (28.51%). Hal ini menunjukkan bahwa peran dan fungsi laki-laki adalah penanggungjawab ekonomi keluarga sehingga lebih banyak yang harus terjun ke pasar kerja, sementara perempuan biasanya hanya berfungsi sebagai ibu rumah tangga yang bertanggungjawab atas terselenggaranya keluarga yang bersangkutan.

Hal perlu menjadi perhatian adanya keluarga yang dikepalai oleh kepala keluarga yang tidak bekerja. Untuk kepala keluarga yang masih berstatus pelajar/mahasiswa, dapat dimungkinkan bahwasanya penduduk itu hidup sendiri atau hidup tidak dengan orang tuanya. Hal ini dapat terjadi mungkin saja dikarenakan hidup merantau.

1.3.4 Penduduk Menurut Karakteristik Sosial

a. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Bagian ini menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk berdasarkan jenjang pendidikan terakhir yang ditamatkan di suatu provinsi pada waktu tertentu yang disajikan berdasarkan jenis kelamin per Kabupaten/Kota dalam bentuk tabel.

Informasi tentang jumlah penduduk menurut pendidikan ini menunjukkan karakteristik penduduk berdasarkan jenjang pendidikan dan gambaran pencapaian pembangunan pendidikan di suatu Kabupaten/Kota sekaligus kualitas sumber daya manusia.

Tabel 4.23
Penduduk Berdasarkan Jenis Pendidikan

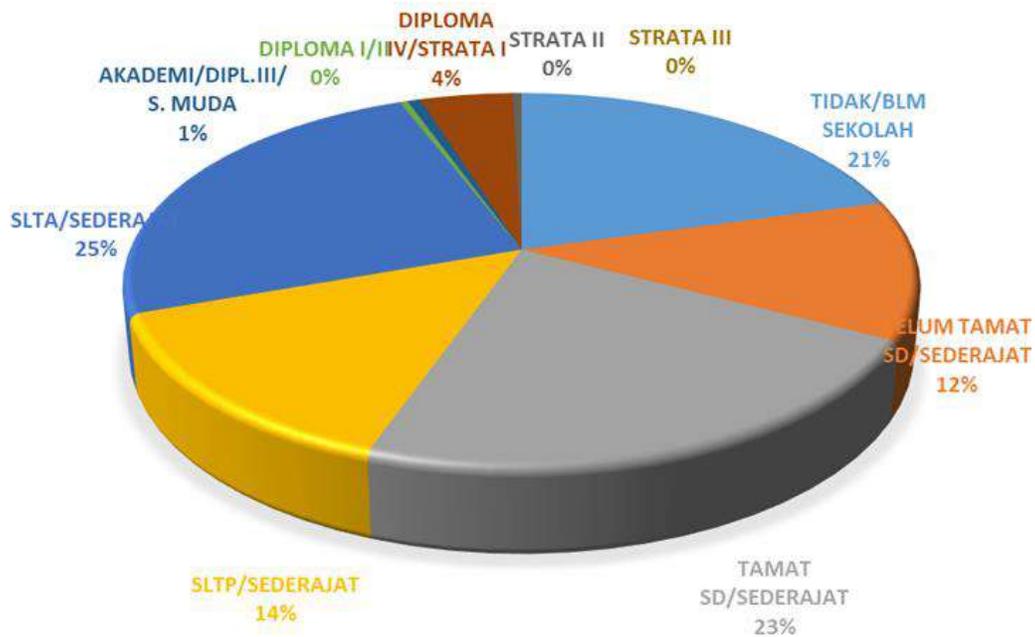
JENIS PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN				JUMLAH	
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		PERSENTASE	
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
TIDAK/BELUM SEKOLAH	334.462	20.67	311.751	20.30	646.213	20.49
BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	194.722	12.03	179.417	11.68	374.139	11.86
TAMAT SD/SEDERAJAT	367.682	22.72	373.142	24.29	740.824	23.48
SLTP/SEDERAJAT	228.988	14.15	223.201	14.53	452.189	14.33
SLTA/SEDERAJAT	397.830	24.58	323.846	21.08	721.676	22.88
DIPLOMA VII	6.007	0.37	10.059	0.65	16.066	0.51
AKADEMI I/DIPLOMA III/S.MUDA	10.239	0.63	22.013	1.43	32.252	1.02
DIPLOMA IV/STRATA I	71.847	4.44	87.739	5.71	159.586	5.06
STRATA II	6.093	0.38	4.611	0.30	10.704	0.34
STRATA III	583	0.04	267	0.02	850	0.03
TOTAL	1.618.453	100	1.536.046	100	3.154.499	100

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2023)

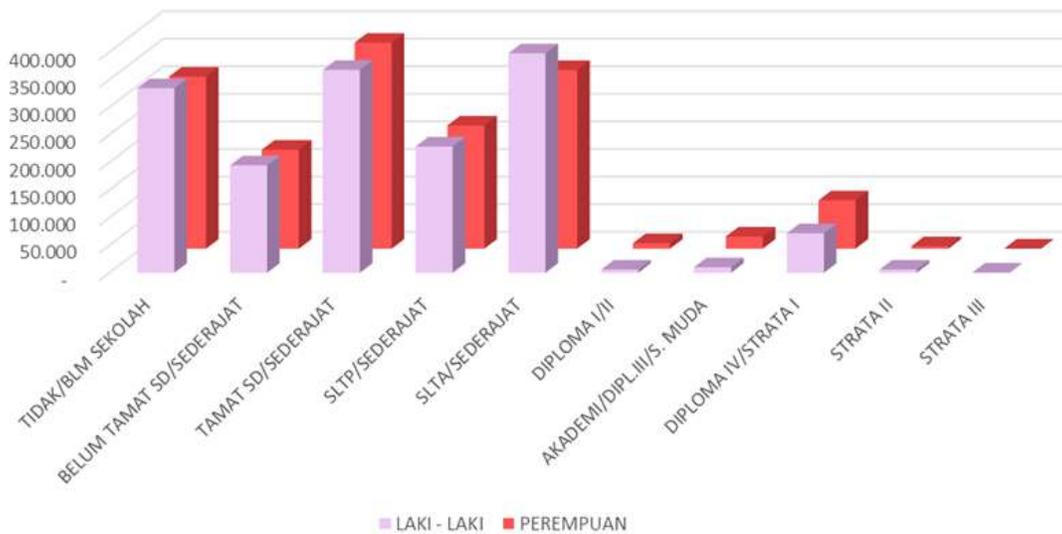
Tabel 4.24 di atas terlihat bahwa penduduk Provinsi Sulawesi Tengah 23.48 persen berpendidikan Tamat SD/Sederajat. Persentase penduduk perempuan yang berpendidikan Tamat SD/Sederajat lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki yang tamat SD/Sederajat. Hal ini mencerminkan bahwa partisipasi penduduk perempuan untuk bersekolah lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki. Akan tetapi, untuk tingkat yang lebih tinggi, presentase yang menamatkan lebih rendah.

Pada jenjang Pendidikan Menengah Atas untuk perempuan lebih rendah dibandingkan dengan presentase untuk laki-laki. Akan tetapi, untuk tingkat yang lebih tinggi, persentase yang menamatkan lebih rendah untuk laki-laki dibandingkan untuk perempuan, kecuali jenjang S2 dan S3. Hal ini menunjukkan masih adanya ketimpangan gender dalam hal pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Diagram 4.2
Data Kependudukan berdasarkan Pendidikan Akhir dan Jenis Kelamin
Provinsi Sulawesi Tengah



Grafik 4.3
Data Kependudukan berdasarkan Pendidikan Akhir dan Jenis Kelamin
Provinsi Sulawesi Tengah



b. Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan

Pada jenjang Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan pada tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas), Diploma I/II, Akademi DIII, Diploma IV/SI, SII dan SIII, Kota Palu lebih tinggi persentase yang menamatkan dibandingkan Kabupaten lainnya.

Tabel 4.24
Penduduk Berdasarkan Jenis Pendidikan Kabupaten/Kota

NO.	KABUPATEN/KOTA	TIDAK/ BELUM SEKOLAH	BELUM TAMAT SD	TAMAT SD/ SEDERAJAT	SLTP/ SEDERAJAT	SLTA/ SEDERAJAT	DIPLOMA VII	AKADEMI D III SARMUD	DIPLOMA I/II	SII	SIII	JUMLAH
1	KAB. BANGGAI	66.418	37.882	105.848	56.387	82.276	1.802	3.335	18.411	948	29	373.336
2	KAB. POSO	43.025	24.160	54.451	43.085	69.610	1.454	2.517	12.472	660	39	251.473
3	KAB. DONGGALA	73.990	39.190	82.192	50.770	55.365	1.208	2.582	7.892	262	31	313.482
4	KAB. TOLITOLI	50.519	28.683	66.995	34.808	42.193	1.125	1.965	11.584	506	19	238.397
5	KAB. BUOL	36.862	28.050	34.324	21.659	28.169	1.050	960	7.168	171	8	158.421
6	KAB. MOROWALI	41.266	16.757	32.359	22.906	56.018	994	2.397	10.911	335	14	183.957
7	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	23.427	13.596	40.449	18.411	23.456	632	1.156	6.475	228	4	127.834
8	KAB. PARIGI MOUTONG	90.946	63.012	129.372	66.150	91.340	1.894	2.319	11.543	441	14	457.031
9	KAB. TOJO UNA UNA	32.035	20.997	48.403	24.761	34.666	1.009	1.934	7.298	230	7	171.340
10	KAB. SIGI	55.831	29.830	68.653	38.803	58.441	1.460	2.713	11.183	824	60	267.798
11	KAB. BANGGAI LAUT	33.619	9.206	11.628	6.801	9.675	297	845	4.373	157	-	76.601
12	KAB. MOROWALI UTARA	27.835	14.516	27.435	20.348	46.774	733	1.771	8.593	257	12	148.274
13	KOTA PALU	70.440	48.260	38.715	47.300	123.693	2.408	7.758	41.683	5.685	613	386.555
	TOTAL	646.213	374.139	740.824	452.189	721.676	16.066	32.252	159.586	10.704	850	3.154.499

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2023)

c. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Bagian ini menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk berdasarkan agama di suatu kabupaten/kota pada waktu tertentu yang disajikan per Kabupaten/Kota dalam bentuk tabel. Dari tabel ini akan diketahui karakteristik penduduk berdasarkan pemeluk agama (Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, Buddha, Khonghucu dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa).

Informasi tentang jumlah penduduk berdasarkan agama diperlukan untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan serta merencanakan suatu program kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama.

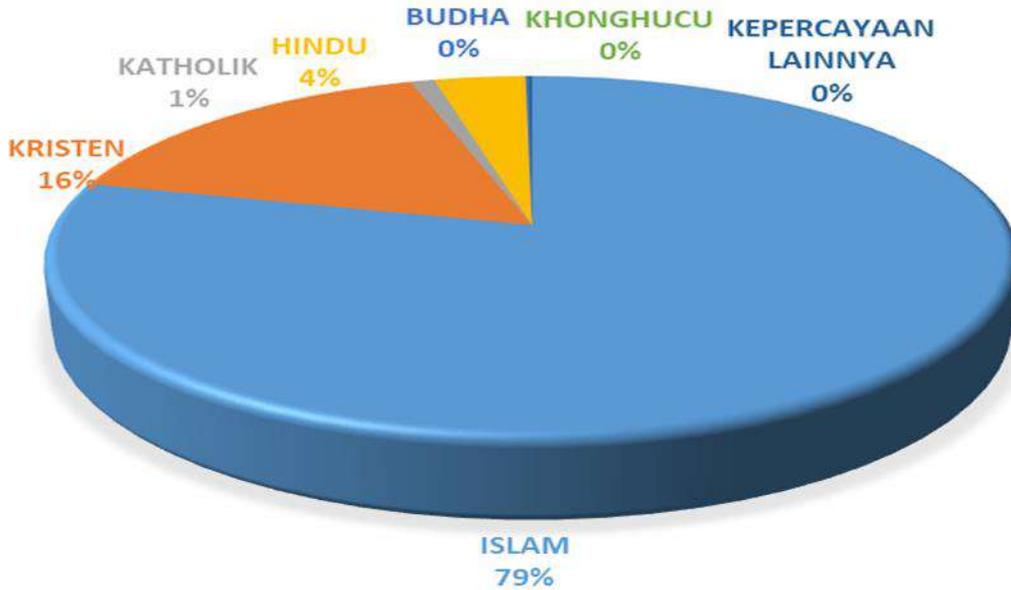
Dari tabel dibawah ini dapat kita lihat bahwa penduduk yang beragama Islam dengan jumlah sebesar 2.496.568 (Dua juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus enam puluh delapan) jiwa. Jumlah ini menunjukkan bahwa penduduk yang beragama Islam lebih mendominasi jumlahnya dibandingkan dengan penduduk yang beragama Kristen, Katholik, Hindu, Buddha, Khonghucu dan kepercayaan lainnya.

Tabel 4.25
Penduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin

AGAMA	JENIS KELAMIN				JUMLAH	
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		PERSENTASE	
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
ISLAM	1.277.406	78.93	1.219.162	79.37	2.496.568	79.14
KRISTEN	263.361	16.27	245.387	15.98	508.748	16.13
KATHOLIK	15.279	0.94	13.663	0.89	28.942	0.92
HINDU	58.361	3.61	54.156	3.53	112.517	3.57
BUDDHA	2.122	0.13	2.080	0.14	4.202	0.13
KHONGHUCU	9	0.00	13	0.00	22	0.00
KEPERCAYAAN LAINNYA	1.915	0.12	1.585	0.10	3.500	0.11
TOTAL	1.618.453	100	1.536.046	100	3.154.499	100

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2023)

Diagram 4.3
Data Kependudukan berdasarkan Agama dan Jenis Kelamin
Provinsi Sulawesi Tengah



Grafik 4.4
Data Kependudukan berdasarkan Agama dan Jenis Kelamin
Provinsi Sulawesi Tengah



Tabel 4.26
Penduduk Menurut Agama Kabupaten/Kota

KODE	KABUPATEN/KOTA	AGAMA						
		ISLAM (JWA)	KRISTEN (JWA)	KATHOLIK (JWA)	HINDU (JWA)	BUDDHA (JWA)	KHONGHUCU (JWA)	KEPERCAYAAN LAINNYA (JWA)
7201	KAB. BANGGAI	289.040	52.955	5.237	25.696	394	8	6
7202	KAB. POSO	99.317	135.589	2.224	14.322	18	1	2
7203	KAB. DONGGALA	282.953	20.483	435	9.446	146	3	16
7204	KAB. TOLITOLI	222.674	10.462	834	3.118	1.304	3	2
7205	KAB. BUOL	150.877	3.178	1.742	2.374	250	0	0
7206	KAB. MOROWALI	170.089	7.305	1.315	5.104	107	2	35
7207	KAB. BANGGAIKEPULAUAN	78.928	44.227	4.616	51	8	4	0
7208	KAB. PARIGIMOUTONG	374.258	37.709	2.235	42.734	95	0	0
7209	KAB. TOJO UNA UNA	158.108	10.894	257	715	57	0	1309
7210	KAB. SIGI	182.488	83.851	883	465	108	0	3
7211	KAB. BANGGAILAUT	66.863	7.110	2.585	38	5	0	0
7212	KAB. MOROWALI UTARA	79.652	59.332	3.128	4.013	22	0	2127
7271	KOTA PALU	341.321	35.653	3.451	4.441	1.688	1	0
TOTAL		2.496.568	508.748	28.942	112.517	4.202	22	3.500
%		79.14	16.13	0.92	3.57	0.13	0.00	0.11

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2023)

Dari tabel di atas terlihat bahwa 79.14 persen penduduk Provinsi Sulawesi Tengah beragama Islam. Agama kedua yang dianut penduduk Provinsi Sulawesi Tengah adalah Kristen yakni 16.13 persen, selanjutnya 3,57 persen penduduknya beragama Hindu, dan hanya Sebagian kecil yang menganut agama Katholik, Buddha, Konghucu, serta Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

d. Jumlah Penduduk Menurut Disabilitas

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang

serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

Bagian ini menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk berdasarkan jenis kecacatan (Tuna Netra, Tuna Rungu, Tuna Wicara, Tuna Grahita, dan lain-lain) yang disajikan dalam bentuk tabel.

Data ini sangat diperlukan dalam melakukan perencanaan pelayanan yang akan diberikan kepada penduduk dengan kategori khusus.

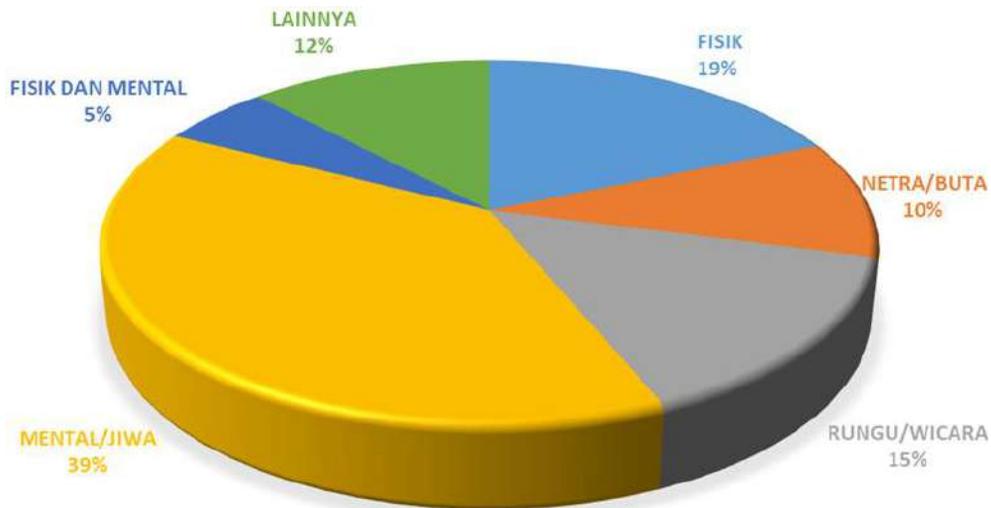
Tabel 4.27
Penduduk Menurut Disabilitas dan Jenis Kelamin

NO	JENIS KECACATAN	JENIS KELAMIN				JUMLAH	
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN		PERSENTASE	
		n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
1	FISIK	559	18.63	387	18.75	946	18.68
2	NETRA/BUTA	314	10.46	220	10.66	534	10.54
3	RUNGU/WICARA	440	14.66	343	16.62	783	15.46
4	MENTAL/JIWA	1163	38.75	705	34.16	1.868	36.88
5	FISIK DAN MENTAL	164	5.46	94	4.55	258	5.09
6	LAINNYA	361	12.03	315	15.26	676	13.35
TOTAL		3.001	100	2.064	100	5.065	100

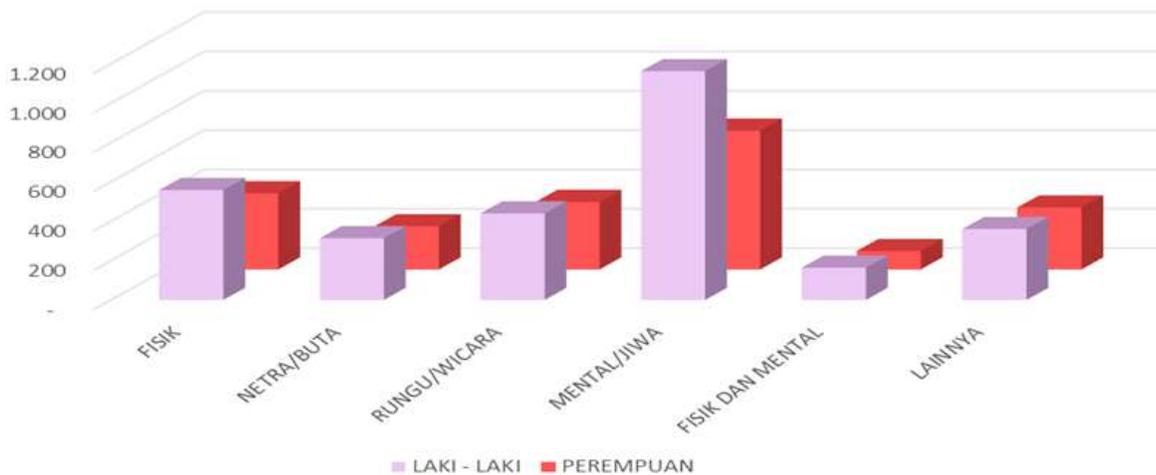
Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2023)

Dari tabel di atas terlihat bahwa 36.88 persen penduduk Provinsi Sulawesi Tengah mengalami cacat mental dan jiwa, serta menempati urutan kedua yakni 18.68 persen cacat fisik, kemudian cacat ganda (fisik dan mental) menempati urutan paling rendah yakni 5.09 persen.

Diagram 4.4
Data Kependudukan berdasarkan Disabilitas dan Jenis Kelamin
Provinsi Sulawesi Tengah



Grafik 4.5
Data Kependudukan berdasarkan Disabilitas dan Jenis Kelamin
Provinsi Sulawesi Tengah



1.3.5 Kelahiran

Kelahiran merupakan salah satu komponen pertumbuhan penduduk yang bersifat menambah jumlah penduduk. Banyaknya kelahiran membawa konsekuensi pada pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang bayi, dari pemenuhan gizi, perawatan kesehatan ibu dan anak, dan pada gilirannya membutuhkan fasilitas pendidikan termasuk

pemenuhan kesempatan kerja. Tingkat kelahiran di masa lalu akan mempengaruhi tinggi rendahnya jumlah kelahiran di masa kini, sehingga pengetahuan tentang kelahiran beserta indikator-indikatornya, termasuk keluarga berencana sangat berguna bagi para penentu kebijakan maupun perencana dalam menyusun program-program pembangunan sosial terutama terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan ibu, anak dan pembangunan keluarga.

a. Angka Kelahiran Umum

Informasi tentang jumlah kelahiran bermanfaat untuk perencanaan pembangunan berbagai fasilitas yang dibutuhkan khususnya pengembangan fasilitas kesehatan ibu dan anak, baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang. Selain itu, data tentang jumlah kelahiran hidup merupakan dasar untuk perhitungan berbagai indikator kelahiran lainnya. Jumlah kelahiran didefinisikan sebagai banyaknya kelahiran hidup yang terjadi pada waktu tertentu pada wilayah tertentu.

Tabel 4.28
Jumlah Angka Kelahiran Umum

KODE	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH LAHIR	PEREMPUAN USIA 15-49 TAHUN	GFR
7201	KAB. BANGGAI	2.719	101.779	26.71
7202	KAB. POSO	1.619	68.269	23.72
7203	KAB. DONGGALA	1.565	83.447	18.75
7204	KAB. TOLI TOLI	1.982	62.877	31.52
7205	KAB. BUOL	1.691	42.268	40.01
7206	KAB. MOROWALI	2.814	47.215	59.6
7207	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	1.061	34.245	30.98
7208	KAB. PARIGI MOUTONG	3.475	125.564	27.68
7209	KAB. TOJO UNA UNA	1.784	45.725	39.02
7210	KAB. SIGI	1.854	71.744	25.84
7211	KAB. BANGGAI LAUT	447	21.468	20.82
7212	KAB. MOROWALI UTARA	1.599	37.790	42.31
7271	KOTA PALU	4.042	106.148	38.08
T O T A L		26.652	848.539	31.41

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2023)

b. Angka Kelahiran Kasar

Angka Kelahiran Kasar atau crude birth rate-CBR menunjukkan banyaknya kelahiran di suatu wilayah pada tahun tertentu per 1.000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Angka kelahiran kasar merupakan ukuran yang paling mudah dihitung tetapi masih kasar karena tidak memperhitungkan jumlah penduduk yang beresiko melahirkan (laki-laki, anak-anak, dan orang tua). Angka kelahiran kasar ini berguna untuk mengetahui tingkat kelahiran yang terjadi di suatu daerah tertentu pada tahun tertentu.

Tabel 4.29
Jumlah Angka Kelahiran Kasar

KODE	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KELAHIRAN	JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN	CBR
7201	KAB. BANGGAI	2.719	372.002	7.31
7202	KAB. POSO	1.619	250.584	6.46
7203	KAB. DONGGALA	1.565	311.333	5.03
7204	KAB. TOLI TOLI	1.982	236.111	8.39
7205	KAB. BUOL	1.691	156.594	10.8
7206	KAB. MOROWALI	2.814	179.225	15.7
7207	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	1.061	126.040	8.42
7208	KAB. PARIGI MOUTONG	3.475	454.509	7.65
7209	KAB. TOJO UNA UNA	1.784	169.399	10.53
7210	KAB. SIGI	1.854	264.667	7.01
7211	KAB. BANGGAI LAUT	447	75.495	5.92
7212	KAB. MOROWALI UTARA	1.599	145.686	10.98
7271	KOTA PALU	4.042	382.017	10.58
TOTAL		26.652	3.123.662	114.78

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2023)

1.3.6 Kematian

Angka Kematian merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi jumlah penduduk. World Health Organization (WHO) mengartikan bahwa kematian merupakan

suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup dan terjadi dikalangan apapun. Angka kematian mempengaruhi masalah sosial, ekonomi, adat istiadat maupun Kesehatan pada wilayah tersebut. Tinggi rendahnya angka kematian disuatu wilayah mencerminkan kondisi Kesehatan penduduk disuatu daerah tertentu. Angka kematian kasar merupakan angka yang menunjukkan besarnya angka kematian yang terjadi pada tahun tertentu per 1.000 penduduk. Angka kematian kasar merupakan indikator sederhana yang tidak memperhitungkan pengaruh umur penduduk dan jenis kelamin.

Tabel 4.30
Jumlah Angka Kematian Kasar

KODE	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KEMATIAN 2023	JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN	ANGKA KEMATIAN KASAR
7201	KAB. BANGGAI	2.755	372.002	7.41
7202	KAB. POSO	2.037	250.584	8.13
7203	KAB. DONGGALA	1.403	311.333	4.51
7204	KAB. TOLI TOLI	1.280	236.111	5.42
7205	KAB. BUOL	793	156.594	5.06
7206	KAB. MOROWALI	716	179.225	3.99
7207	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	1.018	126.040	8.08
7208	KAB. PARIGI MOUTONG	4.060	454.509	8.93
7209	KAB. TOJO UNA UNA	1.273	169.399	7.51
7210	KAB. SIGI	1.964	264.667	7.42
7211	KAB. BANGGAI LAUT	496	75.495	6.57
7212	KAB. MOROWALI UTARA	839	145.686	5.76
7271	KOTA PALU	3.653	382.017	9.56
TOTAL		22.287	3.123.662	7.13

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2023)

Jumlah pelaporan kematian penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan data konsolidasi bersih (DKB) Semester II tahun 2023 adalah 22.287 Jiwa sedangkan angka kematian kasar 7.13. tabel diatas menunjukkan kematian tertinggi terjadi pada Kabupaten Parigi Moutong sebesar 4.060 Jiwa.

4.3 Kesehatan

1. Kelahiran

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai kekayaan alam dan budaya yang telah dimanfaatkan sejak dulu kala. Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah salah satu warisan budaya yang saat ini sedang dikembangkan dan sejalan dengan adanya tren “Gaya Hidup Kembali ke Alam” yang semakin diminati oleh kalangan masyarakat. Pelayanan kesehatan tradisional saat ini dapat dimanfaatkan dalam pemeliharaan kesehatan secara mandiri dalam bentuk asuhan mandiri kesehatan tradisional ramuan dengan pemanfaatan Taman Obat Keluarga (TOGA) dan keterampilan dengan akupresur.

Angka kelahiran adalah bilangan yang menunjukkan jumlah bayi yang lahir hidup dari setiap 1.000 penduduk dalam satu tahun. Umumnya, angka kelahiran dihitung dengan jumlah kelahiran hidup per seribu penduduk setiap tahunnya.

Tabel 4.31
Jumlah Kelahiran dalam 1 Tahun

NO	KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS	JUMLAH LAHIR HIDUP
1	Banggai Kepulauan	14	1.718
2	Banggai	27	6.116
3	Morowali	11	3.878
4	Poso	24	2.959
5	Donggala	18	7.248
6	Toli-Toli	15	4.600
7	Buol	13	4.010
8	Parigi Moutong	23	7.747
9	Tojo Una Una	16	2.851
10	Sigi	19	5.213
11	Banggai Laut	10	1.260
12	Morowali Utara	14	3.302
13	Kota Palu	14	7.156
JUMLAH (KAB/KOTA)		218	58.058

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2023

Dari tabel 4.29 menunjukkan bahwa jumlah kelahiran di Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah berjumlah 58.058 kelahiran hidup. Jika dilihat menurut Kabupaten, jumlah kelahiran terbesar berada di Kabupaten Parigi Moutong yaitu 7.747 kelahiran hidup diikuti dengan Kabupaten Donggala yaitu 7.248 kelahiran hidup

sedangkan jumlah kelahiran terkecil berada di Kabupaten Banggai Laut yaitu 1.260 diikuti dengan Kabupaten Banggai yaitu 1.718 jumlah kelahiran hidup.

2. Kematian

a. Angka Kematian Bayi

Angka kematian Neonatal, Bayi dan Balita merupakan indikator utama untuk mengetahui tingkat kesehatan suatu masyarakat atau negara. Hal ini disebabkan bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat tinggal orang tua bayi dan status sosial orang tua bayi. Selain itu, fasilitas kesehatan seperti dokter dan rumah sakit yang kurang memadai untuk penanganan penyakit pada Neonatal/Bayi/Balita juga dapat menyebabkan tingginya tingkat kematian Neonatal/Bayi/Balita. Angka Kematian Bayu (AKB) adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 (satu) tahun pada waktunya tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama.

Tabel 4.32
Jumlah Kematian Bayi menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KEMATIAN BAYI
		LAKI - LAKI + PEREMPUAN
1	Banggai Kepulauan	11
2	Banggai	14
3	Morowali	45
4	Poso	39
5	Donggala	36
6	Toli-Toli	24
7	Buol	77
8	Parigi Moutong	48
9	Tojo Una Una	17
10	Sigi	28
11	Banggai Laut	20
12	Morowali Utara	10
13	Kota Palu	33
JUMLAH (KAB/KOTA)		402
ANGKA KEMATIAN (DILAPORKAN)		8.0

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2023

Pada Tahun 2023, kematian bayi tertinggi terdapat di Kabupaten Buol dengan jumlah kasus kematian 77 orang selanjutnya diikuti oleh Kabupaten Parigi Moutong dengan jumlah kasus kematian 48 orang dan Kabupaten Morowali sebanyak 45 orang sedangkan jumlah kematian bayi terendah berada di Kota Palu sebanyak 10 orang. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.31.

b. Angka Kematian Neonatal

Hasil pelaporan berasal dari data rutin yang dikumpulkan oleh Kab/Kota menunjukkan penurunan di setiap tahun meskipun belum terlalu signifikan, dengan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan diharapkan jumlah kematian neonatal, bayi dan anak balita diharapkan akan terus mengalami penurunan.

Tabel. 4.33
Jumlah Kematian Neonatal menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KEMATIAN NEONATAL
		LAKI - LAKI + PEREMPUAN
1	Banggai Kepulauan	10
2	Banggai	14
3	Morowali	37
4	Poso	31
5	Donggala	35
6	Toli-Toli	13
7	Buol	48
8	Parigi Moutong	38
9	Tojo Una Una	10
10	Sigi	28
11	Banggai Laut	19
12	Morowali Utara	7
13	Kota Palu	25
JUMLAH (KAB/KOTA)		315
ANGKA KEMATIAN (DILAPORKAN)		6.3

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2023

Tabel diatas menunjukkan bahwa kematian Neonatal di Kabupaten Buol menjadi yang tertinggi yaitu 48 jiwa dibandingkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, sedangkan Kabupaten Morowali Utara menjadi yang paling rendah diantara Kabupaten/Kota lainnya yaitu dengan jumlah 7 jiwa.

c. Angka Kematian Post-Neonatal

Kematian Post Neonatal adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Kematian yang terjadi pada bayi yang berumur 1 bulan sampai dengan kurang dari 1 tahun per 1000 kelahiran hidup selama 1 tahun.

Tabel. 4.34
Jumlah Kematian Post-Neonatal menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KEMATIAN POST NEONATAL
		LAKI - LAKI + PEREMPUAN
1	Banggai Kepulauan	1
2	Banggai	0
3	Morowali	8
4	Poso	8
5	Donggala	1
6	Toli-Toli	11
7	Buol	29
8	Parigi Moutong	10
9	Tojo Una Una	7
10	Sigi	0
11	Banggai Laut	1
12	Morowali Utara	3
13	Kota Palu	8
JUMLAH (KAB/KOTA)		87
ANGKA KEMATIAN (DILAPORKAN)		

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2023

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah kematian Post-Neonatal tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah berada di Kabupaten Buol yaitu 29 jiwa diikuti dengan Kabupaten Toli-Toli yaitu 11 jiwa serta Kabupaten Parigi Moutong yaitu 10 jiwa sedangkan jumlah kematian post-neonatal terendah berada di Kabupaten Banggai dan Kabupaten Sigi yaitu 0 jiwa.

d. Angka Kematian Anak Balita

Kematian Balita yaitu kematian yang terjadi antara rentang usia 0-59 bulan dapat dikatakan terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya. Angka kematian balita kerap dipakai untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk

Tabel 4.35
Jumlah Kematian Anak dan Balita menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KEMATIAN ANAK BALITA
		LAKI - LAKI + PEREMPUAN
1	Banggai Kepulauan	0
2	Banggai	0
3	Morowali	5
4	Poso	0
5	Donggala	0
6	Toli-Toli	2
7	Buol	4
8	Parigi Moutong	3
9	Tojo Una Una	0
10	Sigi	0
11	Banggai Laut	2
12	Morowali Utara	0
13	Kota Palu	0
JUMLAH (KAB/KOTA)		16
ANGKA KEMATIAN (DILAPORKAN)		0.3

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2023

Pada tabel di atas menunjukkan situasi kematian usia 0-59 bulan di Sulawesi Tengah tertinggi adalah kematian balita yang terjadi di Kabupaten Morowali sebanyak 5 jiwa dan kematian balita terendah sebanyak 0 jiwa yang berada di Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai, Kabupaten Poso, Kabupaten Donggala, Kabupaten Tojo Una Una, Kabupaten Sigi, Kabupaten Morowali Utara dan Kota Palu. Berdasarkan Analisa yang ada bahwa pola asuh dan tingkat pendidikan keluarga yang mempunyai balita merupakan salah satu penyebab kematian tersebut.

Upaya Kesehatan anak yang dimaksud dalam Permenkes Nomor 25 Tahun 2014 dilakukan melalui pelayanan Kesehatan janin dalam kandungan, kesehatan bayi baru lahir, Kesehatan bayi, anak balita dan prasekolah, Kesehatan anak usia sekolah dan remaja dan perlindungan kesehatan anak. Sejalan dengan RPJMN Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 mengenai upaya kesehatan anak disajikan dalam indikator Kesehatan anak yang meliputi :

- a. Pelayanan bayi baru lahir
- b. Pelayanan Balita yang dipantau pertumbuhan perkembangan dalam hal ini akan dipisahkan melalui pelayanan Kesehatan bayi dan pelayanan Kesehatan anak balita.
- c. Persentase puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Remaja, persentase puskesmas yang membina 20% sekolah yang akan dikuskan pada pelayanan UKS/M khusus kegiatan pelayanan Kesehatan.

e. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) ialah salah satu indikator untuk menatap keberhasilan Kesehatan ibu. AKI merupakan rasio kematian bunda sepanjang masa kehamilan, persalinan serta nifas yang diakibatkan oleh kehamilan, persalinan, serta nifas maupun pengelolaannya namun bukan karna sebab-sebab lain semacam musibah maupun incidental disetiap 100.000 kelahiran hidup.

Kematian ibu adalah kematian seorang Wanita yang terjadi selama kehamilan sampai dengan 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa memperhatikan lama dan tempat terjadinya kehamilan, yang disebabkan oleh kehamilannya atau penanganan kehamilannya, tetapi bukan karena kecelakaan dan bunuh diri.

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah jumlah kematian ibu di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama dikali 100.000.

Tabel berikut di bawah ini menggambarkan Jumlah Angka Kematian Ibu di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

Tabel 4.36
Jumlah Kematian Ibu Per Kabupaten/Kota
di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH KEMATIAN IBU HAMIL	JUMLAH KEMATIAN IBU BERSALIN	JUMLAH KEMATIAN IBU NIFAS	JUMLAH KEMATIAN IBU
1	Banggai Kepulauan	14	0	2	1	3
2	Banggai	27	1	3	2	6
3	Morowali	11	2	0	2	4
4	Poso	24	0	1	1	2
5	Donggala	18	3	5	6	14
6	Toli-Toli	15	1	0	0	1
7	Buol	13	0	0	3	3
8	Parigi Moutong	23	0	3	1	4
9	Tojo Una Una	16	0	1	6	7
10	Sigi	19	0	0	0	0
11	Banggai Laut	10	1	1	1	3
12	Morowali Utara	14	2	0	0	2
13	Kota Palu	14	3	3	5	11
JUMLAH		218	13	19	28	60
ANGKA KEMATIAN IBU (DILAPORKAN)						120

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2023

Jumlah kematian ibu di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 adalah sebanyak 60 kasus kematian, jumlah tertinggi berada di Kabupaten Donggala sebanyak 14 kasus diikuti dengan Kota Palu sebanyak 11 kasus sedangkan jumlah kematian ibu terendah berada di Kabupaten Sigi yaitu 0 kasus diikuti dengan Kabupaten Toli-Toli sebanyak 1 kasus. Adapun beberapa faktor penyebab kematian ibu adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan Program Perencanaan Persalinandan Pencegahan Komplikasi (P4K),
2. Kemitraan Bidan dan Dukun, Rumah Tunggu Kelahiran (RTK),
3. Masih adanya pengaruh sosial budaya di Masyarakat serta masih kurangnya dukungan dan komitmen dari lintas sektor
4. Masih adanya persalinan di Non Faskes, berhubung masih kurangnya sarana dan prasarana di beberapa Fasilitas Kesehatan lainnya, kondisi Geografis Daerah,
5. Pelaksanaan ANC secara Integerasi dengan lintas program.

Penyebab utama kematian ibu masih disebabkan Pendarahan yaitu 40%, gangguan Hipertensi dalam kehamilan (HDK) yaitu 28%, penyebab kelainan jantung dan pembuluh darah yaitu 6%, penyebab infeksi yaitu 5% dan penyebab covid-19 yaitu 2%. Adapun kematian ibu oleh sebab lain-lainnya seperti TB Paru, Dispepsia, Emboli, Ileus, Gagal ginjal, Leukimia, HIV, Kehamilan mola, Kehamilan Ektopik Terganggu (KET), Sespek thyroid, Malaria dan Post Ascites yaitu 19%.

4.3.1 Pendidikan

1. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf (AMH) adalah perbandingan jumlah penduduk berusia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis dengan huruf latin serta mengerti kalimat sederhana. Kemampuan penduduk berkomunikasi secara lisan dan tertulis menunjukkan kemampuan penduduk untuk menyerap informasi dan berbagai media, hal ini dapat digunakan untuk melihat potensi intelektual masyarakat dan dapat masuk dalam dunia pekerjaan sekaligus dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan.

Tabel 4.37
Angka Melek Huruf Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

NO.	PROPINSI	ANGKA MELEK HURUF
		Usia 15-24 Tahun
1	Sulawesi Tengah	99.81

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2023

2. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah jumlah siswa berapapun umurnya, yang sudah sekolah ditingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok umur sekolah yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK ini menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum disuatu tingkat pendidikan, dan merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk umur sekolah dimasing-masing jenjang pendidikan.

Tabel 4.38
Angka Partisipasi Kasar (APK) Per Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

NO	KABUPATEN/KOTA	ANGKA PARTISIPASI KASAR
		SM/SEDERAJAT
1	Kota Palu	107.71
2	Kab. Sigi	102.98
3	Kab. Donggala	99.56
4	Kab. Parigi Moutong	106.21
5	Kab. Poso	104.09
6	Kab. Tojo Una-una	102.63
7	Kab. Morowali	103.00
8	Kab. Morowali Utara	97.05
9	Kab. Banggai	107.81
10	kab. Banggai Kepulauan	103.07
11	Kab. Banggai Laut	106.32
12	Kab. Toli-toli	103.13
13	Kab. Buol	109.55

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2023

Tabel 4.38 diatas, menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar pada SM/sederajat Provinsi Sulawesi Tengah yang tertinggi yaitu pada Kabupaten Buol dengan jumlah 109.55 diikuti dengan Kabupaten Banggai dengan jumlah 107.81 dan untuk Kota Palu 107.71 sedangkan yang terendah berada di Kabupaten Morowali Utara 97.05 diikuti dengan Kabupaten Donggala 99.56 selanjutnya Kabupaten Tojo Una Una 102.63.

3. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah presentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan tingkat pendidikannya dari jumlah penduduk diusia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah disetiap tingkat pendidikan. Tetapi jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar dijenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Tabel 4.39
Angka Partisipasi Murni (APM) Per Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

NO.	KABUPATEN/KOTA	ANGKA PARTISIPASI MURNI
		SM/sederajat
1	Kota Palu	79.23
2	Kab. Sigi	68.64
3	Kab. Donggala	70.61
4	Kab. Parigi Moutong	71.53
5	Kab. Poso	76.77
6	Kab. Tojo Una-una	68.21
7	Kab. Morowali	68.36
8	Kab. Morowali Utara	69.84
9	Kab. Banggai	73.12
10	kab. Banggai Kepulauan	62.38
11	Kab. Banggai Laut	63.17
12	Kab. Toli-toli	66.53
13	Kab. Buol	72.48

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2023

Tabel 4.39 Menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Murni SM/Sederajat Provinsi Sulawesi Tengah yang tertinggi persentasenya yaitu pada Kota Palu 79.23 persen, disusul dengan Kabupaten Poso 76.77 persen, dan untuk Kabupaten Banggai 73.12 persen.

4. Angka Penduduk Putus Sekolah

Dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi seni dan budaya, untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Kemiskinan karena tingkat pendidikan orang tua rendah merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan keterlantaran pemenuhan hak anak dalam bidang pendidikan formal sehingga anak mengalami putus sekolah.

Ketidakmampuan ekonomi keluarga dalam menopang biaya pendidikan yang berdampak terhadap masalah psikologi anak sehingga anak tidak bisa bersosialisasi dengan baik dalam pergaulan dengan teman sekolahnya selain itu adalah karena pengaruh teman sehingga ikut-ikutan diajak bermain seperti *play stasion* sampai akhirnya sering membolos dan tidak naik kelas, prestasi di sekolah menurun dan malu pergi kembali ke sekolah. Anak yang kena sanksi karena mangkir sekolah sehingga kena *Drop Out*.

Keadaan status ekonomi keluarga, dalam keluarga miskin cenderung timbul berbagai masalah yang berkaitan dengan pembiayaan hidup anak, sehingga anak sering dilibatkan untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga akibatnya merasa terbebani dengan masalah ekonomi ini dapat mengganggu kegiatan belajar dan kesulitan mengikuti pelajaran.

Kurangnya perhatian orang tua cenderung akan menimbulkan berbagai masalah. Makin besar anak maka perhatian orang tua makin diperlukan, dengan cara variasi dan sesuai kemampuan. Salah satu penyebab kenakalan anak adalah kurangnya perhatian orang tua, hubungan keluarga tidak harmonis dapat berupa perceraian orang tua, hubungan antar keluarga tidak saling peduli, keadaan ini merupakan dasar anak mengalami permasalahan yang serius dan hambatan dalam pendidikannya sehingga mengakibatkan anak mengalami putus sekolah.

Pendidikan dasar wajib yang dipilih Indonesia adalah 9 tahun yaitu pendidikan SD dan SMP, apabila dilihat dari umur mereka yang wajib sekolah adalah 7–15 tahun. Pendidikan merupakan hak yang sangat fundamental bagi anak. Hak yang

wajib dipenuhi dengan kerjasama dari orang tua masyarakat dan pemerintah namun tidaklah mudah untuk merealisasikan pendidikan khususnya menuntaskan wajib belajar 9 tahun, karena pada kenyataannya masih banyak angka putus sekolah.

Tabel 4.40
Rekapitulasi Jumlah Siswa Putus dan Lulus Tidak Melanjutkan di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH SISWA PUTUS			Jumlah Siswa Lulus Tidak melanjutkan		Total
		SMA/SMK Kelas 10	SMA/SMK Kelas 11	SMA/SMK Kelas 12	SD	SMP	
1	Kab. Banggai Kepulauan	69	50	1	196	268	584
2	Kab. Donggala	174	274	15	900	1.208	2.571
3	Kab. Poso	121	150	15	310	432	1.028
4	Kab. Banggai	145	214	21	426	987	1.793
5	Kab. Buol	180	251	10	507	785	1.733
6	Kab. Tolitoli	89	156	12	751	923	1.931
7	Kab. Morowali	117	109	8	332	366	932
8	Kab. Parigi Moutong	217	369	47	1.430	1.626	3.689
9	Kab. Tojo Una-una	108	271	14	605	742	1.740
10	Kab. Sigi	87	185	19	536	864	1.691
11	Kab. Banggai Laut	39	54	7	155	207	462
12	Kab. Morowali Utara	37	123	13	252	257	682
13	Kota Palu	164	267	37	520	962	1.950
Total		1.547	2.473	219	6.920	9.627	20.786

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2023

Jumlah siswa putus sekolah SMA/SMK kelas 10 sebanyak 1.547 siswa, untuk SMA/SMK Kelas 11 sebanyak 2.473 siswa dan SMA/SMK Kelas 12 sebanyak 219 siswa. Jumlah siswa lulus tidak melanjutkan SD yaitu sebanyak 6.920 sedangkan untuk SMP sebanyak 9.627. Terdiri dari 324 siswa putus sekolah dari SD Negeri dan 22 siswa putus sekolah dari SD Swasta.

Adapun faktor penyebab anak putus sekolah salah satunya yaitu rendahnya minat atau kemauan anak untuk bersekolah, sekolah dianggap tidak menarik, ketidakmampuan dalam mengikuti pelajaran dan juga ekonomi keluarga maupun kurangnya perhatian dari orang tua. Faktor lain penyebab anak putus sekolah juga disebabkan karena menikah, bekerja, kecanduan game online, jarak sekolah yang jauh, keterbatasan angkutan daerah, kurangnya sosialisasi pentingnya pendidikan dan sulitnya medan untuk mencapai kesekolah.

4.3.2 Ekonomi

Pengertian tenaga kerja (*manpower*) adalah seluruh penduduk dalam usia kerja (berusia 15 tahun atau lebih) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa. Sedangkan angkatan kerja adalah bagian dari penduduk usia kerja 15 tahun ke atas yang mempunyai pekerjaan selama seminggu yang lalu, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panen atau cuti, ataupun juga tenaga kerja yang sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang sedang mencari kerja, atau yang sedang mempersiapkan suatu usaha, atau yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, ataupun juga yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tenaga kerja dan angkatan kerja dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja adalah penduduk dalam usia produktif yang sedang bekerja dan tergolong pada Angkatan kerja. Sedangkan Angkatan kerja merupakan penduduk dalam usia produktif yang terdiri dari tenaga kerja, sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Angkatan kerja juga artinya penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Menurut ketentuan pemerintah Indonesia, penduduk yang sudah memasuki usia kerja adalah mereka yang berusia minimal 15 tahun sampai 65 tahun. Namun, tidak semua penduduk yang memasuki usia tadi disebut angkatan kerja. Sebab penduduk yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi tidak termasuk dalam kelompok angkatan kerja, seperti ibu rumah tangga, pelajar, dan mahasiswa, serta penerima pendapatan (pensiunan). Pembagian usia angkatan kerja dan bukan angkatan kerja Selain jumlah penduduk, pertumbuhan

angkatan kerja dipengaruhi pula oleh struktur penduduk berdasarkan: jenis kelamin, usia penduduk, dan tingkat pendidikan. Makin banyak komposisi jumlah penduduk laki-laki dalam suatu negara, semakin tinggi pula angkatan kerja di negara itu.

Tenaga kerja dan angkatan kerja dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja adalah penduduk dalam usia produktif yang sedang bekerja dan tergolong pada angkatan kerja. Sedangkan angkatan kerja merupakan penduduk dalam usia produktif yang terdiri dari tenaga kerja, sementara tidak bekerja, dan pengangguran

Tabel 4.41
Jumlah Data Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2023

NO	URAIAN (DESCRIPTION)	INFORMASI	
1	Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja	: 1.547.170 Jiwa
		Proporsi Tenaga Kerja	
		1. SD ke bawah	: 585.604 Jiwa
		2. SMA	: 328.464 Jiwa
		3. SMP	: 258.223 Jiwa
		4. Universitas	: 176.842 Jiwa
		5. SMK	: 97.472 Jiwa
		6. Diploma VIII	: 31.562 Jiwa
2	Jumlah dan Proporsi Penduduk Bekerja dan Menganggur	Jumlah Penduduk Bekerja	: 1.547.170 Jiwa
		Jumlah Penduduk Menganggur	: 47.080 Jiwa
		TPT	: 2.95 %
3	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	TPAK	: 69.85 %
		Laki-Laki	: 85.42 %
		Perempuan	: 53.40 %
4	Jumlah dan Proporsi Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan	Formal	: 524.491 Jiwa (33.90 %)
		Informal	: 1.022.679 Jiwa (66.10 %)

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2023

4.3.3 Sosial

1. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Saat ini tercatat ada 26 jenis PMKS dengan batasan pengertian dan kriteria sebagai berikut :

1. **Anak Balita Terlantar** adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.
2. **Anak Terlantar** adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan dan atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya sehingga kebutuhan anak baik dan jasmani, rohani maupun sosialnya tidak terpenuhi. Anak terlantar seorang anak berusia 5 (lima) sampai 18 (delapan belas) tahun yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
3. **Anak yang Berhadapan dengan Hukum** adalah seorang anak yang berusia 6 (enam) sampai 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, 1) yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana; 2) yang menjadi korban tindak pidana atau melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

4. **Anak Jalanan** adalah seorang anak yang berusia 5-18 tahun, dan anak yang bekerja atau dipekerjakan di jalanan, dan/ atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
5. **Anak dengan Kedisabilitas** adalah seseorang yang berusia 18 tahun ke bawah yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.
6. **Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah Kekerasan** pada anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari penelantaran atau pengabaian anak, kekerasan verbal, kekerasan psikologis, kekerasan fisik, kekerasan seksual, hingga eksploitasi dan penjualan anak. Kekerasan pada anak bisa terjadi di rumah, sekolah, maupun dalam komunitas masyarakat.
7. **Anak yang memerlukan Perlakuan Khusus** adalah anak usia 0-18 tahun dalam situasi darurat, anak korban perdagangan/penculikan, anak korban kekerasan baik fisik dan /atau mental, anak korban eksploitasi, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi serta dari komunitas adat terpencil, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), serta anak yang terinfeksi HIV/AIDS.
8. **Lanjut Usia Telantar** adalah seseorang berusia 60 tahun atau lebih yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
9. **Penyandang Disabilitas** adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas fisik dan mental.

10. **Tuna Susila (WTS)** adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
11. **Gelandangan** adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
12. **Pengemis** adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dengan alasan untuk mengharapkas belas kasihan orang lain.
13. **Pemulung** adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara mengais langsung dan pendaurulang barang-barang bekas.
14. **Kelompok Minoritas/Waria** adalah individu atau kelompok yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, agama atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk seperti waria, gay dan lesbian.
15. **Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan** adalah seseorang yang telah selesai atau dalam 3 bulan segera mengakhiri masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
16. **Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)** adalah seseorang yang telah terinfeksi HIV dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.
17. **Korban Penyalahgunaan NAPZA** adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan NAPZA karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan NAPZA.

18. **Korban Trafficking** adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. (Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang).
19. **Korban Tindak Kekerasan (KTK)** adalah orang (baik individu, keluarga maupun kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat dari penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
20. **Pekerja Migran Bermasalah Sosial** adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial seperti tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pengusiran (deportasi), ketidakmampuan menyesuaikan diri ditempat kerja baru atau di negara tempatnya bekerja, sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi sosial.
21. **Korban Bencana Alam** adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
22. **Korban Bencana Sosial** adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
23. **Perempuan Rawan Sosial Ekonomi** adalah seorang perempuan dewasa berusia 18-59 tahun belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
24. **Fakir Miskin** adalah seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan.

25. **Keluarga bermasalah sosial psikologis** Adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar
26. **Komunitas Adat Terpencil** adalah kelompok orang atau masyarakat yang hidup dalam kesatuan – kesatuan sosial kecil yang bersifat lokal dan terpencil, dan masih sangat terikat pada sumber daya alam dan habitatnya secara sosial budaya terasing dan terbelakang dibanding dengan masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga memerlukan pemberdayaan dalam menghadapi perubahan lingkungan dalam arti luas. Pada tabel di bawah dapat dilihat jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Tabel 4.44
Rekapitulasi Data Populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Tahun 2023

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH PMKS
1	ANAK BALITA TERLANTAR	JWA	62.869
2	ANAK TERLANTAR	JWA	355.497
3	ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM	JWA	124
4	ANAK JALANAN	JWA	0
5	ANAK DENGAN KEDISSABILITAS	JWA	2.254
6	ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK KEKERASAN ATAU DIPERLAKUKAN SALAH	JWA	0
7	ANAK YANG MEMELUKAN PERLAKUAN KHUSUS	JWA	0
8	LANJUT USIA TERLANTAR	JWA	113.827
9	PENYANDANG DISABILITAS	JWA	13.605
10	TUNA SUSILA (WTS)	JWA	148
11	GELANDANGAN	JWA	98
12	PENGEMIS	JWA	0
13	PEMULUNG	JWA	0
14	KELOMPOK MINORITAS / WARIA	JWA	206
15	BEKAS WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN	JWA	1548
16	ORANG DENGAN HIV/AIDS (ODHA)	JWA	118
17	KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA	JWA	442
18	KORBAN TRAFFICING	JWA	130
19	KORBAN TINDAK KEKERASAN (KTK)	JWA	507
20	PEKERJA MIGRAN BERMASALAH SOSIAL	JWA	0
21	KORBAN BENCANA ALAM	JWA	6.108
22	KORBAN BENCANA SOSIAL	JWA	598
23	PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI	JWA	0
24	FAKIR MISKIN	JWA	1.689.604
25	KELUARGA BERMASALAH SOSIAL PSIKOLOGIS	JWA	0
26	KOMUNITAS ADAT TERPENCIL	JWA	79.793
		KK	16.472
TOTAL			2.343.948

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2023

2. Proporsi Penduduk Penyandang Disabilitas

Difabel atau disabilitas adalah istilah yang meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Gangguan adalah sebuah masalah pada fungsi tubuh atau strukturnya. Suatu pembatasan kegiatan adalah kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam melaksanakan tugas atau tindakan, sedangkan pembatasan partisipasi merupakan masalah yang dialami oleh individu dalam keterlibatan dalam situasi kehidupan. Jadi disabilitas adalah sebuah fenomena kompleks, yang mencerminkan interaksi antara ciri dari tubuh seseorang dan ciri dari masyarakat tempat ia tinggal.

Tabel 4.45
Rekap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Penyandang Disabilitas Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Ragam Disabilitas

NO	RAGAM DISABILITAS	KAB. BUOL	KAB. PARIGI MOUTONG	KAB. TOJO UNA-UNA	KAB. SIGI	KAB. BANGGAI LAUT	KAB. MOROWALI UTARA	KOTA PALU	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	KAB. BANGGAI	KAB. MOROWALI	KAB. POSO	KAB. DONGGALA	KAB. TOLITOLI	JUMLAH
1	Tuna daksa/ cacat tubuh	259	565	254	325	89	172	284	231	524	128	487	398	302	4.018
2	Tuna netra/ buta	204	372	138	215	47	100	113	201	428	105	202	284	187	2.596
3	Tuna rungu	144	198	73	165	44	64	35	136	258	41	176	141	120	1.595
4	Tuna wicara	76	236	64	149	27	54	76	93	159	51	173	133	100	1.391
5	Tuna rungu & wicara	40	92	33	70	11	35	33	38	69	17	94	63	46	641
6	Tuna netra & cacat tubuh	45	64	19	49	3	27	13	37	66	22	45	60	37	487
7	Tuna netra, rungu, & wicara	17	26	7	27	-	9	10	4	22	9	18	16	10	175
8	Tuna rungu, wicara, & cacat tubuh	23	39	18	37	3	18	20	16	41	7	38	30	25	315
9	Tuna rungu, wicara, netra, & cacat tubuh	18	57	12	22	3	11	15	14	36	11	23	41	12	275
10	Cacat mental retardasi	114	270	102	136	49	97	125	129	243	84	236	197	112	1.894
11	Mantan penderita gangguan jiwa	53	126	48	87	10	37	51	38	105	25	83	139	40	842
12	Cacat fisik & mental	224	279	111	193	29	110	95	136	263	83	206	190	144	2.063
	JUMLAH DISABILITAS	1.217	2.324	879	1.475	315	734	870	1.073	2.214	583	1.781	1.692	1.135	16.292

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2023

Informasi tentang penyandang disabilitas berguna untuk pengambilan kebijakan dalam penyediaan akses atau fasilitas umum bagi para penyandang disabilitas. Angka penyandang disabilitas dapat menunjukkan banyaknya penduduk Provinsi Sulawesi Tengah yang menyandang disabilitas atau kecacatan. Berdasarkan pada tabel 4.47 angka penyandang disabilitas di atas, terlihat bahwa banyaknya penduduk Provinsi Sulawesi Tengah yang menyandang disabilitas sebanyak 16.292 (Enam belas ribu dua ratus Sembilan puluh dua) jiwa, yang mana penyandang disabilitas terbanyak berada di Kabupaten Parigi Moutong yaitu 2.324 (Dua ribu tiga ratus dua puluh empat) sedangkan terendah berada di Kabupaten Banggai Laut yaitu 315 (Tiga ratus lima belas). Angka ini berbeda dengan angka penyandang disabilitas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah dengan jumlah 5.065 (Lima ribu enam puluh lima) jiwa, yang mana jumlah penduduk penyandang disabilitas tergolong sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk 3.154.499 (Tiga juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) jiwa. Penyandang disabilitas terbanyak berada di Kota palu yaitu sebanyak 819 (Delapan ratus Sembilan belas) jiwa dari jumlah penduduk sebanyak 386.555 (Tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima) jiwa, sedangkan terendah di Kabupaten Morowali Utara sebanyak 137 (Seratus tiga puluh tujuh) jiwa dari jumlah penduduk 148.274 (Seratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh empat) jiwa.

3. Proporsi Penduduk Miskin Penerima Askeskin

Kemiskinan adalah kondisi keterbatasan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak seperti keterbatasan dalam pendapatan, keterampilan, kondisi kesehatan, penguasaan asset ekonomi ataupun akses informasi. Pengukuran ini bersifat materi atau pendekatan moneter. Pengukuran dengan pendekatan moneter dapat dilakukan dengan menggunakan data pengeluaran sebagai pendekatan pendapatan rumah tangga. Kemudian data pengeluaran ini diperbandingkan dengan suatu batas nilai tukar rupiah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Batas ini sering disebut sebagai garis kemiskinan. Penduduk yang pengeluarannya lebih kecil daripada garis kemiskinan ini disebut penduduk miskin.

Tabel 4.46
Rekap Data Peserta Jaminan Kesehatan Nasional
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

NO	KABUPATEN/KOTA	PESEERTA JKN	
		PBI APBN	PBI PROVINSI
1	KAB. POSO	132.400	324
2	KAB. TOLI-TOLI	97.525	1.333
3	KAB. MOROWALI UTARA	46.557	353
4	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	52.785	2.504
5	KOTA PALU	94.886	951
6	KAB. BANGGAI	105.818	5.900
7	KAB. PARIGI MOUTONG	255.985	1.727
8	KAB. BUOL	81.529	1.314
9	KAB. TOJO UNA-UNA	86.654	1.631
10	KAB. SIGI	109.668	5.194
11	KAB. BANGGAI LAUT	36.223	3.614
12	KAB. MOROWALI	49.326	124
13	KAB. DONGGALA	161.385	930
TOTAL		1.310.741	25.899

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2023

Keterangan :

JKN = Jaminan Kesehatan Nasional

PBI = Penerima Bantuan Iuran

Salah satu indikator keberhasilan penentasan kemiskinan adalah terpenuhinya akses penduduk miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pembiayaan kesehatan penduduk miskin biasanya dipenuhi melalui asuransi kesehatan bagi penduduk miskin/jaminan kesehatan bagi penduduk miskin.

Indikator penduduk miskin berguna untuk Menyusun suatu program kegiatan di dalam meningkatkan pelayanan bagi penduduk miskin seperti pelayanan kesehatan.

4.4 MOBILITAS PENDUDUK

Mobilitas penduduk selama ini belum memperoleh perhatian bagi pemerintah. Pada kenyataannya mobilitas penduduk mempunyai peran yang sangat signifikan dalam mempengaruhi laju pertumbuhan dan struktur penduduk di suatu wilayah. Selain itu mobilitas penduduk juga mempunyai peran terhadap pengembangan wilayah, pembangunan sosial ekonomi dan budaya di wilayah yang bersangkutan.

Mobilitas Penduduk Permanen (Migrasi) adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administrasi (migrasi internal) atau batas politik/Negara (migrasi internasional) atau dengan cara migrasi diartikan perpindahan permanen dari suatu daerah ke daerah lain, yang terjadi karena adanya perbedaan kondisi kedua daerah tersebut. Perbedaan terbesar yang mendorong terjadinya migrasi adalah kondisi ekonomi dan non ekonomi. Migrasi juga dipengaruhi oleh daya dorong suatu daerah dan daya tarik daerah lainnya. Daya dorong menyebabkan orang pergi ke daerah lain, seperti perkembangan industri, perdagangan, pendidikan, perumahan dan transportasi, dengan kata lain suatu daerah mempunyai daya tarik jika suatu wilayah mampu atau dianggap mampu menyediakan fasilitas dan sumber penghidupan penduduk, baik bagi penduduk wilayah itu sendiri maupun penduduk disekitarnya dan daerah-daerah lain. Kondisi ini dimanti oleh penduduk daerah lain yang berharap dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya untuk memberikan jaminan kehidupan.

Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah administrative lainnya, yang merefleksikan perbedaan pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan fasilitas Pembangunan antara satu daerah dengan daerah lain. Analisis tentang migrasi atau mobilitas penduduk merupakan indicator yang penting bagi terlaksananya Pembangunan manusia seutuhnya. Migrasi terdiri atas migrasi masuk (dating) dan migrasi keluar (pindah). kemudian dari kedua nilai tersebut dapat dihitung Migrasi Neto, yaitu selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar. Apabila migrasi

masuk lebih besar daripada migrasi keluar maka disebut migrasi neto positif. Sedangkan jika migrasi keluar lebih besar daripada migrasi masuk disebut migrasi neto negatif.

Pada sisi lain, setiap daerah mempunyai faktor pendorong yang dapat menyebabkan sejumlah penduduknya migrasi keluar daerah. Faktor pendorong itu antara lain kesempatan kerja yang terbatas jumlah dan jenisnya, sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai, fasilitas perumahan dan kondisi lingkungan yang kurang baik.

Adapun beberapa faktor non-ekonomis yang mempengaruhi keinginan seseorang melakukan migrasi adalah :

1. Faktor-faktor sosial, termasuk keinginan para migrant untuk melepaskan dari kendala-kendala tradisional yang terkandung dalam organisasi-organisasi sosial yang sebelumnya mengekang mereka;
2. Faktor-faktor fisik, termasuk pengaruh iklim dan bencana meteorologist, banjir dan kekeringan;
3. Faktor-faktor demografi, termasuk penurunan tingkat kematian yang kemudian mempercepat laju pertumbuhan penduduk suatu tempat;
4. Faktor-faktor kultural, termasuk pembinaan kelestarian hubungan keluarga besar yang berada pada tempat tujuan migrasi;
5. Faktor-faktor komunikasi, termasuk kualitas seluruh sarana transportasi, system pendidikan yang cenderung berorientasi pada kehidupan kota dan dampak-dampak modernisasi yang ditimbulkan oleh media massa atau media elektronik.

Tabel 4.47
Rekapitulasi Pergerakan Migrasi Penduduk
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

KODE	KABUPATEN/KOTA	PINDAH	DATANG
7201	KAB. BANGGAI	1.394	1.235
7202	KAB. POSO	1.181	1.133
7203	KAB. DONGGALA	1.160	957
7204	KAB. TOLI TOLI	1.652	1.590
7205	KAB. BUOL	606	526
7206	KAB. MOROWALI	1.450	2.311
7207	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	618	510
7208	KAB. PARIGI MOUTONG	1.908	1.593
7209	KAB. TOJO UNA UNA	879	827
7210	KAB. SIGI	952	1.090
7211	KAB. BANGGAI LAUT	388	387
7212	KAB. MOROWALI UTARA	1.045	1.281
7271	KOTA PALU	2.670	2.530
TOTAL		15.903	15.970

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2023)

Tabel 4.44 menunjukkan pergerakan migrasi penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah, dimana jumlah pindah di Provinsi Sulawesi Tengah baik antar Provinsi maupun Kabupaten/Kota/Kecamatan dan Desa/Kelurahan pada kurun waktu januari sampai desember 2023 yaitu 15.903 Jiwa, sedangkan jumlah datang di Provinsi Sulawesi Tengah baik antar Provinsi maupun Kabupaten/Kota/Kecamatan dan Desa/Kelurahan pada kurun waktu januari sampai desember 2023 yaitu 15.970 Jiwa.

BAB V

KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Dokumen Kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Akta Perkawinan/Perceraian wajib dimiliki oleh penduduk Indonesia. Dokumen kependudukan ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara perdata bagi pemiliknya. Kepemilikan dokumen ini sekain mempunyai kekuatan legal, juga dapat digunakan untuk memperoleh pelayanan sosial dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara bagi pemerintah, kepemilikan dokumen kependudukan bermanfaat dalam melakukan kegiatan pengadministrasian penduduk berdasarkan hak legalnya serta memperkuat database penduduk dan pelayanan publik.

Namun demikian, karena pemberian dokumen ini menganut stesel aktif dimana penduduk harus melaporkan dan mengurus sendiri dokumen kependudukan mereka, maka kesadaran penduduk, akses ketempat pelayanan, kualitas pelayanan serta kualitas informasi menjadi satu hal penting untuk meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Selain itu meskipun stesel aktif, pemerintah seharusnya mencari upaya untuk mempermudah pelayanan terutama bagi penduduk yang baik fisik, ekonomi maupun sosial. Mendekatkan tempat-tempat pelayanan menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

5.1 Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)

Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Kartu Keluarga merupakan salah satu dari beberpa dokumen kependudukan yang bersifat wajib dimiliki oleh setiap keluarga, Kartu Keluarga menunjukkan hubungan kekerabatan antara Kepala Keluarga dengan anggota keluarganya. Untuk menghindari kepala keluarga ganda, maka perempuan bisa menjadi keluarga karena status perkawinannya janda maupun karena menjadi istri kedua, ketiga, maupun keempat dari seorang laki-

laki, sedangkan suaminya menjadi kepala keluarga hanya disalah satu istri sesuai dengan kesepakatan dikeluarga tersebut atau berdasarkan buku nikah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 109 Tahun 2019 tentang Tanda Tangan Elektronik. Untuk itu, penandatanganan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga dan akta-akta menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE), Penandatanganan ini sah dan sudah melewati prosedur verifikasi dan tidak diperlukan legalisir untuk fotocopy dokumen kependudukannya. Hal tersebut dikarenakan pengesahan dokumen kependudukan untuk dapat melihat dokumen kependudukan dapat menggunakan *QR Code* pada dokumen tersebut.

Tabel. 5.1.
Jumlah dan Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)

KODE	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KK YANG DICETAK	JUMLAH KK BELUM CETAK	JUMLAH (KK)	JUMLAH PERSENTASE
7201	KAB. BANGGAI	122.333	621	122.954	99.49
7202	KAB. POSO	85.735	569	86.304	99.34
7203	KAB. DONGGALA	99.458	1.045	100.503	98.96
7204	KAB. TOLI TOLI	76.619	308	76.927	99.60
7205	KAB. BUOL	45.885	53	45.938	99.88
7206	KAB. MOROWALI	68.864	229	69.093	99.67
7207	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	42.177	239	42.416	99.44
7208	KAB. PARIGI MOUTONG	144.663	780	145.443	99.46
7209	KAB. TOJO UNA UNA	54.480	201	54.681	99.63
7210	KAB. SIGI	91.531	764	92.295	99.17
7211	KAB. BANGGAI LAUT	23.934	101	24.035	99.58
7212	KAB. MOROWALI UTARA	57.582	150	57.732	99.74
7271	KOTA PALU	127.273	439	127.712	99.66
TOTAL		1.040.534	5.499	1.046.033	99.47

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2023)

Tabel 5.1. diatas menunjukkan bahwa di Provinsi Sulawesi Tengah jumlah keluarga yang sudah memiliki dokumen Kartu Keluarga sebanyak 797.570, sedangkan yang belum memiliki dokumen Kartu Keluarga sebanyak 220.649. Adapun daerah

dengan jumlah yang memiliki dokumen kartu keluarga terbanyak terdapat di Kabupaten Parigi Moutong sedangkan yang terendah terdapat di Kabupaten Banggai Laut.

5.2 Kepemilikan KTP-Elektronik (KTP-el)

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia. Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013, KTP wajib dimiliki oleh setiap penduduk Indonesia yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun keatas atau mereka yang berumur dibawah 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah pernah kawin, dalam profil ini disebut penduduk wajib KTP. Dengan memiliki KTP penduduk dapat dengan mudah mengurus semua yang berkaitan dengan legalitas serta memperoleh pelayanan sosial dan ekonomi dasar lainnya, meliputi urusan perbankan, mengurus sertifikat tanah, mengurus perkawinan, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Berikut tabel yang menyajikan jumlah penduduk menurut kepemilikan KTP.

Tabel. 5.2
Jumlah dan Persentase Kepemilikan KTP-el

KODE	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH WAJIB KTP	JUMLAH PEREKAMAN	JUMLAH PENCETAKAN	JUMLAH PERSENTASE
7201	KAB. BANGGAI	373.336	277.188	262.890	261.153	69.95
7202	KAB. POSO	251.473	193.133	163.931	162.540	64.64
7203	KAB. DONGGALA	313.482	227.201	216.146	214.416	68.40
7204	KAB. TOLI TOLI	238.397	169.894	163.926	162.631	68.22
7205	KAB. BUOL	158.421	108.932	106.098	105.712	66.73
7206	KAB. MOROWALI	183.957	129.707	129.710	129.014	70.13
7207	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	127.834	93.629	90.407	89.530	70.04
7208	KAB. PARIGI MOUTONG	457.031	332.962	316.319	313.556	68.61
7209	KAB. TOJO UNA UNA	171.340	123.428	119.234	118.538	69.18
7210	KAB. SIGI	267.798	196.196	190.669	189.837	70.89
7211	KAB. BANGGAI LAUT	76.601	54.274	52.398	52.028	67.92
7212	KAB. MOROWALI UTARA	148.274	110.078	109.488	108.699	73.31
7271	KOTA PALU	386.555	278.618	273.225	272.272	70.44
	TOTAL	3.154.499	2.295.240	2.194.441	2.179.926	69.11

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2023)

Tabel 5.2 di atas menunjukkan bahwa tingkat persentase kepemilikan dokumen kependudukan KTP-el tertinggi berada pada Kabupaten Morowali Utara yaitu sebesar 73.31 persen sedangkan tingkat persentase terendah berada pada Kabupaten Poso yaitu sebesar 64.64 persen.

5.3 Kepemilikan Akta

5.3.1 Akta Kelahiran

Akta Kelahiran merupakan bukti pencatatan sipil atas peristiwa kelahiran seseorang. Dokumen ini dibutuhkan untuk berbagai proses administrasi, terutama sebelum penduduk memiliki KTP-el. Tabel 5.3 menunjukkan jumlah kepemilikan akta kelahiran di Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 5.3
Jumlah dan Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran

KODE	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK	MEMILIKI AKTA LAHIR	BELUM MEMILIKI AKTA LAHIR	JUMLAH PERSENTASE
7201	KAB. BANGGAI	373.336	92.115	281.221	24.67
7202	KAB. POSO	251.473	63.601	187.872	25.29
7203	KAB. DONGGALA	313.482	91.417	222.065	29.16
7204	KAB. TOLITOLI	238.397	74.351	164.046	31.19
7205	KAB. BUOL	158.421	51.308	107.113	32.39
7206	KAB. MOROWALI	183.957	53.980	129.977	29.34
7207	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	127.834	34.288	93.546	26.82
7208	KAB. PARIGI MOUTONG	457.031	136.355	320.676	29.83
7209	KAB. TOJO UNA UNA	171.340	54.203	117.137	31.63
7210	KAB. SIGI	267.798	76.435	191.363	28.54
7211	KAB. BANGGAI LAUT	76.601	25.238	51.363	32.95
7212	KAB. MOROWALI UTARA	148.274	39.604	108.670	26.71
7271	KOTA PALU	386.555	112.491	274.064	29.10
	TOTAL	3.154.499	905.386	2.249.113	28.70

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2023)

Tabel 5.3 diatas menunjukkan bahwa tingkat persentase kepemilikan akta kelahiran tertinggi berada di Kabupaten Banggai Laut yaitu sebesar 32.95 persen diikuti dengan Kabupaten Buol yaitu sebesar 32.39 persen sedangkan yang terendah berada di Kabupaten Banggai yaitu sebesar 24.67 persen diikuti dengan Kabupaten Poso 25.29 persen.

Tabel 5.4
Jumlah dan Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Berdasarkan Jumlah Anak 0-17 Tahun

KODE	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH ANAK 0-17 TAHUN (JIWA)	MEMILIKI AKTA LAHIR	BELUM MEMILIKI AKTA LAHIR	JUMLAH PERSENTASE
7201	KAB. BANGGAI	110.072	92.115	281.221	83.69
7202	KAB. POSO	67.439	63.601	187.872	94.31
7203	KAB. DONGGALA	99.050	91.417	222.065	92.29
7204	KAB. TOLITOLI	76.107	74.351	164.046	97.69
7205	KAB. BUOL	54.204	51.308	107.113	94.66
7206	KAB. MOROWALI	55.511	53.980	129.977	97.24
7207	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	38.912	34.288	93.546	88.12
7208	KAB. PARIGI MOUTONG	143.009	136.355	320.676	95.35
7209	KAB. TOJO UNA UNA	54.767	54.203	117.137	98.97
7210	KAB. SIGI	78.815	76.435	191.363	96.98
7211	KAB. BANGGAI LAUT	25.462	25.238	51.363	99.12
7212	KAB. MOROWALI UTARA	40.447	39.604	108.670	97.92
7271	KOTA PALU	117.073	112.491	274.064	96.09
	TOTAL	960.868	905.386	2.249.113	94.23

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2023)

Tabel 5.4 menunjukkan bahwa tingkat persentase kepemilikan akta kelahiran berdasarkan jumlah anak 0-17 Tahun tertinggi berada di Kabupaten Banggai Laut yaitu sebesar 99.12 persen diikuti dengan Kabupaten Tojo Una Una 98.97 persen sedangkan yang terendah berada di Kabupaten Banggai sebesar 83.69 diikuti dengan Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 88.12 persen.

5.3.2 Akta Perkawinan

Didalam proses perkawinan, penduduk memiliki kewajiban untuk melaporkan peristiwa perkawinan kepada Negara. Selanjutnya negara akan memberikan akta perkawinan sebagai bukti sudah tercatatnya perkawinan tersebut. Akta perkawinan merupakan identitas atas penduduk yang berstatus kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta perkawinan memberikan kekuatan hukum atas ikatan yang sah antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk ikatan keluarga dengan seluruh hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya.

Tabel 5.5
Kepemilikan Akta Perkawinan

KODE	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK	STATUS KAWIN	MEMILIKI AKTA	TIDAK MEMILIKI AKTA	%
7201	KAB. BANGGAI	373.336	177.910	107.651	70.259	60.51
7202	KAB. POSO	251.473	119.398	59.181	60.217	49.57
7203	KAB. DONGGALA	313.482	149.110	59.394	89.716	39.83
7204	KAB. TOLI TOLI	238.397	110.259	66.339	43.920	60.17
7205	KAB. BUOL	158.421	71.501	48.545	22.956	67.89
7206	KAB. MOROWALI	183.957	85.145	50.727	34.418	59.58
7207	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	127.834	60.628	33.946	26.682	55.99
7208	KAB. PARIGI MOUTONG	457.031	218.689	125.719	92.970	57.49
7209	KAB. TOJO UNA UNA	171.340	78.658	47.180	31.478	59.98
7210	KAB. SIGI	267.798	131.388	69.782	61.606	53.11
7211	KAB. BANGGAI LAUT	76.601	34.353	29.571	4.782	86.08
7212	KAB. MOROWALI UTARA	148.274	67.717	39.687	28.030	58.61
7271	KOTA PALU	386.555	171.773	135.459	36.314	78.86
	TOTAL	3.154.499	1.476.529	873.181	603.348	59.14

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2023)

Tabel 5.5 diatas dapat dilihat bahwa kepemilikan akta perkawinan terbanyak di Kota Palu sebesar 135.459 dokumen sedangkan kepemilikan akta perkawinan terkecil di Kabupaten Banggai Laut sebesar 29.571 dokumen. Kepemilikan akta perkawinan sangat

diperlukan untuk menghindari terjadinya kasus yang menyangkut hak-hak perdata suami-istri.

5.3.3 Akta Perceraian

Seperti halnya perkawinan, peristiwa perceraian juga perlu dicatatkan pada database kependudukan. Penduduk akan mendapatkan akta perceraian sebagai bukti tercatatnya perceraian mereka. Dalam hal ini, akta perceraian merupakan dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh penduduk yang berstatus cerai hidup. Sedangkan bagi yang berstatus cerai mati tidak wajib. Akta perceraian dibutuhkan jika yang bersangkutan akan melakukan pernikahan Kembali.

Mengapa perceraian perlu dicatatkan dan diurus akta perceraianya? Bukti sahnya perceraian yang diperlukan sebagai dasar :

1. Legalitas putusnya perkawinan dan perubahan status sebagai janda atau duda cerai hidup.
2. Pengurusan hak tunjangan anak dari suami istri, harta gono gini, dan perkawinan setelah perceraian.

Bagi Pemerintah, dengan pencatatan perceraian diperoleh statistik peristiwa yang dapat digunakan untuk kepentingan pemantauan keluarga dan penetapan kebijakan pembangunan lainnya.

Pasangan suami istri tentunya berkeinginan menjalani ikatan perkawinan selamanya, tetapi bila sudah tidak dapat dipertahankan maka terjadi perceraian. Bukti hukum pasangan suami istri telah berpisah adalah akta perceraian. Bila akta perkawinan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Non Muslim), maka perceraian dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri, dan bila akta perkawinan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (Muslim) maka proses perceraianya melalui Pengadilan Agama. Penerbitan akta perceraian terbesar terjadi di Kota Palu yaitu sebanyak 4.470 dokumen. Hal ini dapat kita lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.6
Kepemilikan Akta Perceraian

KODE	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK	STATUS CERAI (JWA)	MEMILIKI AKTA CERAI (JWA)	TIDAK MEMILIKI AKTA	%
7201	KAB. BANGGAI	373.336	7.389	3.545	3.844	47.98
7202	KAB. POSO	251.473	2.790	1.011	1.779	36.24
7203	KAB. DONGGALA	313.482	2.872	789	2.083	27.47
7204	KAB. TOLITOLI	238.397	3.008	1.582	1.426	52.59
7205	KAB. BUOL	158.421	1.598	824	774	51.56
7206	KAB. MOROWALI	183.957	2.804	1.144	1.660	40.80
7207	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	127.834	1.943	445	1.498	22.90
7208	KAB. PARIGI MOUTONG	457.031	5.030	2.560	2.470	50.89
7209	KAB. TOJO UNA UNA	171.340	2.635	1.239	1.396	47.02
7210	KAB. SIGI	267.798	3.726	1.181	2.545	31.70
7211	KAB. BANGGAI LAUT	76.601	871	676	195	77.61
7212	KAB. MOROWALI UTARA	148.274	1.518	824	694	54.28
7271	KOTA PALU	386.555	7.164	4.470	2.694	62.40
	TOTAL	3.154.499	43.348	20.290	23.058	46.81

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2023)

Penduduk bercerai dapat disebabkan banyak faktor yang dialami oleh penduduk tersebut. Penyebab perceraian paling banyak dikarenakan perselisihan suami-istri dan atau ditinggal salah satu pasangan. Tingginya kasus perceraian dapat dilihat pada kepemilikan dokumen akta perceraian.

5.3.4 Akta Kematian

Administrasi kependudukan bukan saja dibutuhkan oleh penduduk yang masih masih hidup, namun juga berlaku untuk yang elah meninggal dunia. Fungsi dari tertib administrasi untuk mengurus akta kematian, sama pentingnya dengan kepengurusan

akta kelahiran. Masyarakat perlu segera membiasakan diri untuk melakukan kepengurusan akta kematian. Karna terkait status hukum seseorang, baik itu hukum private maupun pribadi. Akta kematian menjadi persyaratan penting dalam kepengurusan dokumen terkait persoalan ahli waris. Jika pelaporan kematian ini tidak berjalan dengan benar, maka biodata almarhum/almarhumah akan tetap terdaftar dalam database kependudukan, sehingga akan selalu muncul problem mengenai jumlah penduduk yang tidak sesuai antara *de facto* dengan *de jure*.

Manfaat Dokumen Akta Kematian bagi penduduk diantaranya :

1. Penetapan status janda atau duda (terutama bagi Pegawai Negeri) diperlukan sebagai syarat menikah lagi.
2. Untuk persyaratan pengurusan pembagian waris (Peralihan Hak Atas Tanah), baik bagi istri atau suami maupun anak.
3. Diperlukan untuk mengurus pensiun bagi ahli warisnya.
4. Persyaratan untuk mengurus uang duka, tunjangan kecelakaan, taspen, asuransi, perbankan, pensiun.

BAB VI

PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Penduduk merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam aspek pembangunan. Penduduk bukan hanya sebagai obyek dari pembangunan tapi sekaligus sebagai subjek dari pembangunan, artinya penduduk berperan penting dalam kesuksesan semua aspek pembangunan. Jumlah penduduk yang besar tentunya membutuhkan pengembangan sistem administrasi kependudukan yang terorganisir dari pusat hingga ke daerah. Administrasi kependudukan yang dimaksud menyangkut seluruh masalah kependudukan, yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Semakin lengkap dan akuratnya data kependudukan yang tersedia, maka semakin mudah dan tepat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Data perkembangan kependudukan merupakan data yang strategis dan dibutuhkan untuk perencanaan kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan dan berkesinambungan. Pembangunan berwawasan kependudukan bermakna pembangunan yang diselaraskan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada.

Penyajian data perkembangan kependudukan ditampilkan dalam bentuk tabel, gambar dan diagram/grafik serta analisis (penjelasan) yang memudahkan bagi Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah yang akan memanfaatkan Buku Profil Perkembangan Kependudukan ini sebagai sumber informasi.

Jumlah penduduk cenderung mengalami peningkatan terus-menerus dan luas wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Hal tersebut menjadikan kepadatan semakin meningkat, dan apabila tidak mendapat perhatian lebih dari Pemerintah setempat akan berdampak pada laju pertumbuhan dan perencanaan persebaran penduduk, tata ruang dan tata guna tanah. Jika ketiga hal ini tidak diperhatikan dengan baik, maka ke depan Provinsi Sulawesi Tengah akan menjadi daerah yang padat dengan implikasi pada penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan perkotaan, yang berimplikasi

pada resiko kesehatan penduduk, terutama dalam lingkungan dan persaingan akses fasilitas hidup yang dapat memicu permasalahan sosial.

Potensi yang dapat dilihat bahwa penduduk Provinsi Sulawesi Tengah didominasi oleh kelompok usia produktif maka perlu perhatian dari pemangku kebijakan Kabupaten/Kota dan Provinsi untuk meningkatkan potensi tersebut. Perlunya peningkatan kualitas Pendidikan, kesehatan dan kecukupan gizi serta upaya menciptakan angkatan kerja yang berkualitas demi kemajuan daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam profil perkembangan kependudukan ini ada beberapa perbedaan data kependudukan dengan Sektor lainnya, seperti data kependudukan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah maupun data penyandang disabilitas dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah. Akan tetapi bukan menjadi bahan perdebatan yang serius, dikarenakan dari masing-masing sektor memiliki cara penghitungan dan pengolahan data. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi, Kabupaten dan Kota sendiri dalam hal pengolahan dan penyajian data kependudukan berdasarkan data dari SIAK yaitu data pelayanan Kabupaten/Kota yang telah dikonsolidasikan, dibersihkan dan dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI per semester (semester I cut off setiap tanggal 30 Juni dan semester II cut off setiap tanggal 31 Desember) atau setiap 6 (enam) bulan sekali. Cara ini biasanya diartikan dengan pendekatan *De Jure*. Sedangkan BPS melakukan dengan cara pendekatan *De Facto* yaitu berdasarkan fakta/kondisi pada saat turun ke lapangan, untuk batas *cut off* dari BPS dalam penghitungan dan pengolahan data yaitu pada bulan September setiap tahunnya, kemudian pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah yaitu cara pengolahan dan penyajian data hampir bersamaan seperti cara yang dilakukan oleh BPS.

6.2 SARAN

1. Pemahaman masyarakat tentang pentingnya updating data kependudukan masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diharapkan setiap Kabupaten dan Kota agar melakukan sosialisasi terhadap pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya

updating data dan dilaksanakan sampai tingkat RT/RW. Data yang *update* dan dapat dipertanggungjawabkan akan menambah kualitas data kependudukan yang dihasilkan sehingga pengambilan kebijakan dan program pemerintah dapat dilaksanakan dengan tepat pula.

2. Pemanfaatan data yang belum terintegrasi antara data penduduk yang diakses instansi eksternal yang mempunyai instansi vertikal di tingkat pusatnya dengan data penduduk yang bersangkutan menjadikan kurang efektifnya sistem. Hal tersebut diperlukan sistem, sehingga ketika penduduk melaporkan perubahan datanya, maka data yang diakses oleh instansi eksternal dapat *update* secara sistem.
3. Secara umum, jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 tercatat mencapai 3.154.499 (Tiga Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan) jiwa di mana laki-laki berjumlah 1.618.453 (Satu Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tiga) jiwa dan perempuan berjumlah 1.536.046 (Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Puluh Enam) jiwa. Hal ini menggambarkan bahwa penduduk laki-laki berjumlah lebih banyak dibandingkan penduduk Perempuan, walaupun selisih diantara keduanya tidak terlalu signifikan dan untuk pelayanan administrasi kependudukan lebih tepat sasaran sesuai dengan apa yang menjadi target.
4. Cakupan kepemilikan akta kelahiran yang belum maksimal serta wajib KTP yang tidak ditindak lanjuti lebih maksimal. Diperlukan kebijakan dan Kerjasama dengan OPD/Instansi/ Kelurahan/PKK sehingga cakupan akta kelahiran dan wajib KTP dapat meningkat sesuai dengan capaian target nasional. Upaya yang perlu ditekankan diantaranya :
 1. Mencatatkan peristiwa kelahiran.
 2. Mendaftarkan dan mencatatkan kejadian vital seperti: perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak.
 3. Mencatatkan perubahan status kependudukan lainnya seperti: perubahan alamat ataupun perubahan nama, jenjang pendidikan, pekerjaan, golongan darah dan lainnya.
 4. Melakukan pelayanan jemput bola terhadap pelayanan administrasi terutama wajib KTP.

5. Mewajibkan penduduk yang sudah mencukupi usia 17 Tahun atau belum mencukupi akan tetapi sudah menikah untuk memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD), yang mana dengan adanya fitur IKD dapat memudahkan masing-masing penduduk dalam berurusan, karena adanya fitur pelayanan di dalamnya. Hal ini juga telah disosialisasikan dalam beberapa tahap yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) jajaran Pemerintah Pusat dan ASN jajaran Pemerintah Daerah serta Mahasiswa dan Masyarakat Luas.

Kami menyadari bahwa Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sulawesi Tengah ini masih jauh dari sempurna sehingga kritik dan saran untuk perbaikan Profil Kependudukan mendatang baik dari pengguna data kependudukan maupun pemerhati masalah kependudukan sangat kami harapkan. Terima Kasih.



PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN



disdukcapilsulteng



dukcapil.sultengprov.go.id